

LAPORAN KINERJA

2021



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 4 sasaran program dengan 16 indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 4 Direktorat Teknis, 7 Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, 44 Politeknik Negeri, dan 5 Akademi Komunitas Negeri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2021. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta sebagai rencana aksi di masa yang akan datang untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2021.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2021, dan semoga dokumen laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2022

Direktur Jenderal,



Wikan Sakarinto

Daftar Isi

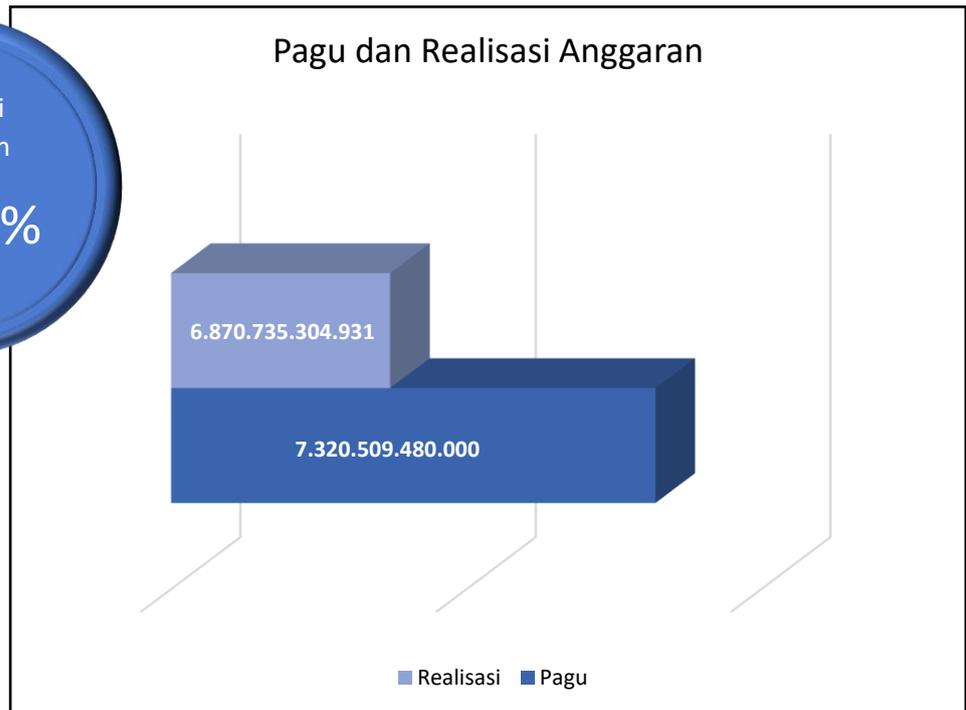
| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Gambaran Umum | 2 |
| Dasar Hukum | 2 |
| Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 3 |
| Isu Strategis | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| Visi | 8 |
| Misi | 8 |
| Tujuan Strategis | 8 |
| Rencana Kinerja Tahun 2020-2024 | 9 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 10 |
| Program Prioritas | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| Pengukuran Kinerja | 17 |
| Realisasi Anggaran | 101 |
| Cross Cutting/Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi | 103 |
| Inovasi yang Dilakukan | 104 |
| Penghargaan yang Dicapai | 107 |
| BAB IV PENUTUP | 111 |
| LAMPIRAN | 115 |

Akhtisar Eksekutif



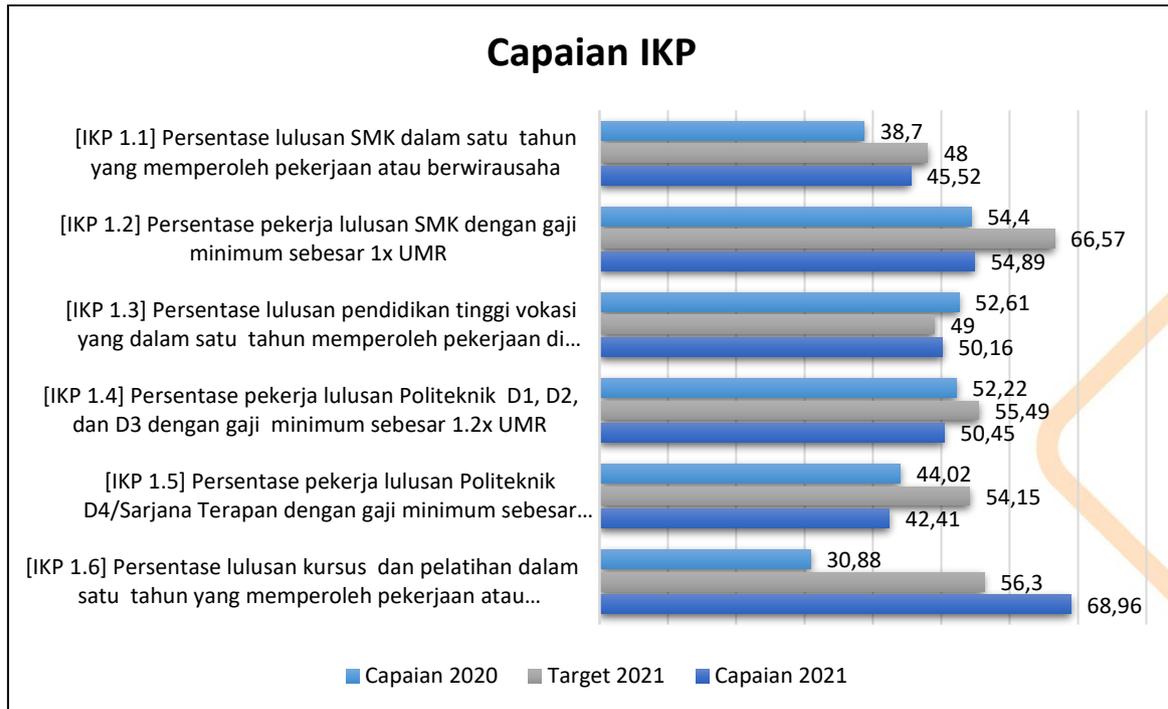
Rata-rata Capaian IKP
200,63%

Realisasi Anggaran
93,86%



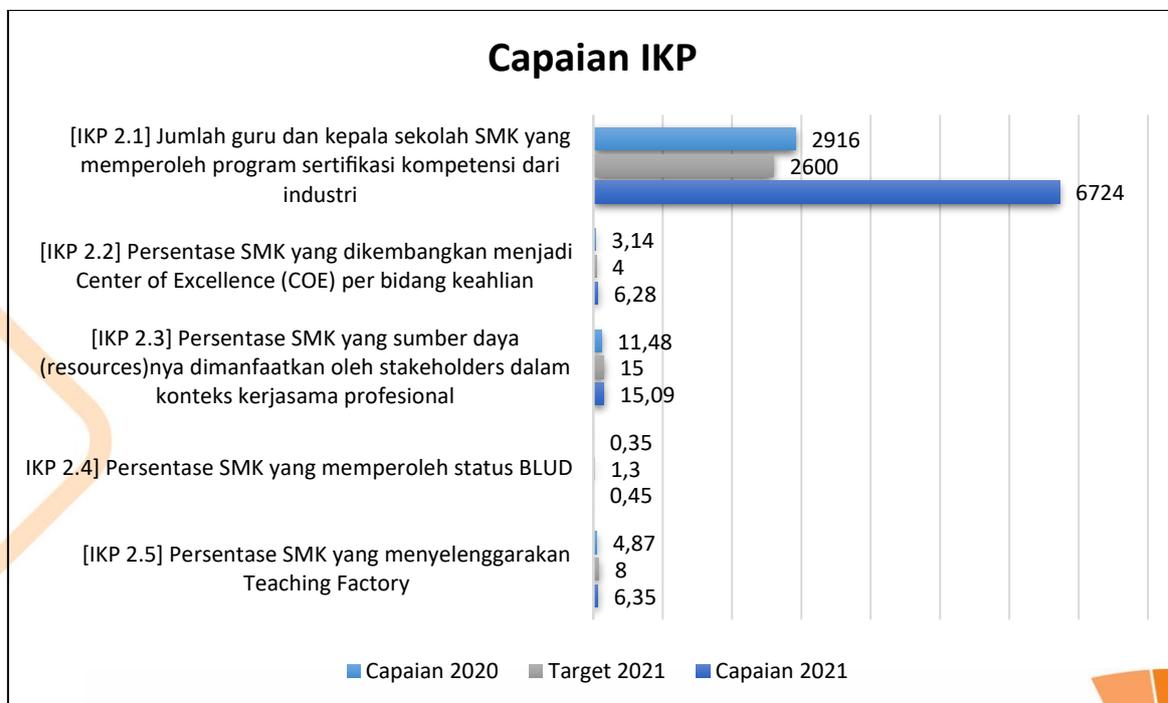
Sasaran Program 1

Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan



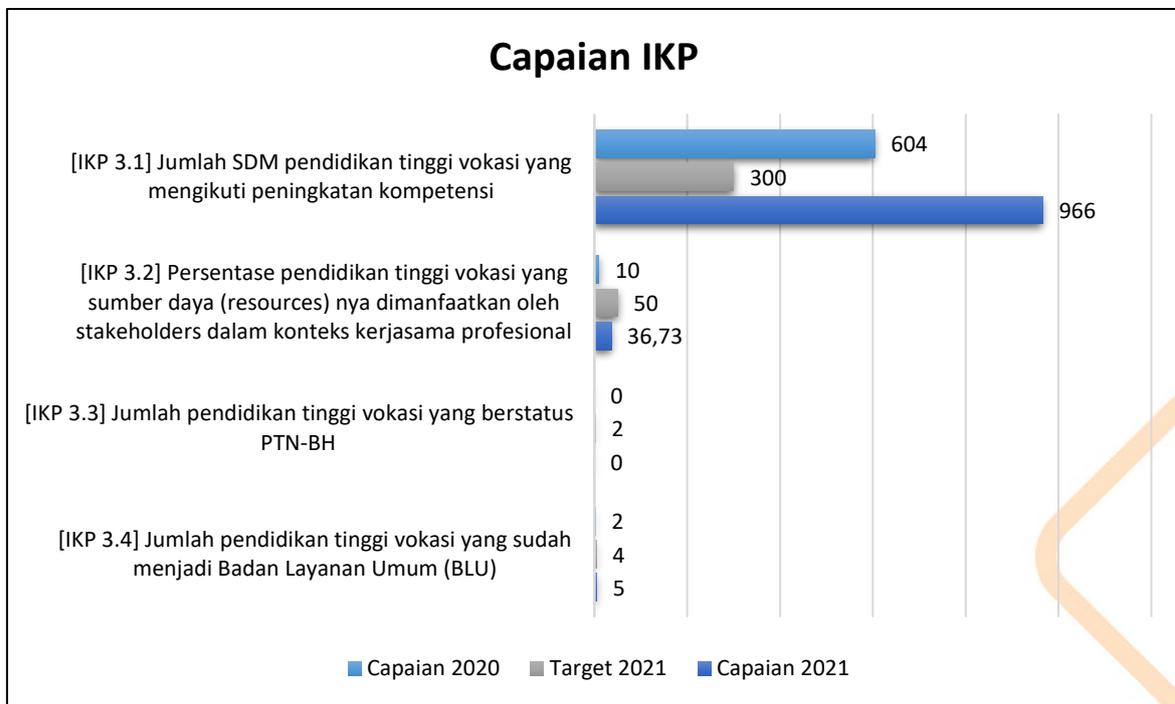
Sasaran Program 2

Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri



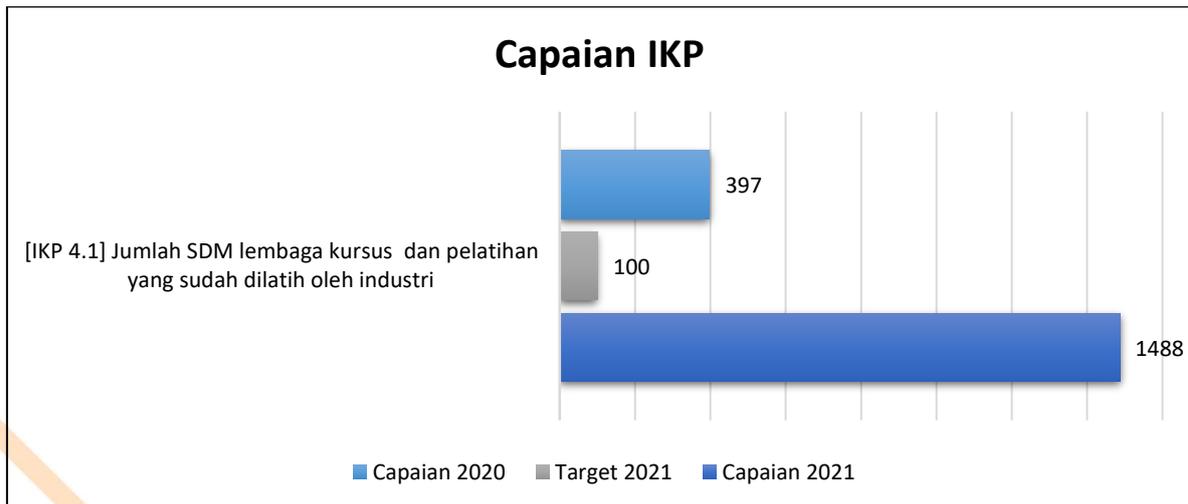
Sasaran Program 3

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri



Sasaran Program 4

Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri



Kendala dan Permasalahan Umum

1. Pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Ditjen Pendidikan Vokasi. Keterserapan lulusan vokasi di DUDI pun menjadi berkurang karena perusahaan yang terkena dampak belum melakukan perekrutan.

Selain itu, lulusan vokasi yang sudah bekerja pun ikut terkena dampak pada gaji yang diterima belum memenuhi UMR atau lebih.

2. Biaya sertifikasi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa SMK.
3. Masih ada kompetensi lulusan SMK yang belum memenuhi standar industri, sehingga pihak industri belum bisa memberikan gaji sebesar 1x UMR.
4. Kebijakan PPKM pada pandemi covid 19 mengakibatkan proses pembelajaran maupun pelatihan menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran dan pelatihan yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. Kemudian, beberapa industri mitra bagi SMK yang telah menyelenggarakan pembelajaran *teaching factory* di sekolah juga mengalami penurunan produksi yang juga berdampak pada ketercapaian pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* di sekolah.
5. Penetapan kurikulum paradigma baru SMK memakan waktu yang lama.
6. Pada program upskilling dan reskilling untuk guru SMK, ada beberapa SMK PK belum melakukan pengajuan SDM yang akan dilatih, karena ada kendala teknis, seperti adanya pergantian wakil kepala sekolah bidang kurikulum sehingga data dapodik belum diperbarui.
7. Pandemi covid 19 menyebabkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga strategi dan penerapan program tidak dapat terdiseminasi dengan baik ke sekolah. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi dalam program ini juga terkendala dikarenakan banyaknya tim SDM pendamping terpapar covid-19 yang menyebabkan rencana target kegiatan menjadi mundur.
8. Beberapa sekolah yang terpilih tidak mempunyai kondisi capaian standar yang sama sehingga perlu perlakuan berbeda untuk masing-masing SMK. Hal ini menyebabkan perlakuan yang harus diberikan kepada SMK menjadi berbeda-beda, sementara waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan programnya cukup terbatas. Keterbatasan SDM dalam memberikan fasilitasi dan evaluasi kepada SMK pelaksana program menjadikan kemungkinan kegiatan agak terlambat, sehingga diperlukan antisipasi, agar program berjalan sesuai rencana.
9. Beberapa praktisi yang dilibatkan dalam pembelajaran di sekolah, sebagian besar baru diikutsertakan dalam penyusunan dokumen kurikulum dan penyusunan bahan pembelajaran. Dimana harapannya praktisi/guru tamu dari dunia industri tersebut dapat terlibat langsung dan terjun ke kelas pembelajaran sehingga

peserta didik benar-benar mendapatkan materi pembelajaran baik teori maupun praktik dengan penggambaran yang sesuai dengan kondisi di industri. Hal ini disebabkan jam kerja praktisi/guru tamu industri yang memang padat sehingga belum dapat dioptimalkan.

10. SMK dengan status BLUD membutuhkan regulasi serta payung hukum yang lebih memadai sehingga dalam penyusunan pedomannya diperlukan ketelitian dan reviu yang lebih seksama. Proses koordinasi dan penyusunan pedoman serta dokumen lainnya mengalami kendala dikarenakan keterbatasan dalam pembahasannya.
11. Status BLUD bagi SMK merupakan wewenang penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga Ditjen Pendidikan Vokasi hanya mampu memberikan upaya dengan memfasilitasi berupa pendampingan bagi SMK agar menjadi BLUD. Disamping itu, Pemerintah Daerah menyampaikan belum adanya regulasi yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah belum berani untuk menetapkan SMK yang telah difasilitasi Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat SMK untuk mendapatkan status BLUD.
12. Peralatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan pembelajaran *teaching factory* belum memadai.
13. Banyaknya SMK yang mendaftar untuk mendapatkan program *teaching factory*, tetapi dengan alokasi anggaran yang minim mengakibatkan target sasaran sedikit, sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam proses seleksi terkait kelengkapan persyaratan untuk proses verifikasi dan validasi.
14. Proses pendaftaran pada program SDM PT Vokasi yang mendapatkan peningkatan kompetensi diperpanjang karena penyusunan pedoman kegiatan memakan waktu lebih lama, karena tidak bisa menghadirkan tim ahli/narasumber. Selain itu, pencairan bantuan mengalami keterlambatan karena persyaratan dokumen peserta belum lengkap.
15. Proses sosialisasi program melalui daring dirasa kurang optimal karena informasi yang didapat tidak tersampaikan secara maksimal.
16. Dalam proses PTN yang menjadi BLU, masih belum ditetapkannya dewan pengawas dan masih dalam progress pengusulan dan penetapan, sehingga menjadi kendala dalam pengajuan usulan RBA. Satker memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan revisi RBA setelah penelaahan. Di samping itu, perlu

adanya waktu untuk melakukan proses lembar pengesahan RBA yang ditandatangani oleh Menteri yang dalam hal ini didelegasikan oleh Sekjen.

17. Pengajuan usulan dokumen administratif BLU (rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, tata kelola dan laporan keuangan pokok) diajukan di akhir tahun anggaran 2021, sehingga satuan kerja belum dapat ditetapkan menjadi BLU oleh Dit. PPK BLU, Kemenkeu.
18. Pada masa pandemi covid 19, LKP yang akan dilatih instruktur/pengelolanya sesuai kriteria yang ditetapkan tidak bisa dilakukan verifikasi secara langsung. Selain itu, terjadi kesulitan juga dalam mencari industri yang mau bekerjasama dan belum bisa melakukan visitasi ke IDUKA.
19. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar sempat mengalami kendala, karena koordinator penyusunan kurikulum dan bahan ajar sedang terpapar covid 19.
20. Terdapat jenis keterampilan yang harus diganti karena keterbatasan LKP dan IDUKA yang bersedia dijadikan tempat pelatihan, yang semula las busur manual diganti menjadi tata busana.
21. Belum samanya pemahaman IDUKA dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan peningkatan kompetensi.
22. Tidak semua LSK membawa data dukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan pelatihan.

Langkah-langkah Antisipasi

1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industry, serta meningkatkan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Proses pembelajaran dan pelatihan dilakukan secara *blended*, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. Terkait visitasi ke IDUKA dijadwalkan ulang ketika PPKM telah dilonggarkan.

3. Pelatihan yang diberikan untuk guru-guru SMK mesti direncanakan program dan sasaran sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan BBPPMPV/BPPMPV dan industri terkait.
4. Koordinasi intens dengan pihak terkait dalam penetapan kurikulum paradigma baru SMK.
5. Pelibatan pendamping dari perguruan tinggi diharapkan mampu membantu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi tetap dilaksanakan secara daring dan sekolah masih dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana.
6. Memberikan pendampingan pelaksanaan program dengan pelibatan pendidikan tinggi vokasi untuk membantu mengawal kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dimana PT Vokasi pendamping diarahkan untuk membantu melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan SMK, pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan tata kelola sekolah serta evaluasi pelaksanaan programnya agar sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan. Disamping itu, mendorong pelibatan dunia industri untuk membantu dalam *transfer knowledge* sebagai bentuk capaian *link and match 8+i* di sekolah.
7. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA, dan pemerintah desa dengan memfasilitasi pemerintah desa untuk melibatkan SMK dalam pelaksanaan program melalui pemanfaatan dana desa. Kemudian, sekolah dapat membantu desa dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki desa, selain itu juga diarahkan untuk membantu desa dalam rangka penanganan covid 19 yang ada di lingkungan sekolah.
8. Melakukan koordinasi dan sinergi pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan untuk SMK yang akan ditetapkan menjadi satuan pendidikan berstatus BLUD. Di samping itu, Direktorat SMK juga telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan penyusunan pedoman pendirian BLUD pada SMK bagi Pemerintah Daerah.
9. Mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka mendukung penerapan pembelajaran *teaching factory* di SMK dengan bekerjasama dengan industri khususnya dalam pengadaan peralatan pembelajaran.

10. Menambah SDM untuk melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan bagi satuan pendidikan yang mengajukan untuk menjadi calon penerima program pengembangan SMK untuk melaksanakan pembelajaran *teaching factory*.
11. Keberlanjutan model pembelajaran berbasis *teaching factory* akan kembali dilaksanakan disaat pandemi sudah usai. Tentunya perlu usaha yang lebih berat dengan kondisi usai pandemi yang menyebabkan usaha produksi yang sebelumnya telah berjalan di sekolah harus dilaksanakan kembali dengan keterbatasan sumber daya yang ada.
12. Untuk mempercepat proses penyusunan pedoman kegiatan melibatkan konsultan dan dosen dari pihak swasta.
13. Koordinasi dengan penerima bantuan terkait kelengkapan persyaratan dokumen dan menyediakan narahubung untuk informasi lebih lanjut terkait sosialisasi program bantuan.
14. Melakukan proses pemantauan dan evaluasi bagi penerima bantuan peningkatan kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi.
15. Berkoordinasi dengan dan Biro SDM dalam hal pengusulan dewan pengawas dan berkoordinasi secara intens untuk mempercepat waktu revisi RBA setelah penelaahan dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.
16. LKP diminta untuk mengirimkan *company profil* untuk melihat kesesuaian kriteria.
17. Saat ini koordinasi tetap dilakukan dengan subkoordinator penyusun kurikulum dan bahan ajar, untuk progres penyusunan.
18. Mempertimbangkan jenis keterampilan yang jumlah LKP dan IDUKA nya terbanyak, setelah melakukan diskusi, sehingga terpilih keterampilan tata busana yang sebelumnya adalah las busur manual.
19. Pelatihan penguji dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, karena peserta yang akan diundang lebih dari 100 orang.
20. Direktorat Kursus dan Pelatihan berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi/ Organisasi Profesi pembentuk LSK untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran penguji secara mandiri.
21. Disusun rencana tindak lanjut bagi LSK untuk melengkapi data dukungnya.
22. LSK menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi aplikasi uji kompetensi secara mandiri untuk pengelola TUK dan penguji uji kompetensi.

BAB I PENDAHULUAN

01



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Gambaran Umum

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Salah satu prioritas nasional pada pembangunan periode tahun 2020-2024 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan inovasi dan berupaya agar dapat menghasilkan SDM Vokasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, selaras dengan visi yaitu menciptakan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dasar Hukum

Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkewajiban menyampaikan laporan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berlandaskan asas akuntabilitas dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Fungsi:

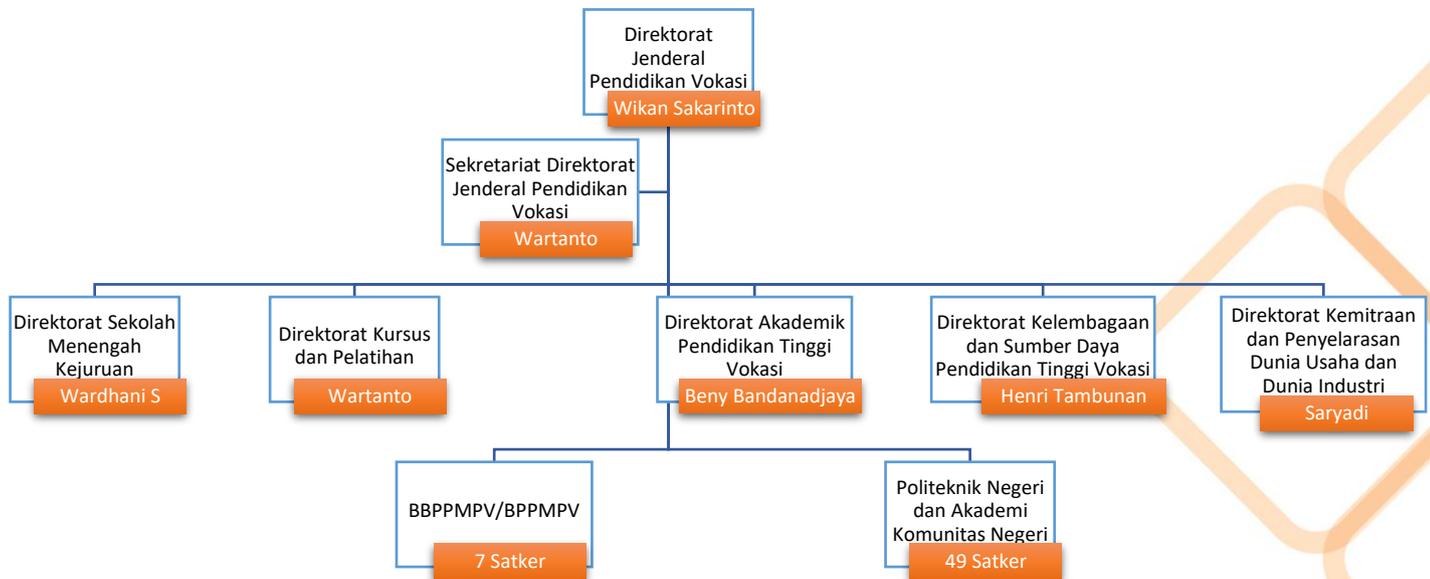
1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
3. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
4. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi;
7. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi;
9. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru dan dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi;
10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
12. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
13. perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
15. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai penjabaran Peraturan Presiden tersebut, dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tersebut, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:



Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebanyak 13.951 orang, yang terbagai atas:

| No | Unit Kerja | Jumlah |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | 114 |
| 2 | Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan | 100 |
| 3 | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi | 50 |
| 4 | Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi | 30 |
| 5 | Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | 56 |
| 6 | Direktorat Kursus dan Pelatihan | 60 |
| 7 | BBPPMPV/BPPMPV | 1.216 |
| 8 | Politeknik | 12.253 |
| 9 | AKN | 72 |
| Jumlah | | 13.951 |

Isu Strategis

1. Dengan adanya Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK, Kemendikbudristek telah mempunyai arah yang jelas untuk melakukan revitalisasi SMK;
2. Pengakuan beberapa industri termasuk BUMN dan/atau BUMD terhadap pendidikan vokasi sebagai pembeda dari universitas;
3. Meningkatnya animo masyarakat untuk belajar tentang pendidikan vokasi;
4. Ilmu terapan lebih dapat langsung bekerja di DUDI dan lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan dunia industri;
5. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan DUDI baik untuk SMK, Kursus dan Pelatihan maupun Pendidikan Tinggi Vokasi;
6. Meningkatnya jumlah status Pendidikan Tinggi Vokasi menjadi PTNBH, BLU dan juga untuk SMK menjadi BLUD;
7. Meningkatnya kompetensi dari Dosen/Guru/Instruktur untuk mendukung kebutuhan DUDI serta perkembangan Revolusi Industri 4.0;
8. Meningkatnya perbaikan kualitas sarana prasarana sesuai kebutuhan industri;
9. Meningkatnya kualitas dari lembaga kursus dan pelatihan;
10. Meningkatnya kerjasama dunia usaha dan dunia industri melalui pembentukan forum yang melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan SMK, PTV, LKP untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh DUDI;
11. Meningkatnya pengembangan produk baru atau jasa yang dilakukan melalui riset terapan dan inovasi dengan dunia usaha dan dunia industri dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

02

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global.

- Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
- Berkebhinekaan global
- Bergotong royong
- Mandiri
- Bernalar kritis
- Kreatif

Misi

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Strategis

- Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
- Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang.

Rencana Kinerja Tahun 2020-2024

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SP 1 | Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | | | | | | |
| IKP 1.1 | Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 45,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 |
| IKP 1.2 | Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 65,42 | 66,57 | 67,71 | 68,86 | 70,00 |
| IKP 1.3 | Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 47,8 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 |
| IKP 1.4 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 53,98 | 55,49 | 56,99 | 58,50 | 60 |
| IKP 1.5 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 52,2 | 54,15 | 56,10 | 58,05 | 60 |
| IKP 1.6 | Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 55,1 | 56,3 | 57,5 | 58,7 | 59,9 |
| SP 2 | Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | | | | | | |
| IKP 2.1 | Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | Orang | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 |
| IKP 2.2 | Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| IKP 2.3 | Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| IKP 2.4 | Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | % | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| IKP 2.5 | Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i> | % | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| SP 3 | Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | | | | | | |
| IKP 3.1 | Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | Orang | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program | | Satuan | Target | | | | |
|---|---|----------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKP 3.2 | Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional | % | 20 | 50 | 55 | 65 | 80 |
| IKP 3.3 | Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH | Lembaga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IKP 3.4 | Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | Lembaga | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SP 4 | Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | | | | | | |
| IKP 4.1 | Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | Orang | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| SP.5 | Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas | | | | | | |
| IKP 5.1 | Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB (status) | Predikat | BB | | | | |
| IKP 5.2 | Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (lembaga) | Lembaga | 1 | | | | |

*untuk SP.5 tidak ditargetkan lagi pada tahun 2021-2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Awal

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
|----|---|---------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | 1 | Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 48 |
| | | 2 | Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 66,57 |
| | | 3 | Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 49 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
|----|---|---------------------------|---|--------------------------------------|-------|
| | | 4 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 55,49 |
| | | 5 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 54,15 |
| | | 6 | Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 56,3 |
| 2 | Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | 1 | Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | Orang | 2600 |
| | | 2 | Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | % | 4 |
| | | 3 | Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 15 |
| | | 4 | Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | % | 1,3 |
| | | 5 | Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | % | 8 |
| 3 | Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | 1 | Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | Orang | 300 |
| | | 2 | Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 50 |
| | | 3 | Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH | Lembaga | 2 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
|----|--|---|---------|--------------------------------------|
| | | 4 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | lembaga | 4 |
| 4 | Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | 1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | Orang | 100 |

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi (Rp) |
|----|------|--|--------------------------|
| 1 | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | 2.748.085.342.000 |
| 2 | 4262 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.732.685.831.000 |
| 3 | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi | 449.386.157.000 |
| 4 | 4264 | Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | 260.719.815.000 |
| 5 | 4278 | Pembinaan Kursus dan Pelatihan | 357.345.669.000 |
| 6 | 4466 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | 328.136.183.000 |
| 7 | 4467 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | 1.335.251.491.000 |
| 8 | 4468 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi | 206.267.245.000 |
| | | TOTAL | 7.417.877.733.000 |

Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2021 disusun pada awal tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.417.877.733.000. Namun pada akhir tahun dilakukan revisi perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran menjadi sebesar Rp7.298.471.292.000 tanpa adanya perubahan pada sasaran program, indikator kinerja program, maupun target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Revisi

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
|----|---|---|--------|--------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan | 1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 48 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
|----|---|---------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| | dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | 2 | Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 66,57 |
| | | 3 | Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 49 |
| | | 4 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 55,49 |
| | | 5 | Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 54,15 |
| | | 6 | Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 56,3 |
| 2 | Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | 1 | Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | Orang | 2600 |
| | | 2 | Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | % | 4 |
| | | 3 | Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 15 |
| | | 4 | Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | % | 1,3 |
| | | 5 | Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | % | 8 |
| 3 | Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | 1 | Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | Orang | 300 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
|----|--|---|---------|--------------------------------------|
| | | 2 Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional | % | 50 |
| | | 3 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH | Lembaga | 2 |
| | | 4 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | lembaga | 4 |
| 4 | Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | 1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | Orang | 100 |

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi (Rp) |
|----|------|--|--------------------------|
| 1 | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | 2.545.838.569.000 |
| 2 | 4262 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.642.085.949.000 |
| 3 | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi | 244.333.570.000 |
| 4 | 4264 | Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri | 223.307.288.000 |
| 5 | 4278 | Pembinaan Kursus dan Pelatihan | 371.207.848.000 |
| 6 | 4466 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | 289.116.801.000 |
| 7 | 4467 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | 1.807.792.967.000 |
| 8 | 4468 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi | 174.788.300.000 |
| | | TOTAL | 7.298.471.292.000 |

Program Prioritas

| No | Program Prioritas | Satuan | Target | Realisasi | % |
|----|--|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | Siswa SMK yang Tersertifikasi | Orang | 94.150 | 94,150 | 100 |
| 2 | SMK yang Direvitalisasi | Lembaga | 895 | 901 | 100,67 |
| 3 | SMK yang Mendapatkan Pembinaan MBS | Lembaga | 2.320 | 2.320 | 100 |
| 4 | SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan | Lembaga | 220 | 220 | 100 |
| 5 | SMK yang Mendapatkan Layanan Khusus | Lembaga | 40 | 200 | 500 |
| 6 | SMK yang Mengembangkan Teaching Factory | Lembaga | 60 | 60 | 100 |
| 7 | SMK yang Mendapatkan Pembinaan untuk Memperoleh Status BLUD | Lembaga | 35 | 35 | 100 |

| No | Program Prioritas | Satuan | Target | Realisasi | % |
|----|---|-------------|--------|-----------|--------|
| 8 | SMK yang Menawarkan Program Fast Track D2 | Lembaga | 51 | 51 | 100 |
| 9 | SMK yang Dikembangkan Berbasis Bidang Revolusi Industri 4.0 dan Kawasan Prioritas Nasional | Lembaga | 31 | 31 | 100 |
| 10 | SMK yang Melaksanakan AKM | Lembaga | 250 | 250 | 100 |
| 11 | SMK yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Pada Sektor Prioritas | Paket | 525 | 530 | 100,95 |
| 12 | Unit SMK Baru yang dibangun | unit | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Kurikulum SMK yang Dikembangkan sesuai Kebutuhan IDUKA | model | 48 | 48 | 100 |
| 14 | Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi | Orang | 15.000 | 16.263 | 108 |
| 15 | PT Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri | Lembaga | 120 | 232 | 193 |
| 16 | PT Vokasi yang mendukung Kebutuhan Industri | Lembaga | 49 | 43 | 87,76 |
| 17 | SDM PT Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | Orang | 300 | 966 | 322 |
| 18 | Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi | Kesepakatan | 250 | 418 | 167,2 |
| 19 | Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan kewirausahaan di DUDI | Lembaga | 50 | 75 | 150 |
| 20 | Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pemetaan Demand dan Supply Side Dengan DUDI | layanan | 5 | 6 | 120 |
| 21 | Guru Kejuruan dan instruktur kursus yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri | Orang | 3.160 | 5.822 | 184,24 |
| 22 | Kepala SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Pengelola Kursus dan Pelatihan yang mengikuti Peningkatan Kapabilitas Manajerial Berbasis Industri | Orang | 694 | 1.196 | 172,33 |
| 23 | Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri | Lembaga | 100 | 259 | 259 |
| 24 | Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja | Orang | 50.000 | 63.689 | 127,38 |
| 25 | Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha | Orang | 21.296 | 22.437 | 105,35 |
| 26 | Peserta didik/Penguji/Pengelola Uji Kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi | Orang | 10.000 | 13.195 | 131,95 |
| 27 | Instruktur/Pengelola Kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra | Orang | 200 | 200 | 100 |
| 28 | Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi | Lembaga | 340 | 606 | 178,24 |
| 29 | Guru Vokasi yang mendapatkan Pelatihan Kurikulum | Orang | 1.955 | 2.824 | 144,45 |
| 30 | PTK Vokasi yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang kejuruan | Orang | 6.172 | 7.238 | 117,27 |
| 31 | Guru dan Dosen Vokasi yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerjasama Industri | Orang | 2.752 | 3.331 | 121,04 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

03

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Pengukuran Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melakukan pengukuran kinerja dengan capaian sebagai berikut

| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target PK 2021 | Capaian 2021 | % |
|---|--|---|----------------|--------------|---------|
| [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.1] Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 48 | 45.52 | 94,83% |
| | [IKP 1.2] Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 66.57 | 54.89 | 82,45% |
| | [IKP 1.3] Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 49 | 50.16 | 102,37% |
| | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 55.49 | 50.45 | 90,92% |
| | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 54.15 | 42.41 | 78,32% |
| | [IKP 1.6] Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 56.30 | 68.96 | 122,49% |
| | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.1] Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | orang | 2.600 | 6.724 |
| [IKP 2.2] Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | | % | 4 | 6.28 | 157% |
| [IKP 2.3] Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | | % | 15 | 15.09 | 100,60% |
| [IKP 2.4] Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | | % | 1.3 | 0.45 | 34,62% |
| [IKP 2.5] Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | | % | 8 | 6.35 | 79,38% |

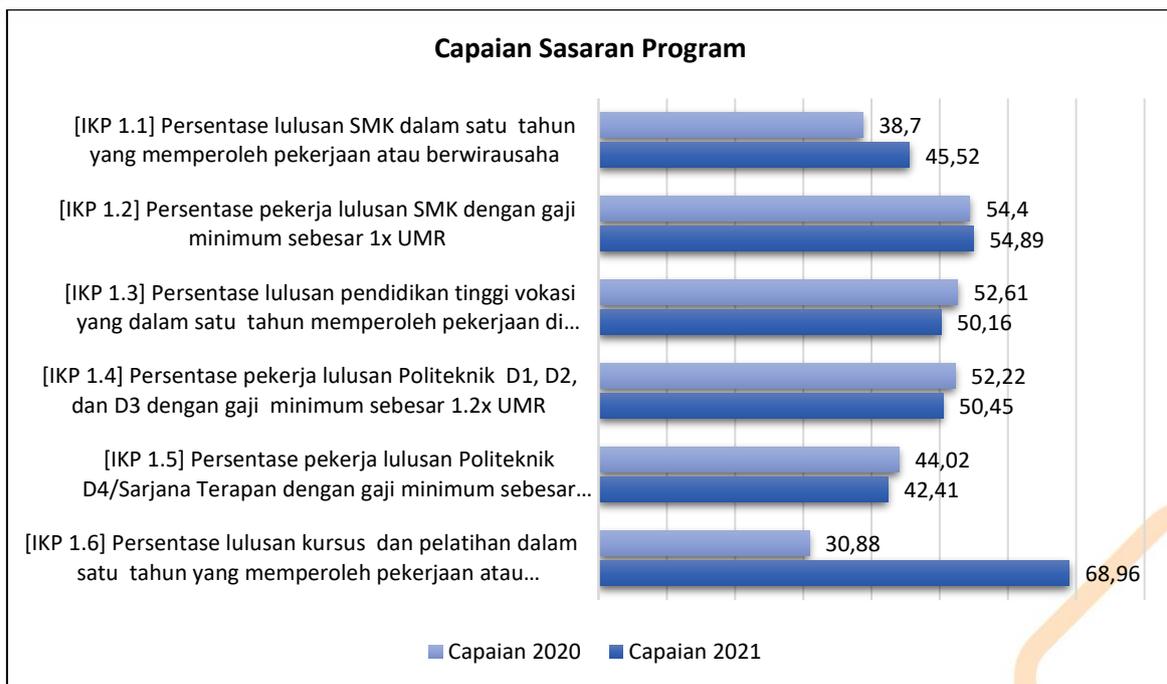
| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target PK 2021 | Capaian 2021 | % |
|--|---|---------|----------------|--------------|--------|
| [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.1] Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi | orang | 300 | 966 | 322% |
| | [IKP 3.2] Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 50 | 36,73 | 73,46% |
| | [IKP 3.3] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH | lembaga | 2 | 0 | 0% |
| | [IKP 3.4] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | lembaga | 4 | 5 | 125% |
| [SP 4] Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | [IKP 4.1] Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | orang | 100 | 1.488 | 1.488% |

Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut ketercapaian SP dan IKP tersebut selama tahun 2021.

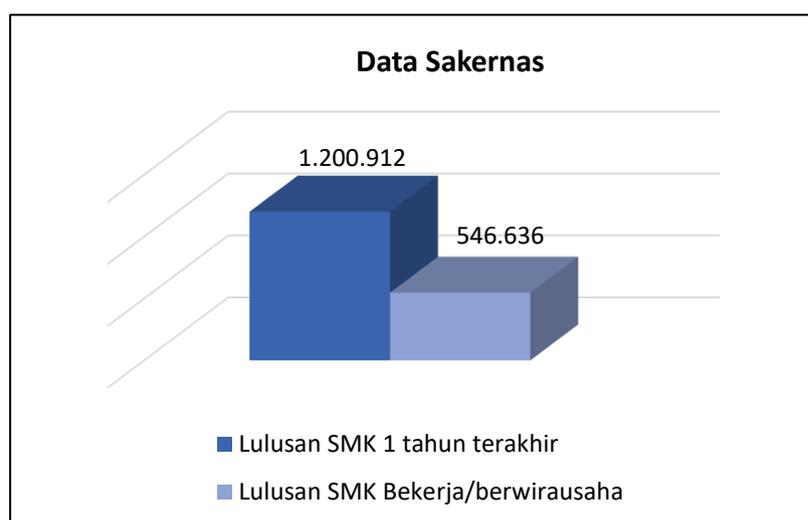
Sasaran Program 1. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

Sampai dengan tahun 2021, lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha di beberapa jenjang pendidikan vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Meskipun belum semua menunjukkan peningkatan, namun terlihat ada perbaikan pada jenjang lulusan SMK dan lulusan kursus dan pelatihan. Namun demikian, perlu upaya yang lebih signifikan lagi untuk meningkatkan keterserapan lulusan atau berwirausaha untuk jenjang pendidikan tinggi vokasi, yang capaiannya masih belum optimal dibanding dengan tahun 2020. Upaya tersebut antara lain meningkatkan penerapan *link and match* 8+i pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

IKP 1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha



Keberhasilan pendidikan SMK salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks

keberhasilan pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Kategori lulusan SMK yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Formula perhitungan untuk IKP 1.1 adalah dengan menghitung jumlah lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi jumlah lulusan SMK 1 tahun kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Lulusan SMK Bekerja dalam 1 tahun terakhir}}{\text{Jumlah Lulusan SMK dalam 1 tahun terakhir}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 38,70 | 48,00 | 45,52 | 94,83 | 60,00 | 75,87 |

Capaian IKP 1.1 pada tahun 2021 diperoleh dari perhitungan jumlah lulusan SMK satu tahun terakhir yang bekerja/berwirausaha, yaitu sebanyak 546.636 orang dibagi dengan jumlah lulusan SMK satu tahun terakhir sebanyak 1.200.912 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 45,52%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 38,70%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 6,82%. Namun capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 48,00%, atau baru mencapai persentase sebesar 94,83%, hal ini memperlihatkan masih ada kekurangan sebesar 5,17% pada tahun 2021.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 75,87%, masih ada kekurangan sebesar 24,13% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya

memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Salah satu peningkatan capaian lulusan yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha tahun 2021 adalah membaiknya kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga banyak lulusan yang direkrut oleh dunia usaha dan dunia industri serta dukungan bimbingan oleh UMKM dan platform digital.



Dokumentasi kegiatan

NAMA SMK : SMKS SINAR PARAHYANGAN
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT
COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU : SANGAT BAIK

KEGIATAN

The collage shows various activities: 'LINK AND MATCH' with a large group of people; 'PKL SISWA' (Student Work Placement) with a student at a computer; 'SELEKSI REKUITMEN' (Recruitment Selection) with a group of people; 'SMK MELIHAT BANGUN DESA' (SMK Visiting Village); 'MOU PENYELARASAN KURIKULUM GURU TAMU HARGAN RECRUITMENT' (MOU Curriculum Alignment with Guest Teacher); 'PENYELARASAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR BERBASIS INDUSTRI' (Curriculum and Industry-Based Learning Material Alignment); 'SEKOLAH PENCETAK WIRALISAH' (Entrepreneurial Printing School); and 'SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA' (Student Competency Certification).

NAMA SMK : SMK NEGERI 3 PACITAN
 KABUPATEN : PACITAN
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 COE : HOSPITALITY

RAPOR MUTU :
 SANGAT BAIK

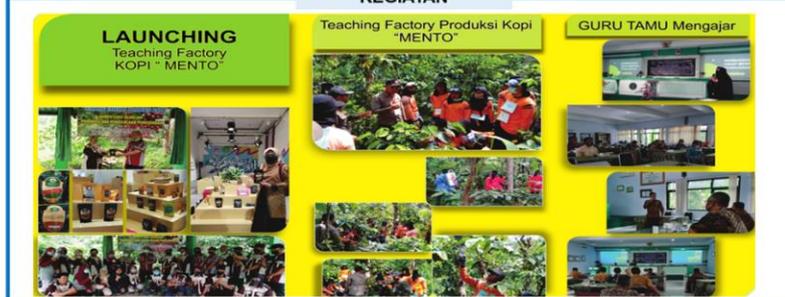
KEGIATAN



NAMA SMK : SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG
 KABUPATEN : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 COE : SEKTOR LAINNYA

RAPOR MUTU :
 SANGAT BAIK

KEGIATAN



NAMA SMK : SMK NEGERI 2 GORONTALO
 KABUPATEN : KOTA GORONTALO
 PROVINSI : GORONTALO
 COE : SEKTOR LAINNYA

RAPOR MUTU :
 SANGAT BAIK

KEGIATAN



Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) dengan target 895 SMK dan capaian 901 SMK.
2. Siswa SMK yang tersertifikasi dengan target 94.150 orang dan capaian 100%.

3. SMK yang mengembangkan Pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan dengan target 220 SMK dan capaian 100%.
4. SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas dengan target 525 paket dan capaian 530 paket.
5. Kurikulum SMK yang yang dikembangkan sesuai kebutuhan IDUKA dengan target 48 model dan capaian 100%.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi keterserapan lulusan di DUDI, karena banyak perusahaan yang terkena dampak sehingga belum melakukan perekrutan.
2. Wirausaha untuk beberapa kompetensi belum memungkinkan dibuka pada kondisi pandemi.
3. Pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* tidak bisa berjalan sesuai rencana karena terhambat kebijakan PPKM yang berdampak kepada kompetensi lulusan.
4. Belum optimalnya kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja dan dunia industri terkait *link and match* 8+i.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

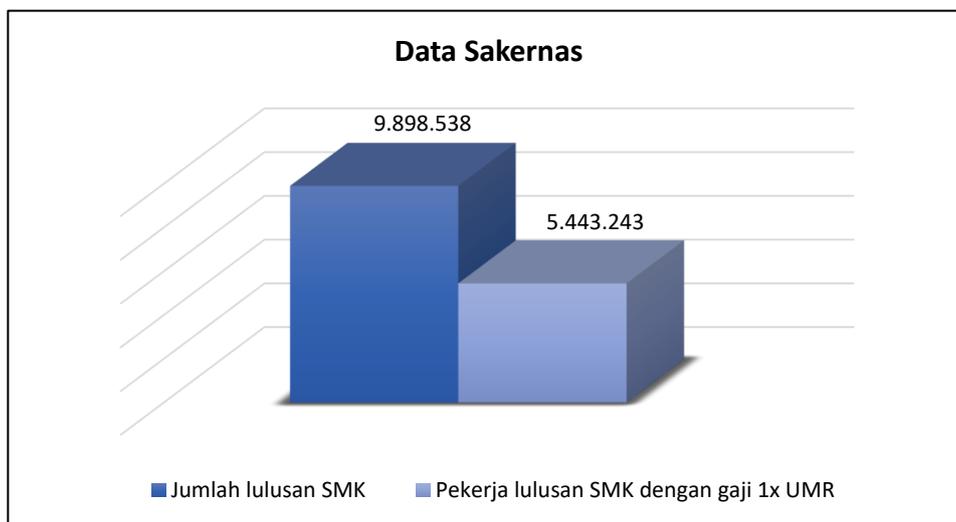
1. Mengoptimalkan kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Memaksimalkan pembelajaran *teaching factory* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
4. Mengoptimalkan kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja dan dunia industri terkait *link and match* 8+i untuk memperbanyak peluang kerja dan kemampuan wirausaha bagi lulusan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebecerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program keahlian).
4. Praktik kerja lapangan/industri minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur).
6. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory* yang berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR



Indeks tingkat kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita. Keberhasilan pendidikan SMK tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja/berwirausaha, namun juga memperhitungkan gaji dan pendapatan yang layak karena memiliki kompetensi keahlian yang diakui oleh industri. Maka, pendidikan SMK dapat dianggap mampu membantu indeks kesejahteraan, sehingga perlu dihitung persentase lulusan SMK dengan gaji minimum 1x UMR. UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR adalah lulusan yang bekerja atau berwirausaha dengan gaji atau pendapatan minimal 1x UMR berbanding dengan jumlah lulusan SMK. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Formula perhitungan untuk IKP 1.2 adalah dengan menghitung jumlah pekerja lulusan SMK dengan gaji 1x UMR dibagi jumlah lulusan SMK kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Pekerja Lulusan SMK dengan gaji 1x UMR}}{\text{Jumlah Lulusan SMK}} \times 100\%$$

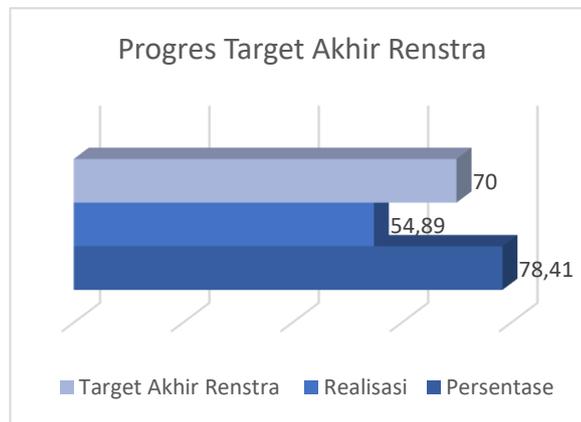
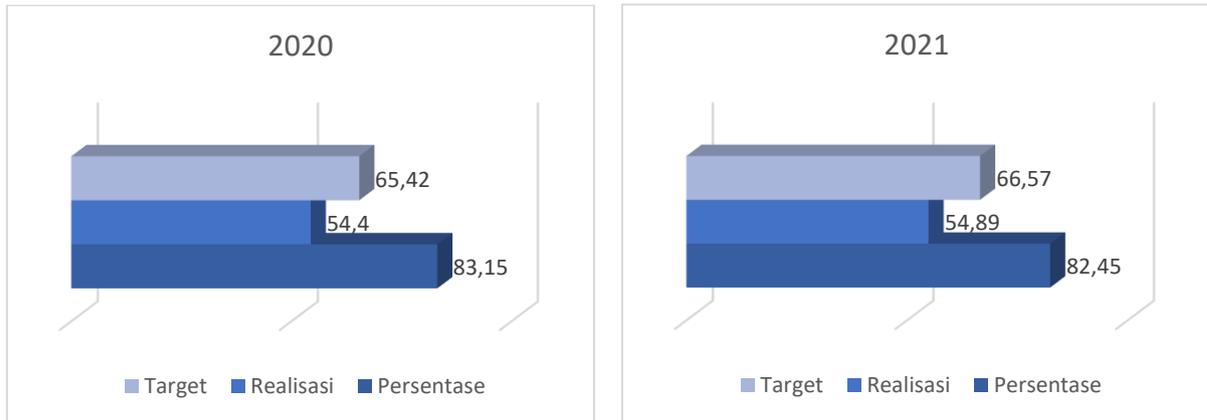
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | 54,40 | 66,57 | 54,89 | 82,45 | 70,00 | 78,41 |

Pada tahun 2021, capaian IKP 1.2 diperoleh dari perhitungan jumlah pekerja lulusan SMK dengan gaji 1x UMR, yaitu sebanyak 5.443.243 orang dibagi dengan jumlah lulusan SMK sebanyak 9.898.538 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 54,89%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 54,40%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,49%. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 66,57%, atau baru mencapai persentase 82,45%, hal ini memperlihatkan masih ada kekurangan sebesar 17,55%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 70%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 78,41%, masih ada kekurangan sebesar 21,59% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Salah satu alasan yang mendukung mengapa lulusan SMK minimal memperoleh gaji UMR karena sudah membaiknya sistem pembelajaran berbasis dunia usaha dan

industri dan diimbangi dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi.



Dokumentasi Kegiatan

NAMA SMK : SMKS TEKNIK MUHAMMADIYAH PLUS
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT
COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU : BAIK

KEGIATAN






Link & Match








Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Penyelarasan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Penerapan praktek lapangan minimal satu semester.
4. Pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Biaya sertifikasi kompetensi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa.
2. Karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK.
3. Masih ada kompetensi lulusan SMK yang belum memenuhi/tidak sesuai standar industri, sehingga pihak industri belum bisa memberikan gaji sebesar 1x UMR.

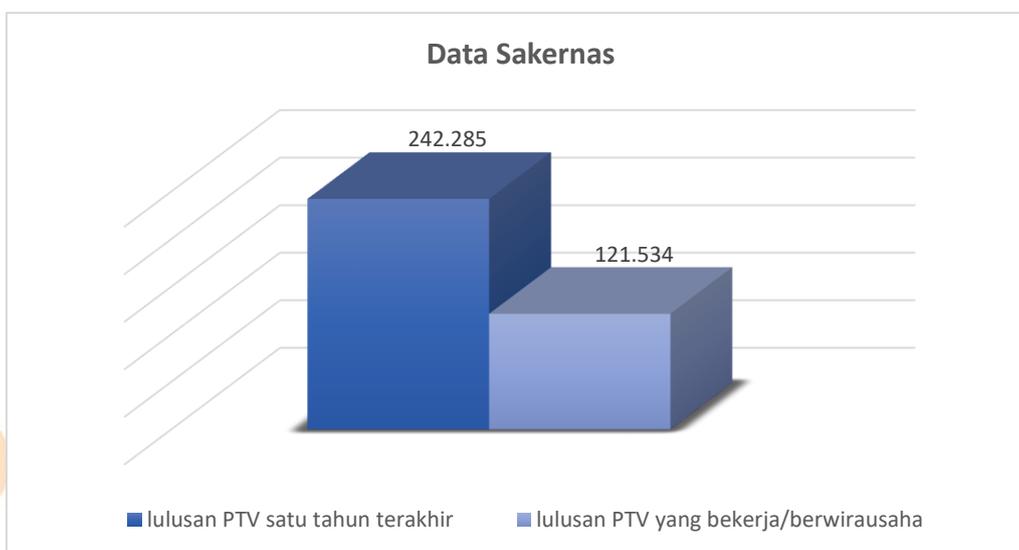
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk siswa.
2. Memaksimalkan pelatihan wirausaha bagi siswa dengan menghadirkan guru tamu sebagai bekal dalam menghadapi kesulitan lapangan pekerjaan di masa pandemi.
3. Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik agar memenuhi dan sesuai dengan standar industri sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji sebesar 1x UMR kepada lulusan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian).
4. Praktik kerja lapangan/industri minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur).
6. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory* yang berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha



Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan

indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya. IDUKA yang dimaksud adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta sebagai pendiri (*founder*) atau *co-founder*.

Formula perhitungan untuk IKP 1.3 adalah dengan menghitung lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) yang bekerja/berwirausaha dibagi jumlah lulusan PTV kemudian dikalikan 100%.

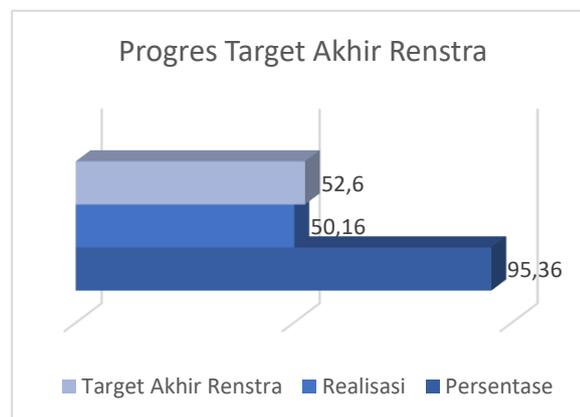
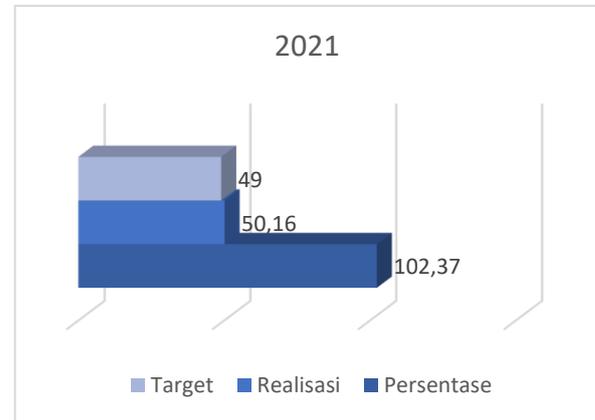
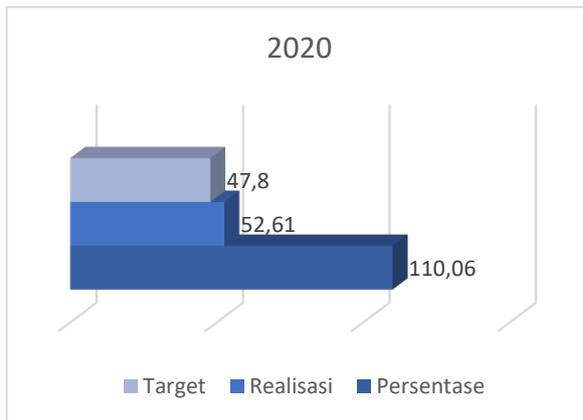
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Lulusan PTV bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah Lulusan PTV}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|--------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | 52,61 | 49,00 | 50,16 | 102,37 | 52,6 | 95,36 |

Perhitungan capaian IKP 1.3 pada tahun 2021 diperoleh dari jumlah lulusan PTV satu tahun terakhir yang bekerja/berwirausaha, yaitu sebanyak 121.534 orang dibagi dengan jumlah lulusan PTV satu tahun terakhir sebanyak 242.285 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 50,16%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 2,45% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 52,61%. Namun demikian capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 49,00%, atau sudah mencapai persentase sebesar 102,37%.

Dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 52,6%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 95,36%, masih ada kekurangan sebesar 4,64% untuk memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024 khususnya dalam implementasi kebijakan 8+i.

Dunia masih dirundung masalah pandemi covid 19 sehingga capaian 2021 masih belum menggembirakan tetapi masih mencapai target nasional. Keberhasilan tahun 2021 ini disebabkan sejak tahun 2019 semua Perguruan Tinggi Vokasi memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dengan menerapkan kebijakan 8+i, yakni kerjasama erat dalam penyusunan kurikulum, penguatan kompetensi dosen, profesional dari industri sebagai dosen, magang, *project base learning*, sertifikasi dan penyerapan lulusan.



Dokumentasi kegiatan



Program magang bagi dosen di industri

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penerapan kurikulum *link and match* pada program studi vokasi.
2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri dengan target 120 lembaga dan capaian 232 lembaga.
3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi.
4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri dengan target 49 lembaga dan capaian 43 lembaga.
5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi dengan target 15.000 orang dan capaian 16.263 orang.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Karena kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran yang membutuhkan praktek mengalami hambatan.
2. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi keterserapan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja berkurang.
3. Kemampuan lulusan dalam berwirausaha pada kondisi pandemi belum optimal.

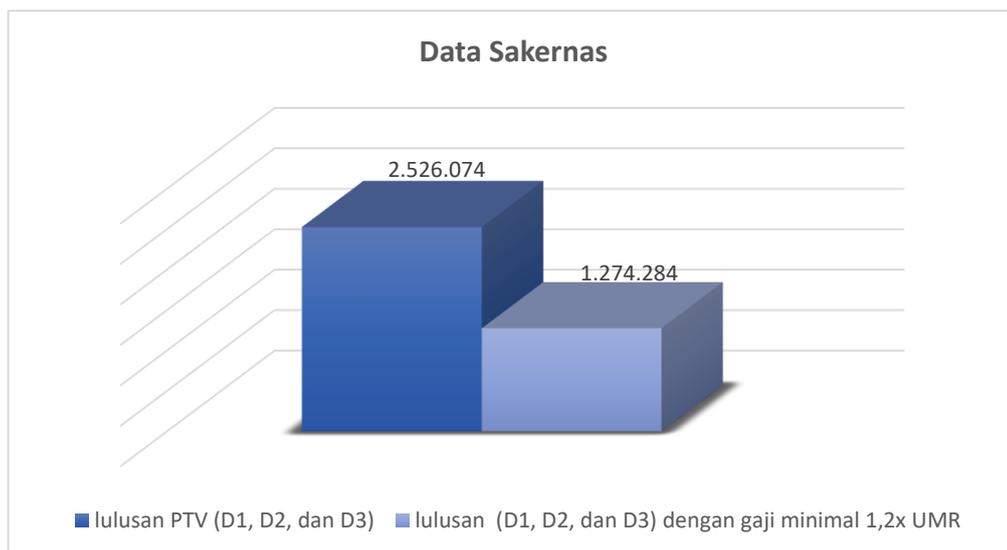
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Proses pembelajaran dilakukan secara *blended*, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah.
2. Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.
3. Memberikan bekal pelatihan wirausaha berbasis digital kepada mahasiswa PTV.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program studi).
4. Magang atau praktek kerja di dunia kerja minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan dosen/instruktur).
6. Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory/teaching industry* yang berawal dari kasus atau kebutuhan.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa/ikatan dinas ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR



Indeks tingkat kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita. Keberhasilan lulusan PTV tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja/berwirausaha, namun juga memperhitungkan gaji dan pendapatan yang layak di atas UMR karena memiliki kompetensi keahlian yang diakui oleh industri. Maka, lulusan PTV dapat dianggap mampu membantu indeks kesejahteraan, sehingga perlu dihitung persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR. UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR adalah lulusan yang bekerja atau berwirausaha dengan gaji atau pendapatan minimal 1,2x UMR berbanding dengan jumlah lulusan PTV D1, D2, dan D3. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Formula perhitungan untuk IKP 1.4 adalah dengan menghitung lulusan bekerja PTV (D1, D2, dan D3) dengan gaji minimal 1,2x UMR dibagi jumlah lulusan PTV (D1, D2, dan D3) kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Lulusan PTV (D1,D2 dan D3) dengan gaji minimal 1,2x UMR}}{\text{Jumlah Lulusan PTV (D1,D2 dan D3)}} \times 100\%$$

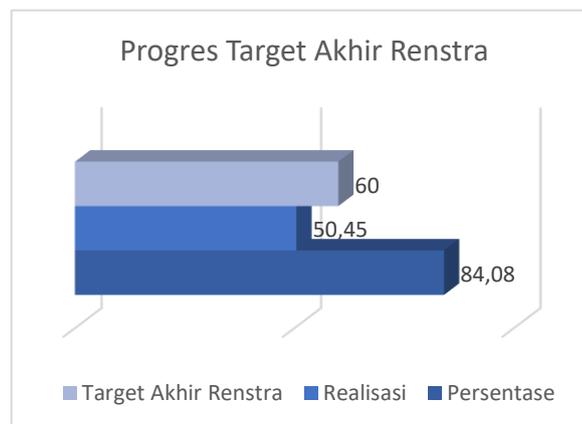
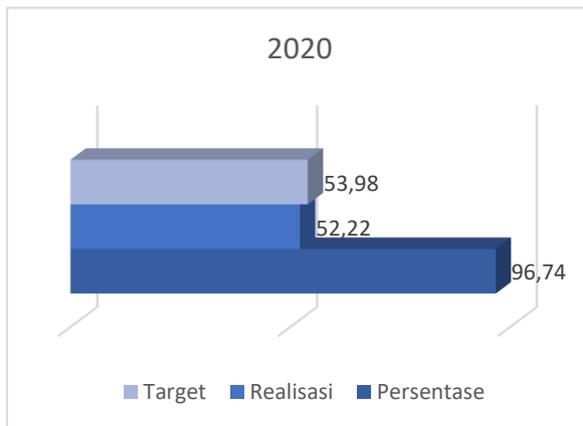
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | 52,22 | 55,49 | 50,45 | 90,92 | 60 | 84,08 |

Perhitungan persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR diperoleh dengan membandingkan jumlah lulusan PTV (D1, D2, dan D3) yang bekerja/berwirausaha dan berpenghasilan minimal 1,2x UMR yaitu sebanyak 1.274.284 orang dengan jumlah total lulusan PTV (D1, D2, dan D3) di tahun 2021, yaitu sebanyak 2.526.074 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 50,45%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,77% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 52,22%. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan target

yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 55,49%, atau baru mencapai persentase sebesar 90,92%, dengan kata lain masih ada kesenjangan sebesar 9,08% pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 84,08%, atau masih ada kekurangan sebesar 15,92% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menghasilkan lulusan D1, D2, dan D3 yang kompeten, profesional dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sangat diperlukan, sehingga dunia usaha dan dunia industri memberikan standar gaji yang melebihi UMR juga akan semakin bertambah.



Dokumentasi kegiatan



Program uji kompetensi digital marketing

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penerapan kurikulum *link and match* pada program studi vokasi.
2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri dengan target 120 lembaga dan capaian 232 lembaga.
3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi.
4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri dengan target 49 lembaga dan capaian 43 lembaga.
5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi dengan target 15.000 orang dan capaian 16.263 orang.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi keterserapan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.
2. Karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK.
3. Masih ada kompetensi lulusan PTV yang belum memenuhi/tidak sesuai standar industri, sehingga pihak industri belum bisa memberikan gaji sebesar 1,2x UMR.

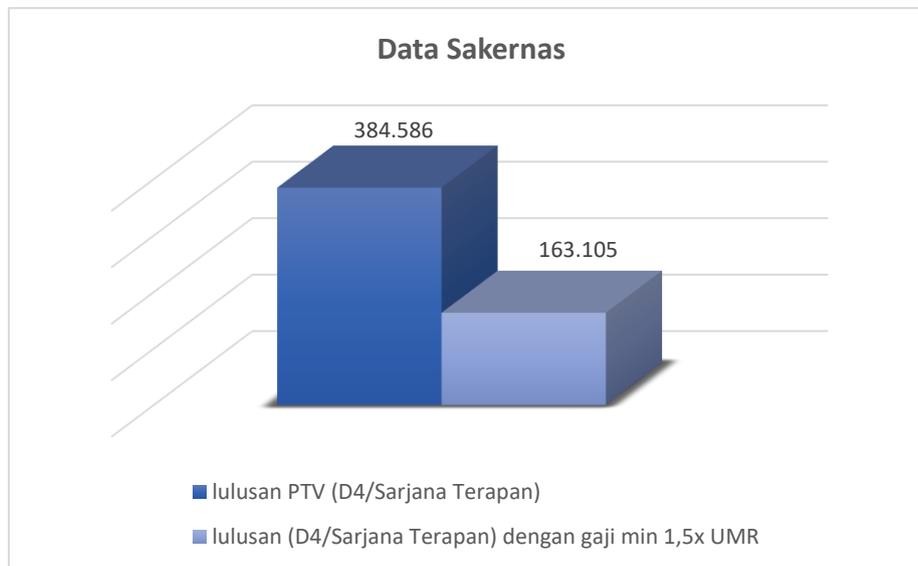
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.
2. Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan magang di perusahaan agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji di atas UMR kepada lulusan.
3. Melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa agar memenuhi dan sesuai dengan standar industri sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji sebesar 1,2x UMR kepada lulusan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebermanjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program studi).
4. Magang atau praktek kerja di dunia kerja minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan dosen/instruktur).
6. Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory/teaching industry* yang berawal dari kasus atau kebutuhan.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa/ikatan dinas ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR



Indeks tingkat kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita. Keberhasilan lulusan PTV tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja/berwirausaha, namun juga memperhitungkan gaji dan pendapatan yang layak di atas UMR karena sudah memiliki pengalaman magang di industri dan memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri. Maka, lulusan PTV dapat dianggap mampu membantu indeks kesejahteraan, sehingga perlu dihitung persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR. UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR adalah lulusan yang bekerja atau berwirausaha dengan gaji atau pendapatan minimal 1,5x UMR berbanding dengan jumlah lulusan PTV D4/Sarjana Terapan. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Formula perhitungan untuk IKP 1.5 adalah dengan menghitung lulusan bekerja PTV (D4/Sarjana Terapan) dengan gaji minimal 1,5x UMR dibagi jumlah lulusan PTV (D4/Sarjana Terapan) kemudian dikalikan 100%.

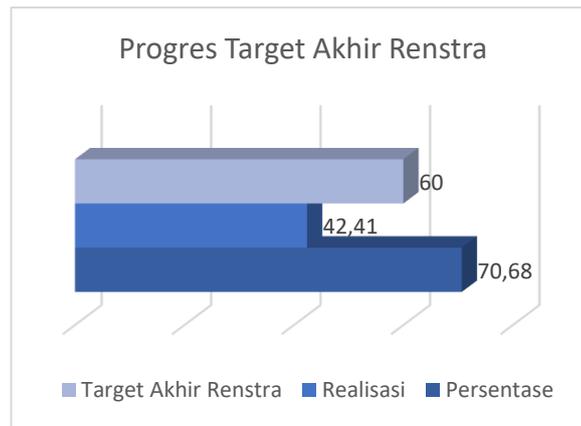
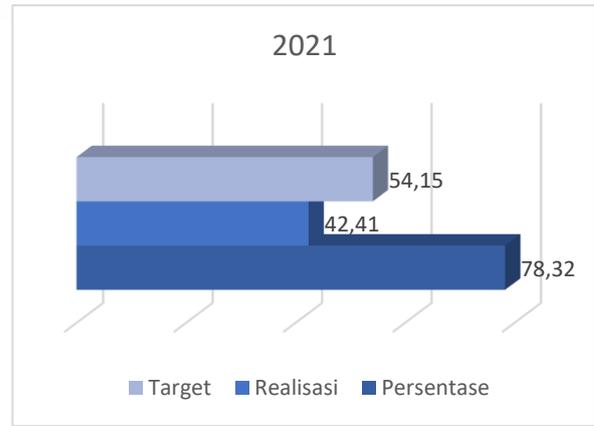
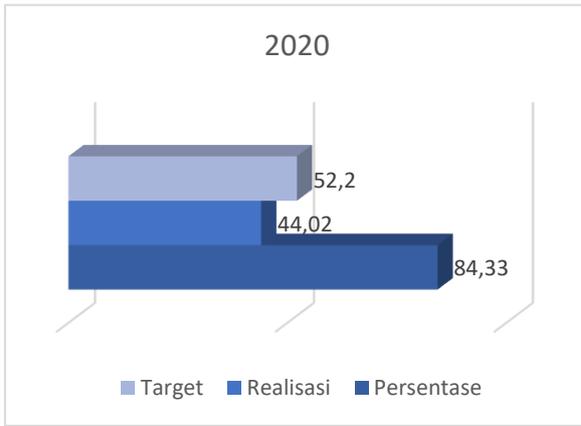
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Lulusan PTV (D4 atau Sarjana Terapan) dengan gaji minimal 1,5x UMR}}{\text{Jumlah Lulusan PTV (D4 atau Sarjana Terapan)}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | 44,02 | 54,15 | 42,41 | 78,32 | 60 | 70,68 |

Untuk memperoleh capaian persentase pekerja lulusan politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR dilakukan dengan memperhitungkan jumlah lulusan PTV (D4/Sarjana Terapan) yang bekerja/berwirausaha dan berpenghasilan minimal 1,5x UMR yaitu sebanyak 163.105 orang dibagi dengan jumlah lulusan PTV (D4/Sarjana Terapan) sebanyak 384.586 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 42,41%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 44,02%, capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,61%. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 54,15%, atau baru mencapai persentase sebesar 78,32%, hal ini memperlihatkan masih ada kekurangan sebesar 21,68% pada tahun 2021.

Dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 70,68%, masih ada kekurangan sebesar 29,32% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Kerjasama yang baik dan menghasilkan lulusan D4/Sarjana Terapan yang kompeten dan profesional sehingga banyak dunia usaha dan dunia industri memberikan standar gaji yang melebihi UMR sangat diperlukan. Penguatan implementasi program 8+i dapat menjadi strategi yang mampu menjawab tantangan di tahun mendatang.



Dokumentasi kegiatan



Program magang bagi mahasiswa di industri

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penerapan kurikulum *link and match* pada program studi vokasi.
2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri dengan target 120 lembaga dan capaian 232 lembaga.
3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi.
4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri dengan target 49 lembaga dan capaian 43 lembaga.
5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi dengan target 15.000 orang dan capaian 16.263 orang.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi keterserapan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.
2. Karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK.
3. Masih ada kompetensi lulusan PTV yang belum memenuhi/tidak sesuai standar industri, sehingga pihak industri belum bisa memberikan gaji sebesar 1,5x UMR.

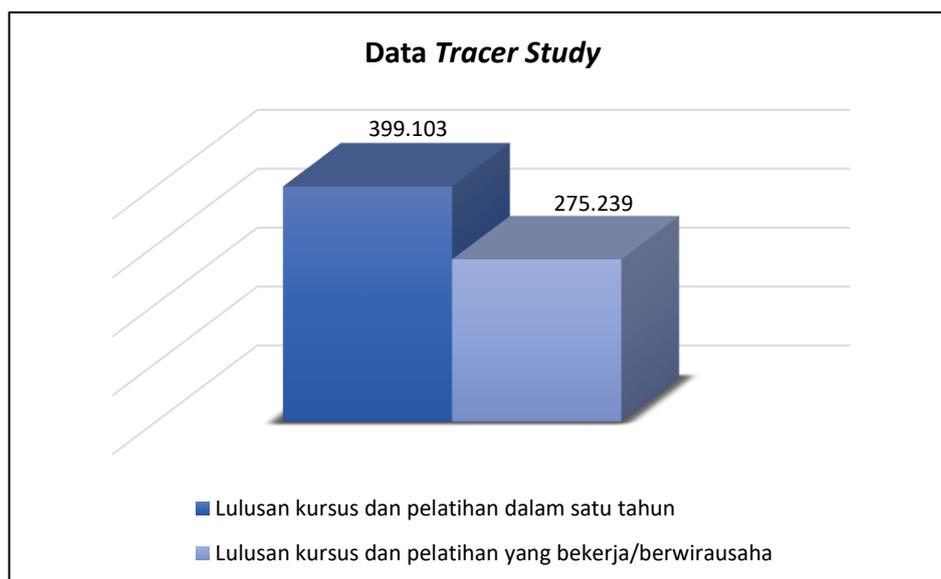
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.
2. Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan magang di perusahaan agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji di atas UMR kepada lulusan.
3. Melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa agar memenuhi dan sesuai dengan standar industri sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji sebesar 1,5x UMR kepada lulusan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program studi).
4. Magang atau praktek kerja di dunia kerja minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan dosen/instruktur).
6. Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory/teaching industry* yang berawal dari kasus atau kebutuhan.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja
9. Beasiswa/ikatan dinas ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha



Keberhasilan kursus dan pelatihan salah satunya diukur dari lulusan Program Kecakapan Kerja dan Program Kecakapan Wirausaha yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan kursus dan pelatihan dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha, maka perlu dihitung persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui hasil pelaksanaan *tracer study* yang dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2021.

Formula perhitungan untuk IKP 1.6 adalah dengan menghitung lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha dibagi jumlah lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun terakhir kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah Lulusan kursus dan pelatihan}} \times 100\%$$

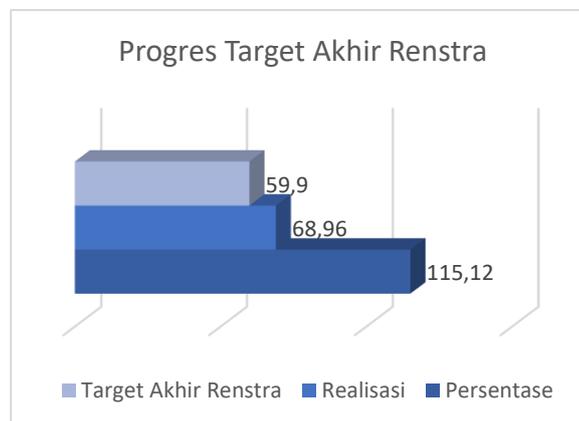
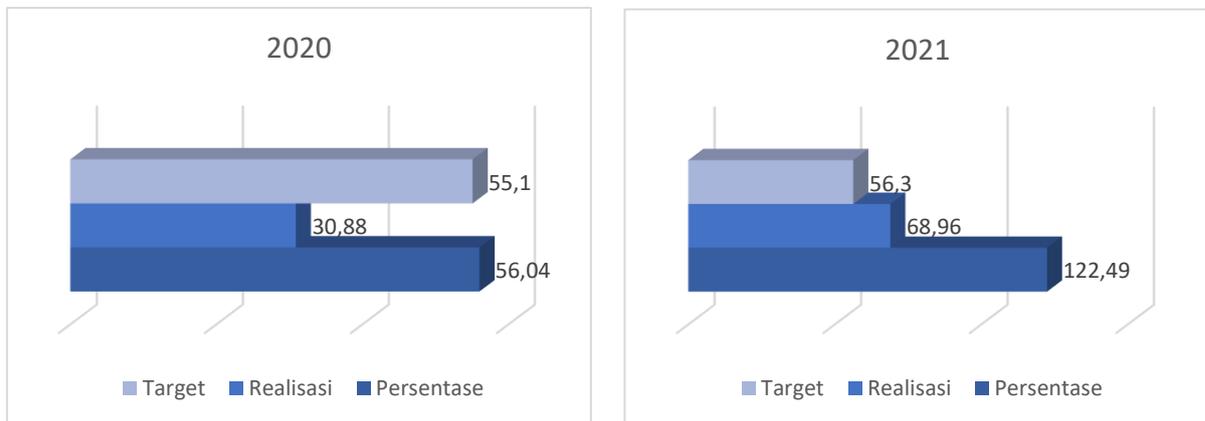
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|--------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 30,88 | 56,30 | 68,96 | 122,49 | 59,90 | 115,12 |

Untuk mendapatkan angka capaian IKP 1.6 pada tahun 2021 perlu membandingkan jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun terakhir yaitu sebanyak 275.239 dengan jumlah lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun terakhir sebanyak 399.103 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 68,96%. Capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 38,08% dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 30,88%, dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 56,30%, bahkan mencapai persentase sebesar 122,49%.

Dari target akhir renstra tahun 2024 sebesar 59,90%, capaian ini pun telah melebihi target atau mencapai persentase sebesar 115,12%. Meskipun telah melampaui

target, tentunya masih diperlukan inovasi dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

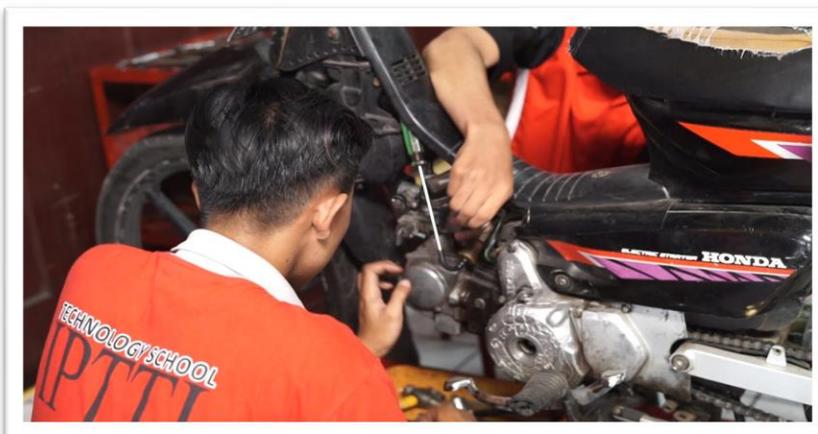
Beberapa alasan mengapa lulusan kursus dalam satu tahun banyak yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha yaitu: 1) kerjasama yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri, UMKM dan platform digital, 2) program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang dibuktikan dengan MoU dan atau surat dukungan penyelenggaraan program.



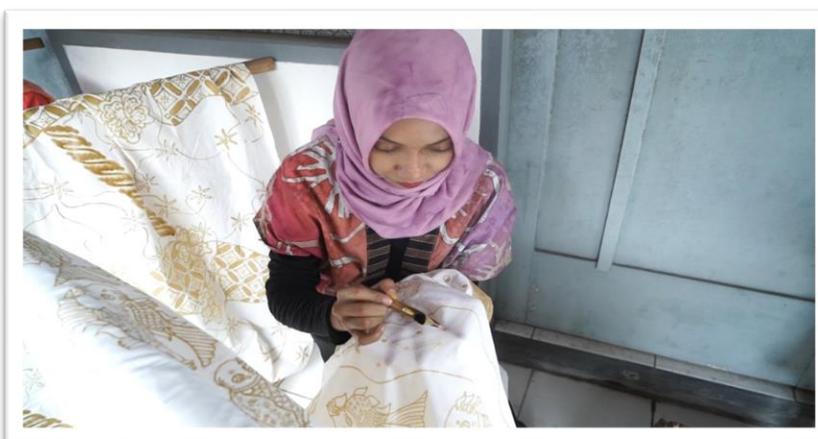
Dokumentasi Kegiatan



Program Kecakapan Kerja (PKK) Tata Kecantikan



Program Kecakapan Kerja (PKK) Teknik Kendaraan Ringan



Program Kecakapan Wirausaha (PKW) Membatik



Program Kecakapan Wirausaha (PKW) *Pastery and Bakery*

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Kecakapan Kerja (PKK) dengan target 50.000 orang dan capaian 63.689 orang. Penyaluran bantuan dilakukan sebanyak 13 tahap, yang dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember 2021.
2. Program Kecakapan Wirausaha (PKW) dengan target 16.676 orang dan capaian 22.437 orang. Penyaluran bantuan dilakukan sebanyak 13 tahap, yang dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember 2021.
3. Peserta didik/penguji/pengelola uji kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi dengan target 10.000 orang dan capaian 13.195 orang.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan berstandar industri dengan target 100 lembaga dan capaian 259 lembaga.
5. Instruktur/pengelola kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra dengan target 200 orang dan capaian 100%.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pandemi covid 19 menyebabkan banyak lembaga yang menunda pembelajaran karena status wilayah zona merah dan zona hitam.
2. Banyak perusahaan yang terdampak pandemi covid 19 sehingga belum melakukan perekrutan tenaga kerja.
3. Untuk program PKW sebelumnya sempat terkendala akses modal usaha di bank.
4. Adanya perubahan skema program PKK dan PKW yang semula pencairan dilakukan sebelum laporan awal menjadi setelah laporan awal, sehingga proses pencairan bantuan lebih lama dan berakibat tertundanya proses pembelajaran.
5. Pengembangan aplikasi program PKK dan PKW menyebabkan perubahan teknis proses verifikasi.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melaksanakan proses pembelajaran daring untuk beberapa jenis keterampilan yang memungkinkan dan untuk materi untuk materi yang bersifat teori.
2. Melakukan magang di industri untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.

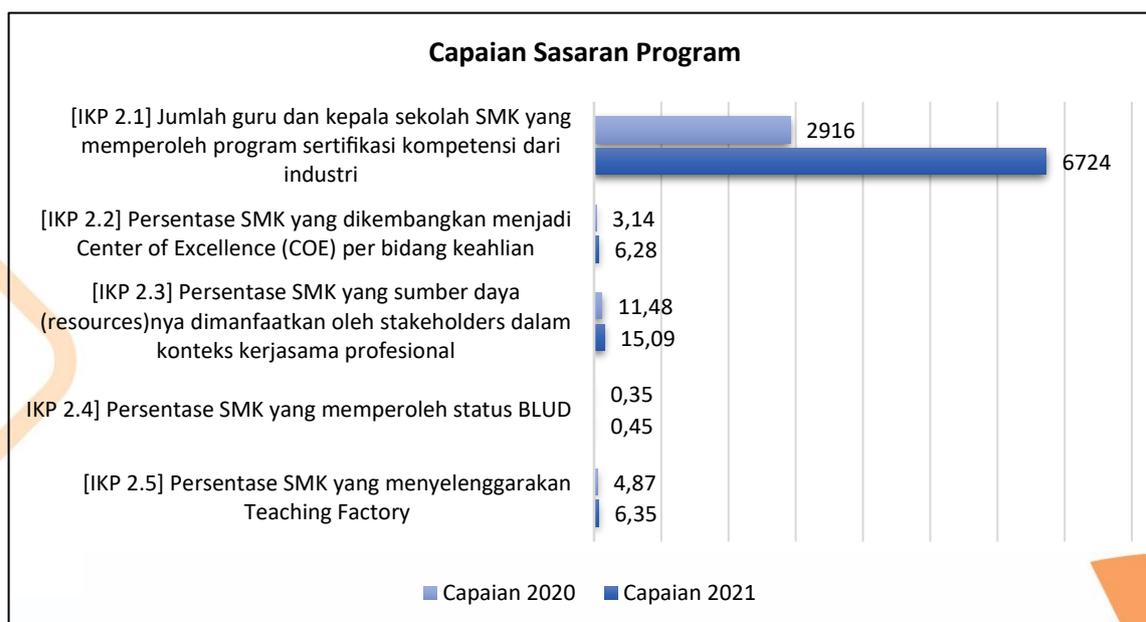
3. LKP melakukan koordinasi dengan bank atau dengan lembaga permodalan seperti koperasi untuk mengakses modal usaha.
4. Memberikan arahan kepada lembaga agar selalu memanfaatkan aplikasi banper kursus untuk memantau perkembangan proses pengajuan sehingga disaat pengajuan diterima lembaga bisa segera mengirimkan laporan awalnya.
5. Percepatan proses verifikasi melalui koordinasi yang intensif dengan tim verifikator melalui media komunikasi.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebecerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Magang atau praktek kerja di dunia kerja.
3. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan instruktur).
4. Instruktur dan pengelola secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.
5. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.

Sasaran Program 2. Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

Sampai dengan tahun 2021, pendidikan SMK yang berstandar industri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut



Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya perubahan pelaksanaan pelatihan secara *blended*, penambahan sasaran SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan dengan penyesuaian anggaran, pelibatan praktisi profesional industri dalam pelaksanaan pembelajaran, dan koordinasi dengan pihak terkait.

IKP 2.1 Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri



Guru dan kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri adalah guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang termasuk ke dalam bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* oleh industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan serta mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari IDUKA. Guru kejuruan dan kepala SMK yang menjadi target untuk dikembangkan adalah SMK yang menjadi pusat keunggulan yaitu sebanyak 1 (satu) kepala SMK dan minimal 2 (dua) guru kejuruan setiap kompetensi keahlian yang dikembangkan.

Formula perhitungan untuk IKP 2.1 adalah dengan menghitung jumlah guru kejuruan dan kepala SMK yang memperoleh sertifikat kompetensi dari industri. Satuan yang digunakan adalah orang dengan metode perhitungan kumulatif, yaitu jumlah

capaian dari tahun awal renstra 2020 sampai dengan tahun berjalan hingga berakhirnya periode renstra 2024.

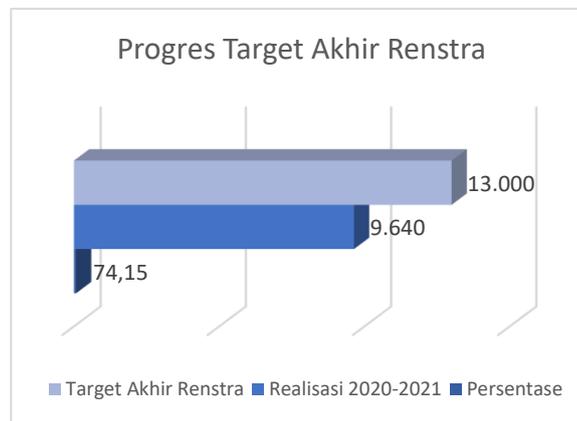
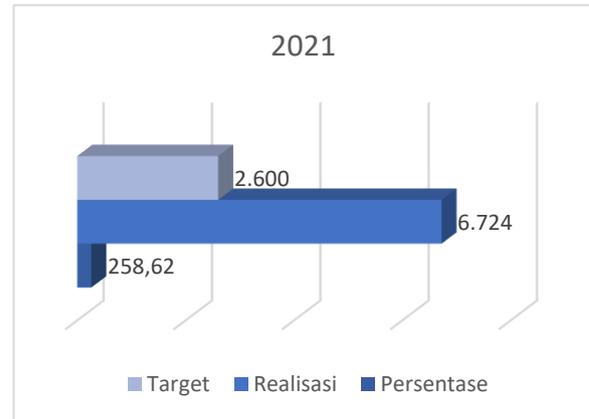
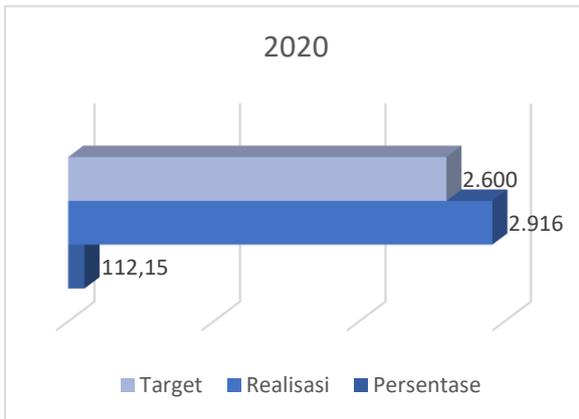
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Realisasi s.d Tahun 2021 (Akumulasi) | Target Akhir Renstra 2024 (Akumulasi) | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | | |
| Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | 2.916 | 2.600 | 6.724 | 258,62 | 9.640 | 13.000 | 74,15 |

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6.724 orang, sedangkan capaian tahun 2020 sebanyak 2.916 orang, maka capaian mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 3.808 orang. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 2.600 orang, dengan persentase sebesar 258,62%. Capaian ini disebabkan adanya perubahan pelaksanaan pelatihan yang semula akan dilakukan secara tatap muka, menjadi dilakukan secara *blended* sehingga terjadi penghematan biaya dan terjadi penambahan sasaran dengan tetap menjaga kualitas pelatihan yang dilaksanakan.

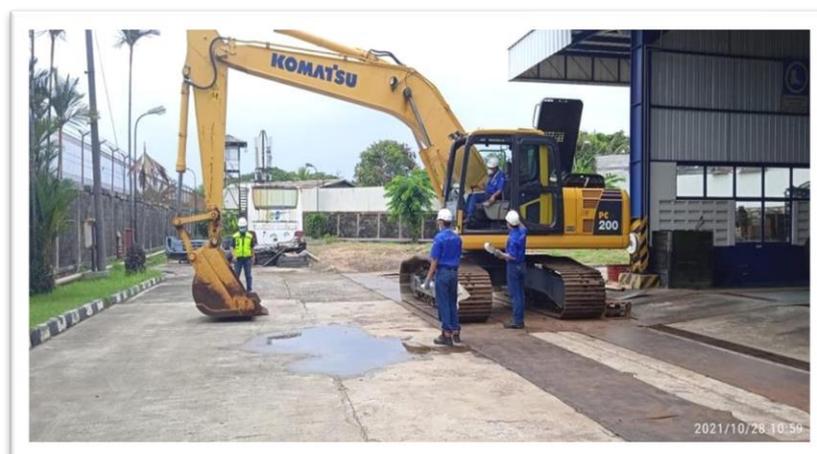
Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menyesuaikan dengan metode perhitungan yang terdapat pada renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 yaitu secara akumulatif dengan menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra sampai dengan tahun berjalan. Dengan demikian, capaian pada IKP 2.1 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 9.640 orang, dengan rincian, capaian di tahun 2020 sebanyak 2.916 orang dan capaian di tahun 2021 sebanyak 6.724 orang. Jadi jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 13.000 orang, sudah mencapai persentase sebesar 74,15%, masih ada kekurangan sebesar 25,85% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra tersebut.

Capaian yang bagus ini disebabkan oleh dukungan yang kuat antara Ditjen Pendidikan Vokasi, Dunia Usaha, Dunia Industri, UMKM dan Platform Digital dalam meningkatkan kompetensi para pendidik dengan memberikan sertifikat dari dunia usaha dan dunia industri dan/atau lembaga sertifikasi. Selain bersumber dana dari Ditjen

Pendidikan Vokasi juga didukung sumber dana dari dunia usaha dan dunia industri sehingga menambah jumlah pendidik yang memperoleh pelatihan di dunia usaha atau dunia industri.



Dokumentasi Kegiatan



Pelatihan teknik alat berat bersama United Tractors



Pelatihan Pemrograman Mesin CNC Milling dan Turning bersama PT CNC Disain Nusantara



Pelatihan tata kecantikan rambut Bersama PT L'Oreal Indonesia

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pelatihan secara daring *e-commerce hospitality* sebanyak 564 orang.
2. Pelatihan kepala SMK dilakukan se-Papua dan Papua Barat, bersama Dinas Provinsi terkait, dan industri sebagai penguatan program *link and match* sebanyak 94 orang.
3. Pelatihan *digital marketing strategy* bagi kepala sekolah sebanyak 375 orang.
4. Pelatihan *social media marketing* untuk wakil kepala sekolah dan guru sebanyak 378 orang.
5. Pendidikan dan pelatihan komite pembelajaran sebanyak 383 orang.

6. Peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di BBPPMPV/BPPPMPV sebanyak 2.031 orang (dilakukan secara *blended*).
7. Pelatihan teknik alat berat tingkat *advance* bagi guru SMK dan widyaiswara balai besar, yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan awal ditahun 2020, yang dilakukan di IDUKA (UT) sebanyak 25 orang (dilakukan semi luring).
8. Workshop *digital marketing strategy* untuk kepala dan wakil kepala sekolah serta workshop *social media marketing* untuk guru SMK yang dilakukan oleh Diandra Academy, sebanyak 1.043 orang (dilakukan luring).
9. Pelatihan instalasi perangkat *wireless* dan *microwave* Huawei gelombang 1 bagi guru SMK Multimedia, sebanyak 20 orang (secara luring).
10. Pelatihan tata kecantikan rambut untuk guru SMK yang dilaksanakan oleh Loreal Indonesia, sebanyak 17 orang (secara daring).
11. Pelatihan kapasitas manajerial bagi kepala SMK yang dilaksanakan di 5 perguruan tinggi (UI, ITB, BINUS, Prasetya Mulya, UNBRAW) dilakukan secara *blended*, sebanyak 345 orang.
12. Pelatihan bagi guru dan widyaiswara teknik alat berat bekerjasama dengan United Tractor School sebanyak 7 orang.
13. Pelatihan *Digital Marketing* dan *Social Media Marketing* untuk guru SMK sebanyak 1.617 orang.
14. Pelatihan instalasi perangkat *wireless* dan *microwave* untuk guru SMK sebanyak 100 orang.
15. Workshop Gerakan Sekolah Menyenang bagi kepala SMK sebanyak 420 orang.
16. *Training of trainer* di tempat kerja kerjasama dengan Kadin Indonesia sebanyak 39 orang.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Merujuk dari tahun sebelumnya, ada beberapa poin khususnya materi pelatihan guru SMK yang perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi covid 19.
2. Kebijakan PPKM dan pelarangan keluar kota dari pemda, mengakibatkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara tatap muka.
3. Penetapan kurikulum paradigma baru SMK memakan waktu yang lama.

4. Ada beberapa SMK PK belum melakukan pengajuan SDM yang akan dilatih, karena ada kendala teknis, seperti adanya pergantian wakil kepala sekolah bidang kurikulum sehingga data dapodik belum diperbarui.
5. Banyak peserta yang tidak mendapatkan izin dari pimpinan karena banyaknya kegiatan yang dilakukan bersamaan.
6. Adanya refokusing anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian harga.
7. Jadwal yang sangat padat sehingga menyita sumber daya yang ada.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

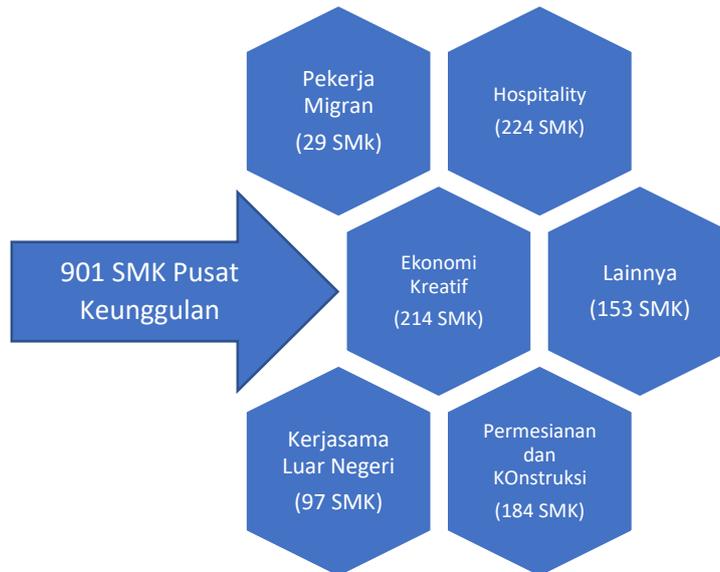
1. Mematangkan program dan sasaran bersama BBPPMPV/BPPMPV dan industri terkait.
2. Pelatihan sebagian besar dilakukan secara daring, karena kebijakan PPKM.
3. Koordinasi intens dengan pihak terkait dalam penetapan kurikulum paradigma baru SMK.
4. Pelatihan dilakukan dalam beberapa gelombang akibat adanya kendala dalam melakukan pengajuan SDM yang akan dilatih.
5. Memastikan peserta yang mengikuti dekat dengan lokasi pelatihan baik yang di BBPPMPV/BPPMPV maupun IDUKA.
6. Mencari pengganti peserta yang tidak bisa hadir karena terkendala izin melalui aplikasi SIMPKB.
7. Melakukan penyesuaian harga sesuai dengan sisa anggaran yang tersedia.
8. Melakukan penjadwalan secara paralel (padat dan efektif) sehingga seluruh rangkaian pelatihan bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan pembahasan mengenai PKS (perjanjian kerja sama) dengan universitas selaku mitra strategis dalam melaksanakan program.
2. Melakukan kerjasama dengan GSM (gerakan sekolah menyenangkan) untuk menyelenggarakan pelatihan yang salah satunya dilaksanakan di Provinsi Papua Barat dan Papua.
3. Magang di dunia kerja untuk guru kejuruan.
4. Sertifikasi kompetensi bagi guru yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja.

5. Kepala SMK dan guru secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.

IKP 2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi *Center of Excellence* (COE) per bidang keahlian



Revitalisasi SMK yang dicanangkan tahun 2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Salah satu strategi untuk memenuhi amanat inpres tersebut adalah melalui pengembangan SMK Pusat Keunggulan/*Center of Excellence* (COE).

SMK Pusat Keunggulan/*Center of Excellence* (CoE) merupakan salah satu program Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan SMK di suatu daerah supaya dapat menjadi pusat rujukan *upgrading* maupun *upskilling* bagi SMK di sekitarnya sesuai dengan rumpun program keahlian yang dikembangkan. Pengembangan dilakukan melalui intervensi kepada SMK tersebut baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Persyaratan pemilihan SMK yang akan disiapkan menjadi pusat keunggulan sesuai Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku terkait Juknis Bantuan Fasilitasi SMK yang dikembangkan Menjadi pusat keunggulan. Pada tahun 2024 ditargetkan SMK yang menjadi pusat keunggulan sebanyak 10% dari jumlah populasi SMK.

Formula perhitungan untuk IKP 2.2 adalah dengan menghitung jumlah SMK Pusat Keunggulan/CoE dibagi dengan jumlah populasi SMK yang ada di Indonesia kemudian dikalikan 100%.

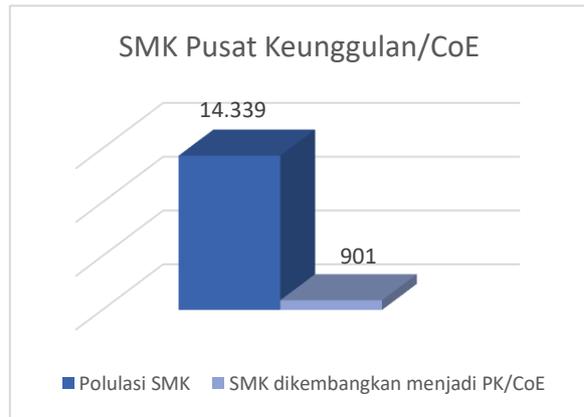
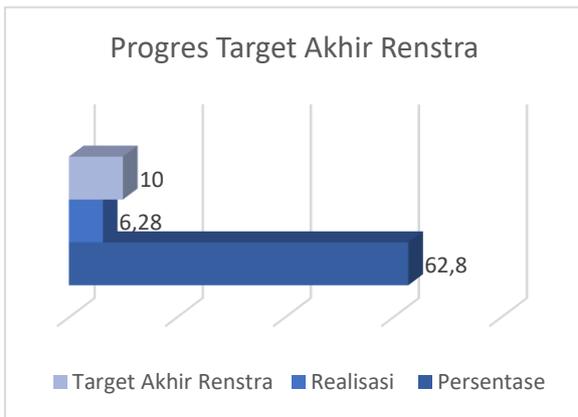
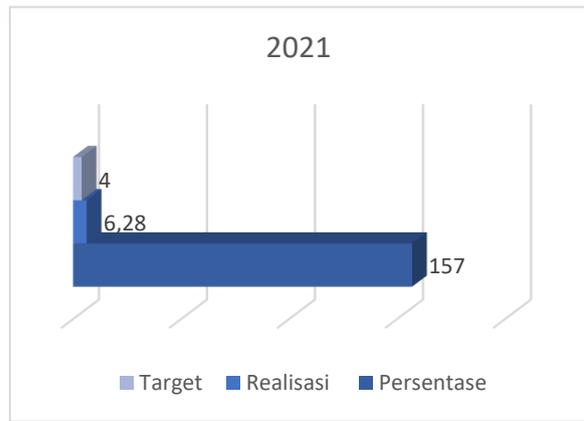
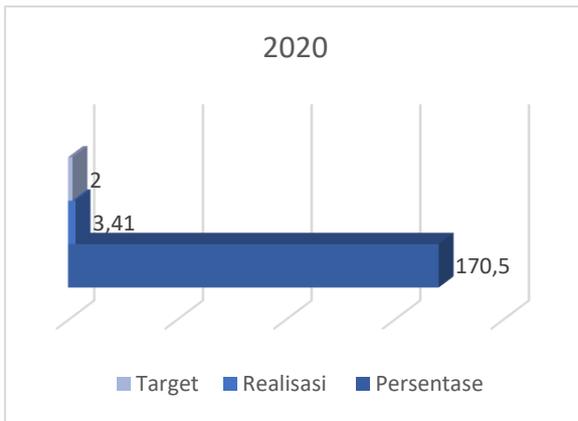
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK Pusat Keunggulan/CoE}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|-----|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian | 3,41 | 4,00 | 6,28 | 157 | 10,00 | 62,80 |

Capaian IKP 2.2 pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sebesar 4%, atau sudah mencapai persentase sebesar 157%. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SMK Pusat Keunggulan/CoE yaitu sebanyak 901 sekolah dibagi dengan jumlah populasi SMK sebanyak 14.339 sekolah, sehingga mendapatkan capaian sebesar 6,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 3,41%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,87%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 10%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 6,28%, masih ada kekurangan sebesar 3,72% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Program SMK PK ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas SMK dan sekaligus dapat memberi contoh ataupun pengimbasan praktek baik bagi SMK lain. Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan dari pemerintah provinsi yang diwujudkan dalam bentuk MoU antara Ditjen Pendidikan Vokasi dengan Pemerintah Provinsi. Beberapa dukungan yang tertuang dalam MoU diantaranya, dukungan anggaran APBD dalam pengembangan SMK, dukungan dalam pengembangan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dukungan pembinaan dan pengawasan dan dukungan penguatan *teaching factory* di SMK.



Dokumentasi Kegiatan

NAMA SMK : SMK KARYA NASIONAL KUNINGAN
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU :
SANGAT BAIK

KEGIATAN

TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF

TEKNIK DAN BISNIS SEPEDEA MOTOR

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

TEKNIK AUDIO VIDEO

AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA

TEKNIK PEMESINAN

TEKNIK PENGELASAN

TEKNIK BODI OTOMOTIF

NAMA SMK : SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN
KABUPATEN : SLEMAN
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA
COE : HOSPITALITY

RAPOR MUTU : BAIK

SEBELUM



SESUDAH



NAMA SMK : SMK NEGERI 1 KLEGO
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH
COE : KONSTRUKSI DAN PEMESINAN

RAPOR MUTU :
SANGAT BAIK

SEBELUM



SESUDAH



NAMA SMK : SMK NEGERI 5 Negara
KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI
COE : HOSPITALITY

RAPOR MUTU : BAIK

SEBELUM



SESUDAH





Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi, seleksi, serta bimbingan terkait program SMK Pusat Keunggulan.
2. Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal terkait penetapan SMK Pusat Keunggulan dengan rincian: Kepdirjen nomor 22/D/O/2021 tanggal 20 April 2021 ditetapkan sebanyak 611 SMK, Kepdirjen nomor 37/D/DM/2021 tanggal 28 Juni 2021 ditetapkan sebanyak 269 SMK, dan Kepdirjen nomor 36/D/DM/2021 tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan sebanyak 21 SMK.
3. Program bantuan pengembangan manajemen berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepada 471 SMK yang sudah dikembangkan menjadi pusat keunggulan pada tahun 2020.
4. Program bantuan peningkatan sarana prasarana kepada 430 SMK yang merupakan sekolah baru dikembangkan menjadi pusat keunggulan pada tahun 2021.
5. Pelaksanaan pendampingan melalui pelibatan PT Vokasi dan BBPPMPV/BPPMPV kepada semua SMK yang telah dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga strategi dan penerapan program tidak dapat terdiseminasi dengan baik ke sekolah.

2. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi dalam program ini juga terkendala dikarenakan banyaknya tim SDM pendamping terpapar covid-19 yang menyebabkan rencana target kegiatan menjadi mundur.
3. Beberapa sekolah yang terpilih tidak mempunyai kondisi capaian standar yang sama sehingga perlu perlakuan berbeda untuk masing-masing SMK. Hal ini menyebabkan perlakuan yang harus diberikan kepada SMK menjadi berbeda-beda, sementara waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan programnya cukup terbatas.
4. Keterbatasan SDM dalam memberikan fasilitasi dan evaluasi kepada SMK pelaksana program menjadikan kemungkinan kegiatan agak terlambat, sehingga diperlukan antisipasi, agar program berjalan sesuai rencana.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

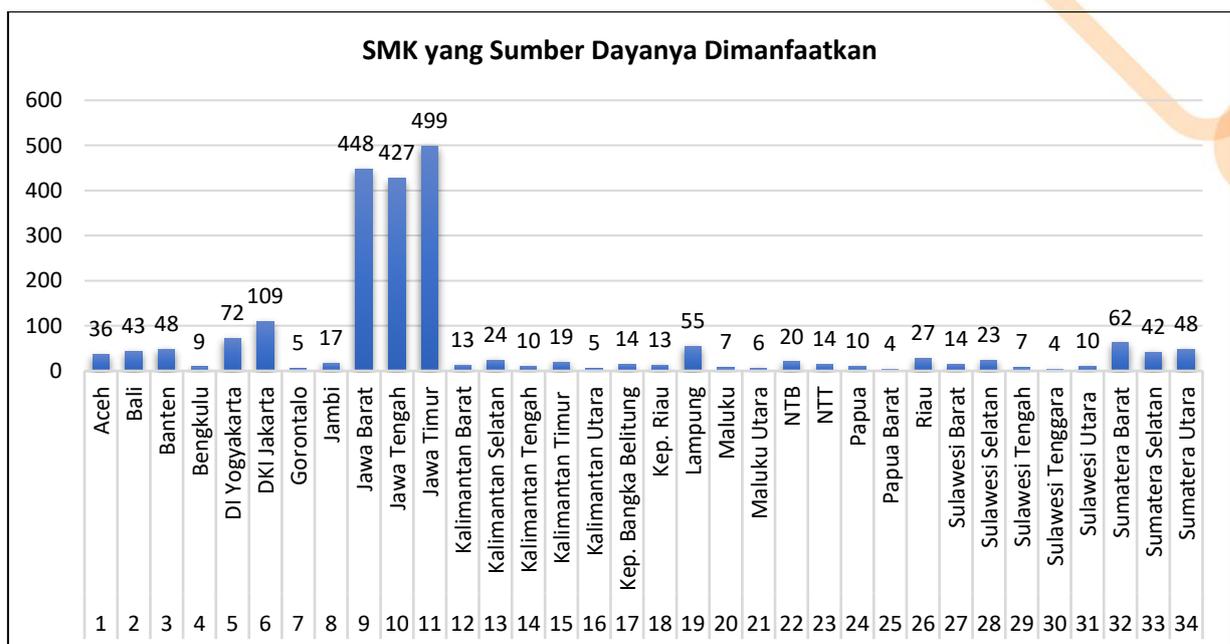
1. Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi tetap dilaksanakan secara daring dan sekolah masih dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana.
2. Pelibatan pendamping dari perguruan tinggi diharapkan mampu membantu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan.
3. Memberikan pendampingan pelaksanaan program dengan pelibatan pendidikan tinggi vokasi untuk membantu mengawal kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dimana PT Vokasi pendamping diarahkan untuk membantu melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan SMK, pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan tata kelola sekolah serta evaluasi pelaksanaan programnya agar sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan.
4. Mendorong pelibatan dunia industri untuk membantu dalam *transfer knowledge* sebagai bentuk capaian *link and match 8+i* di sekolah.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.

3. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program keahlian).
4. Praktik kerja lapangan/industri minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur).
6. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory* yang berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 2.3 Persentase SMK yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional



Sumber daya yang ada di SMK adalah potensi yang dimiliki SMK untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh IDUKA sehingga mampu menghasilkan sumber pembiayaan/pendanaan. Sumber daya meliputi SDM maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMK. Pendapatan dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sehingga perlu adanya SMK yang ditargetkan memiliki pendapatan dari jasa atau produk (misal melalui *teaching factory*, unit produksi, dan sebagainya) sesuai

dengan bidang keahliannya. Realisasi produk/jasa yang dihasilkan oleh SMK diharapkan dapat diterima oleh masyarakat serta ada komitmen dari *stakeholders* (Dinas terkait di daerah, industri, dan masyarakat) untuk bekerjasama dengan SMK dalam proses realisasi produk/jasa tersebut.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari *teaching factory* atau unit produksi di SMK.

Formula perhitungan untuk IKP 2.3 adalah dengan menghitung jumlah SMK yang menghasilkan produk/jasa dibagi dengan jumlah populasi SMK yang ada di Indonesia kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK dengan produk/jasa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

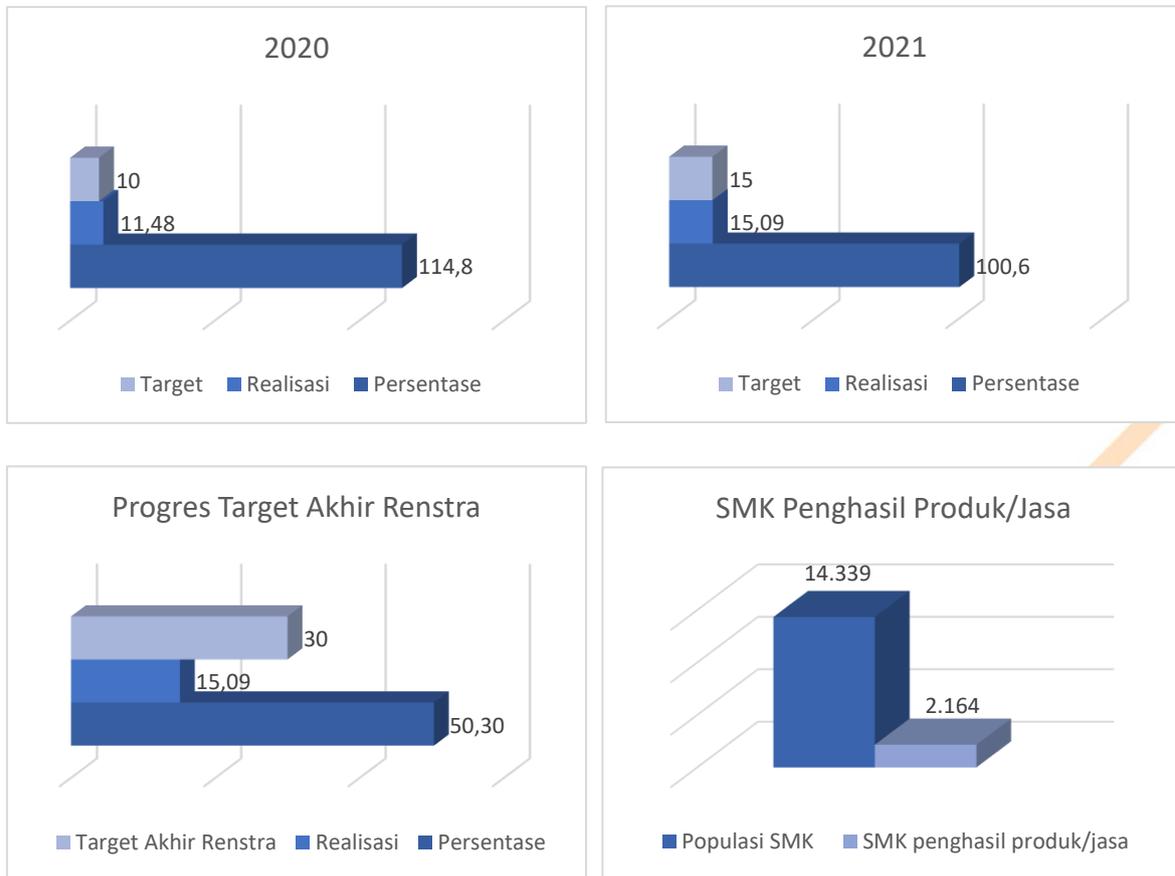
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|--------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional | 11,48 | 15,00 | 15,09 | 100,60 | 30,00 | 50,30 |

Capaian IKP 2.3 pada tahun 2021 diperoleh dari perhitungan jumlah SMK penghasil produk/jasa yaitu sebanyak 2.164 sekolah dibagi dengan jumlah populasi SMK sebanyak 14.339 sekolah, sehingga mendapatkan capaian sebesar 15,09%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 11,48%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,61%. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 15%, atau mencapai persentase sebesar 100,60%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 30%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 50,30%, masih ada kekurangan sebesar 49,70% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Beberapa keberhasilan ini karena banyak guru yang sudah memiliki sertifikat industri sehingga dimanfaatkan oleh beberapa unit industri lain, BUMD, dan unit-unit usaha masyarakat sebagai narasumber, selain itu banyak sekolah-sekolah lain yang

belajar ke beberapa SMK, hal ini disebabkan oleh kualitas SMK yang semakin membaik dan layak dijadikan rujukan.



Dokumentasi kegiatan

NAMA SMK : SMK KARYA NASIONAL KUNINGAN
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU : SANGAT BAIK

KEGIATAN

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penguatan kelembagaan SMK dengan pemerintah desa dalam rangka pemanfaatan sumber daya SMK.
2. SMK yang mengembangkan produk kreatif.
3. SMK yang mengembangkan *teaching factory*.
4. Program SMK Membangun Desa diharapkan SDM/*resource* yang dimiliki SMK dapat bermanfaat bagi *stakeholder* di sekitar lingkungannya.
5. Pelibatan praktisi profesional industri dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan SMK.
6. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana salah satu komponen peruntukannya adalah untuk pembiayaan guru tamu dari mitra industri sekolah untuk memberikan pembelajaran di sekolah.
7. Program SMK Pusat Keunggulan, dimana sekolah yang mendapatkan program ini diwajibkan untuk melibatkan praktisi dunia kerja/industri dalam pelaksanaan pembelajarannya di sekolah.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Beberapa guru pembimbingan program terkena atau terpapar covid-19 sehingga program yang dijadwalkan sudah dapat melakukan koordinasi dengan perangkat desa menjadi mundur.
2. Beberapa praktisi yang dilibatkan dalam pembelajaran di sekolah, sebagian besar baru diikutsertakan dalam penyusunan dokumen kurikulum dan penyusunan bahan pembelajaran.
3. Belum optimalnya keterlibatan praktisi/guru tamu dari dunia industri pada kelas pembelajaran sehingga peserta didik belum benar-benar mendapatkan materi pembelajaran baik teori maupun praktik yang sesuai dengan kondisi di industri. Namun jam kerja praktisi/guru tamu industri yang cukup padat sehingga belum dapat dioptimalkan.

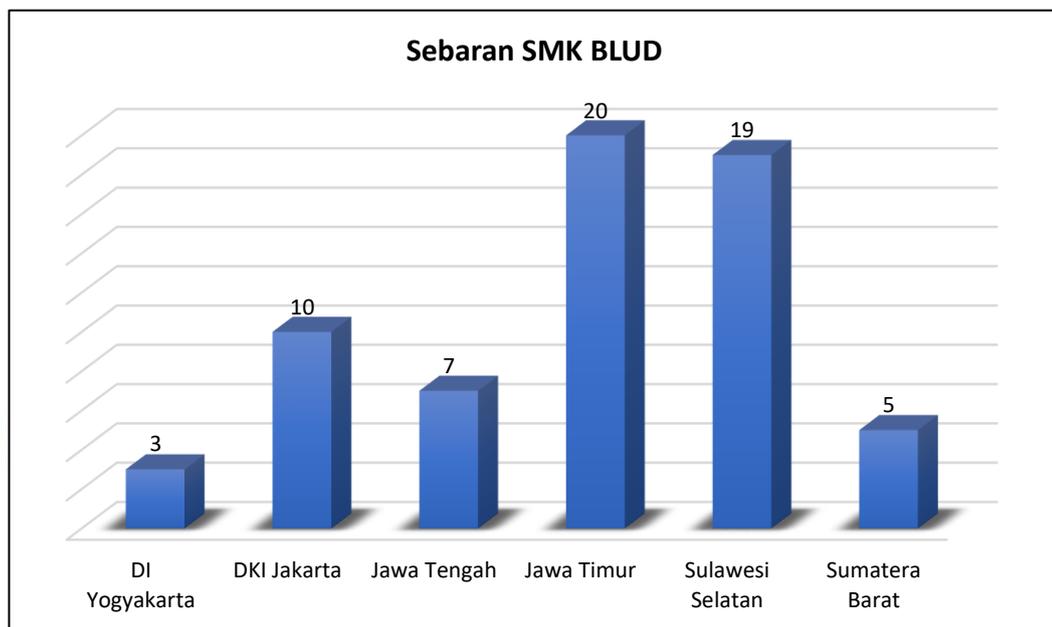
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan dunia kerja, dan pemerintah desa.
2. Memfasilitasi pemerintah desa untuk melibatkan SMK dalam pelaksanaan program melalui pemanfaatan dana desa.
3. Mengoptimalkan peran sekolah dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi desa, termasuk untuk membantu desa dalam rangka penanganan covid-19 yang ada di lingkungan sekolah.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Direktorat SMK memberikan kebijakan agar guru dan siswa di sekolah dapat dimagangkan di industri sehingga peserta didik diharapkan mendapatkan gambaran tentang kondisi dan situasi kerja di industri.
2. Mendatangkan guru tamu ke sekolah, meskipun hanya untuk menyampaikan materi umum terkait situasi dan budaya kerja di industri.
3. Mendorong kepada sekolah untuk bekerjasama dengan mitra industri dalam rangka pembukaan kelas industri sebagai bentuk pengembangan kompetensi *link and match* lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Mengembangkan riset terapan yang mendukung *teaching factory* dan berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.

IKP 2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD



Kemandirian sekolah salah satunya didorong dengan memberikan kelulusan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran *teaching factory*/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK negeri dengan skema menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK (2,5% dari jumlah SMK).

Formula perhitungan untuk IKP 2.4 adalah dengan menghitung jumlah SMK yang berstatus BLUD dibagi dengan jumlah populasi SMK yang ada di Indonesia kemudian dikalikan 100%.

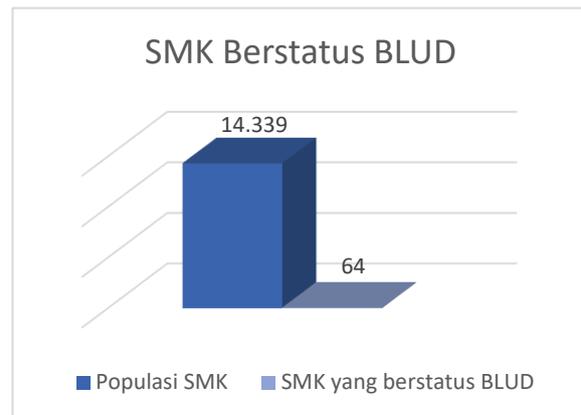
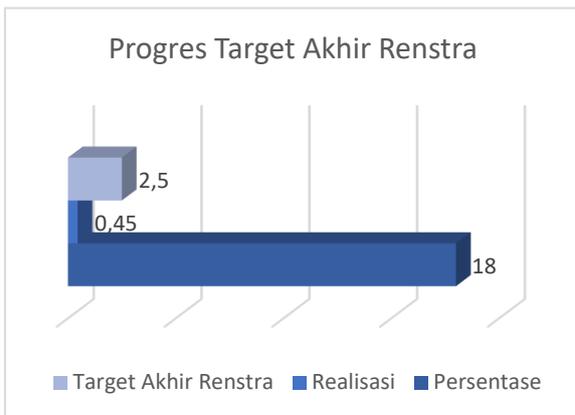
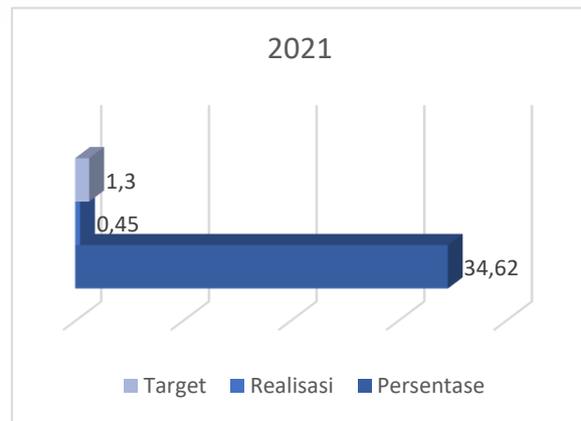
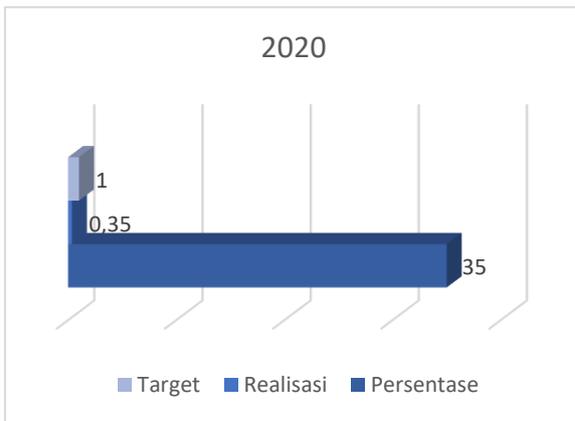
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK BLUD}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | 0,35 | 1,30 | 0,45 | 34,62 | 2,50 | 18,00 |

Capaian IKP 2.4 pada tahun 2021 diperoleh dari perhitungan jumlah SMK yang berstatus BLUD yaitu sebanyak 64 sekolah dibagi dengan jumlah SMK sebanyak 14.339 sekolah, sehingga mendapatkan capaian sebesar 0,45%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,35%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Namun capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 1,30%, atau baru mencapai persentase sebesar 34,62%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 2,50%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 18,00%, masih ada kekurangan sebesar 82,00% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Berdasarkan capaian ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Semakin banyaknya SMK menjadi BLUD membuktikan bahwa *teaching factory* di SMK semakin membaik dan memperoleh kepercayaan dari pemerintah daerah menjadi BLUD. SMK yang memperoleh status BLUD artinya diberi keluwesan dalam pengelolaan dana hasil *teaching factory* untuk mengembangkan usaha.



Dokumentasi kegiatan



Penyusunan rancangan pengembangan SMK BLUD



Dukungan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan SMK BLUD

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Koordinasi dengan pemerintah provinsi agar melakukan pembinaan secara intensif kepada SMK yang akan diusulkan menjadi sekolah berstatus BLUD.
2. Direktorat SMK telah memberikan fasilitasi kepada SMK yang sudah mempunyai produk untuk didorong mendapatkan status BLUD.
3. Direktorat SMK senantiasa koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar memberikan fasilitasi dari sisi yang lain kepada SMK yang telah mempunyai produk yang bisa dikembangkan dan mendapatkan status BLUD.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terkendala dalam manajerial sekolah yang belum siap untuk menjadi sekolah berstatus BLUD.
2. Koordinasi dengan pemerintah provinsi kurang maksimal karena dilakukan secara daring.
3. Status BLUD bagi SMK merupakan wewenang penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga Kemendikbudristek hanya melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada SMK yang akan menjadi BLUD. Hal inilah yang menjadikan capaian pada IKP ini belum memenuhi target.

4. Belum optimalnya harmonisasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah belum berani untuk menetapkan SMK yang telah difasilitasi Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat SMK untuk mendapatkan status BLUD.

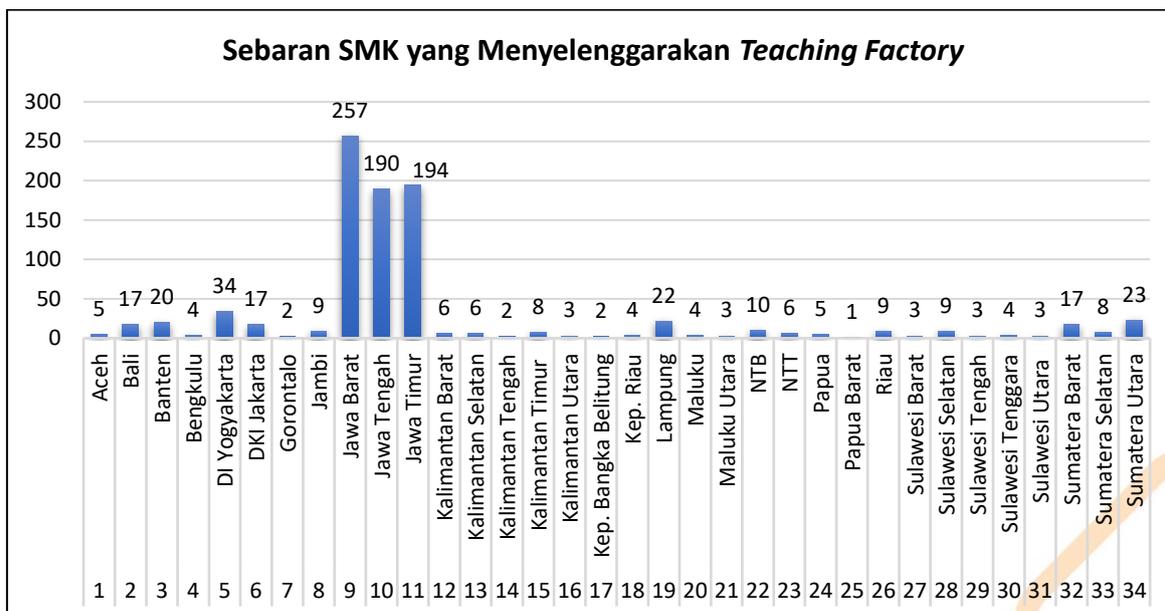
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Kepala sekolah mengikuti pelatihan CEO untuk meningkatkan kapabilitas manajerial sekolah.
2. Melakukan koordinasi melalui daring untuk mengantisipasi keterbatasan waktu dan tempat sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan jadwal serta target.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi kepada Pemerintah Daerah untuk membina SMK yang akan ditetapkan menjadi satuan pendidikan berstatus BLUD.
4. Direktorat SMK melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan harmonisasi terkait penetapan BLUD pada SMK bagi Pemerintah Daerah.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter keberkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program keahlian).
4. Praktik kerja lapangan/industri minimal 1 semester.
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur).
6. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
7. Riset terapan mendukung *teaching factory* yang berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.
8. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
9. Beasiswa ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*



Teaching Factory adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui *teaching factory* adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen. SMK yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sekolah yang melaksanakan *teaching factory* adalah 20% dari jumlah SMK di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

Formula perhitungan untuk IKP 2.5 adalah dengan menghitung jumlah SMK yang menyelenggarakan *teaching factory* dibagi dengan jumlah SMK yang ada di Indonesia kemudian dikalikan 100%.

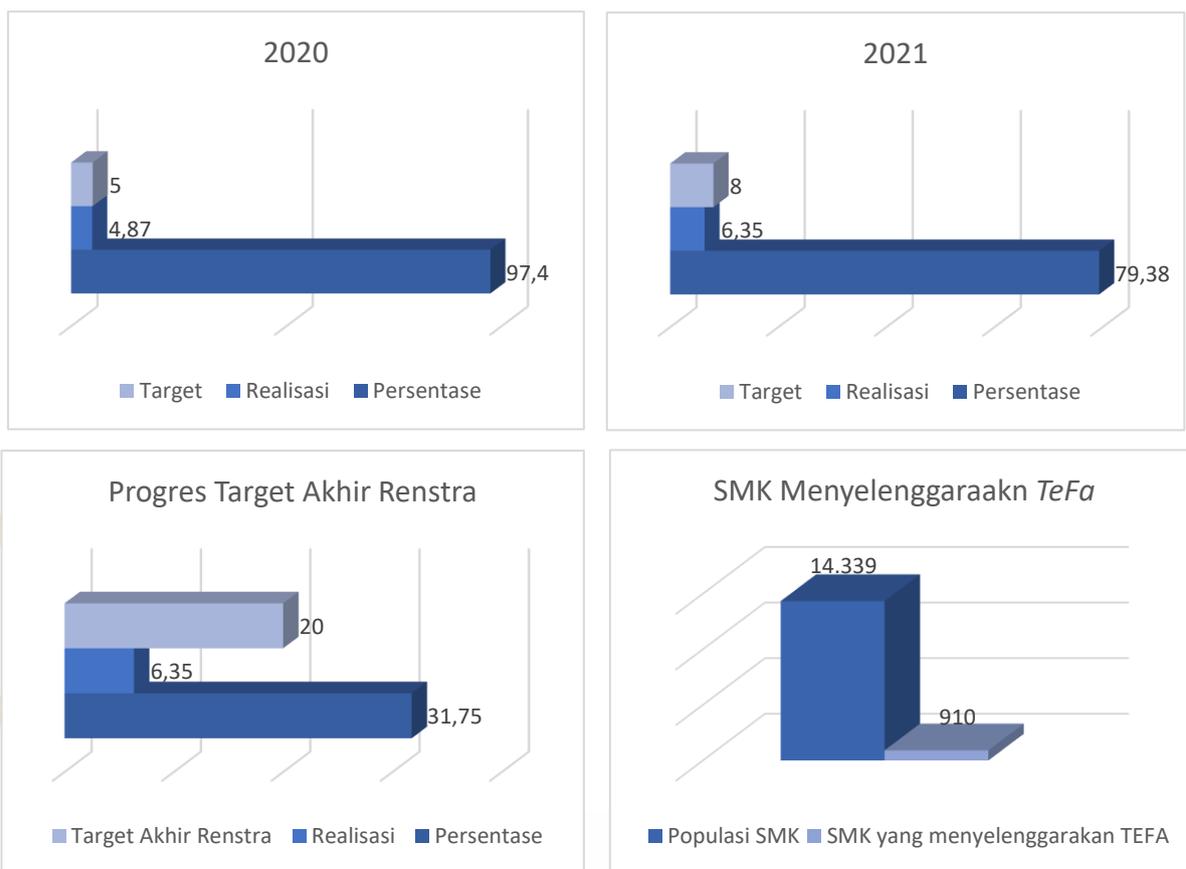
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK yang menyelenggarakan TEFA}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i> | 4,87 | 8,00 | 6,35 | 79,38 | 20,00 | 31,75 |

Pada tahun 2021 persentase SMK yang menyelenggarakan *teaching factory* diperoleh dari perhitungan jumlah SMK yang menyelenggarakan *teaching factory* yaitu sebanyak 910 sekolah dibagi dengan jumlah populasi SMK sebanyak 14.339 sekolah, sehingga mendapatkan capaian sebesar 6,35%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 4,87%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,48%. Namun capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 8%, atau baru mencapai persentase sebesar 79,38%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 20%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 31,75%, masih ada kekurangan sebesar 68,25% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Keberhasilan dengan banyaknya SMK yang menyelenggarakan *teaching factory* ini disebabkan oleh: 1) semakin banyak SMK yang dipercaya pemerintah daerah dalam mengelola dana hasil usaha di *teaching factory* dalam bentuk BLUD; 2) banyaknya SMK yang sudah berhasil mengelola *teaching factory* bekerjasama dengan unit usaha, dunia usaha dan dunia industri yang hasilnya dapat mengembangkan program dan kesejahteraan SMK.



Dokumentasi Kegiatan

NAMA SMK : SMKS TEKNIK MUHAMMADIYAH PLUS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT
 COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU :
 SANGAT BAIK

KEGIATAN

Produk Pengembangan TeFa AR/VR

NAMA SMK : SMKS SINAR PARAHYANGAN
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT
 COE : EKONOMI KREATIF

RAPOR MUTU :
 SANGAT BAIK

KEGIATAN

ICON DIGITAL PRINTING Price list

| KARUM DIGITAL | |
|--------------------|------|
| 1. Karum Digital | 1000 |
| 2. Karum Digital | 1000 |
| 3. Karum Digital | 1000 |
| 4. Karum Digital | 1000 |
| 5. Karum Digital | 1000 |
| 6. Karum Digital | 1000 |
| 7. Karum Digital | 1000 |
| 8. Karum Digital | 1000 |
| 9. Karum Digital | 1000 |
| 10. Karum Digital | 1000 |
| 11. Karum Digital | 1000 |
| 12. Karum Digital | 1000 |
| 13. Karum Digital | 1000 |
| 14. Karum Digital | 1000 |
| 15. Karum Digital | 1000 |
| 16. Karum Digital | 1000 |
| 17. Karum Digital | 1000 |
| 18. Karum Digital | 1000 |
| 19. Karum Digital | 1000 |
| 20. Karum Digital | 1000 |
| 21. Karum Digital | 1000 |
| 22. Karum Digital | 1000 |
| 23. Karum Digital | 1000 |
| 24. Karum Digital | 1000 |
| 25. Karum Digital | 1000 |
| 26. Karum Digital | 1000 |
| 27. Karum Digital | 1000 |
| 28. Karum Digital | 1000 |
| 29. Karum Digital | 1000 |
| 30. Karum Digital | 1000 |
| 31. Karum Digital | 1000 |
| 32. Karum Digital | 1000 |
| 33. Karum Digital | 1000 |
| 34. Karum Digital | 1000 |
| 35. Karum Digital | 1000 |
| 36. Karum Digital | 1000 |
| 37. Karum Digital | 1000 |
| 38. Karum Digital | 1000 |
| 39. Karum Digital | 1000 |
| 40. Karum Digital | 1000 |
| 41. Karum Digital | 1000 |
| 42. Karum Digital | 1000 |
| 43. Karum Digital | 1000 |
| 44. Karum Digital | 1000 |
| 45. Karum Digital | 1000 |
| 46. Karum Digital | 1000 |
| 47. Karum Digital | 1000 |
| 48. Karum Digital | 1000 |
| 49. Karum Digital | 1000 |
| 50. Karum Digital | 1000 |
| 51. Karum Digital | 1000 |
| 52. Karum Digital | 1000 |
| 53. Karum Digital | 1000 |
| 54. Karum Digital | 1000 |
| 55. Karum Digital | 1000 |
| 56. Karum Digital | 1000 |
| 57. Karum Digital | 1000 |
| 58. Karum Digital | 1000 |
| 59. Karum Digital | 1000 |
| 60. Karum Digital | 1000 |
| 61. Karum Digital | 1000 |
| 62. Karum Digital | 1000 |
| 63. Karum Digital | 1000 |
| 64. Karum Digital | 1000 |
| 65. Karum Digital | 1000 |
| 66. Karum Digital | 1000 |
| 67. Karum Digital | 1000 |
| 68. Karum Digital | 1000 |
| 69. Karum Digital | 1000 |
| 70. Karum Digital | 1000 |
| 71. Karum Digital | 1000 |
| 72. Karum Digital | 1000 |
| 73. Karum Digital | 1000 |
| 74. Karum Digital | 1000 |
| 75. Karum Digital | 1000 |
| 76. Karum Digital | 1000 |
| 77. Karum Digital | 1000 |
| 78. Karum Digital | 1000 |
| 79. Karum Digital | 1000 |
| 80. Karum Digital | 1000 |
| 81. Karum Digital | 1000 |
| 82. Karum Digital | 1000 |
| 83. Karum Digital | 1000 |
| 84. Karum Digital | 1000 |
| 85. Karum Digital | 1000 |
| 86. Karum Digital | 1000 |
| 87. Karum Digital | 1000 |
| 88. Karum Digital | 1000 |
| 89. Karum Digital | 1000 |
| 90. Karum Digital | 1000 |
| 91. Karum Digital | 1000 |
| 92. Karum Digital | 1000 |
| 93. Karum Digital | 1000 |
| 94. Karum Digital | 1000 |
| 95. Karum Digital | 1000 |
| 96. Karum Digital | 1000 |
| 97. Karum Digital | 1000 |
| 98. Karum Digital | 1000 |
| 99. Karum Digital | 1000 |
| 100. Karum Digital | 1000 |

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi penerapan pembelajaran *teaching factory*.
2. Proses seleksi satuan pendidikan yang akan mendapatkan program pembinaan sebagai SMK yang melaksanakan pembelajaran *teaching factory*.
3. Memberikan bantuan kepada SMK sesuai kriteria.
4. Penyelenggaraan model pembelajaran berbasis *teaching factory* menjadi *best practice* dalam implementasi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Direktorat SMK mendorong sekolah menyelenggarakan model pembelajaran *teaching factory* sebagai bentuk penyelarasan pembelajaran antara sekolah dengan industri.

6. Pada tahun 2021 Direktorat melaksanakan program bantuan *teaching factory* dengan capaian sasaran sebanyak 60 SMK.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Peralatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan pembelajaran *teaching factory* belum memadai.
2. Banyaknya SMK yang mendaftar untuk mendapatkan program, tetapi dengan alokasi anggaran yang minim mengakibatkan target sasaran sedikit, sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam proses seleksi terkait kelengkapan persyaratan untuk proses verifikasi dan validasi.
3. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan proses pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* di SMK menjadi terkendala. Pelaksanaan pembelajaran praktik disertai produk barang jadi yang siap dipasarkan tidak dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan pembelajaran secara luring.
4. Beberapa industri mitra bagi SMK yang telah menyelenggarakan pembelajaran *teaching factory* di sekolah juga mengalami penurunan produksi yang juga berdampak pada ketercapaian pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* di sekolah.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mendorong penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka penerapan pembelajaran *teaching factory* di SMK.
2. Mendorong SMK untuk bekerjasama dengan industri khususnya dalam pengadaan peralatan pembelajaran.
3. Menambah SDM untuk melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan bagi satuan pendidikan yang mengajukan untuk menjadi calon penerima program pengembangan SMK untuk melaksanakan pembelajaran *teaching factory*.
4. Keberlanjutan model pembelajaran berbasis *teaching factory* akan kembali dilaksanakan disaat pandemi sudah usai. Tentunya perlu usaha yang lebih berat dengan kondisi usai pandemi yang menyebabkan usaha produksi yang sebelumnya

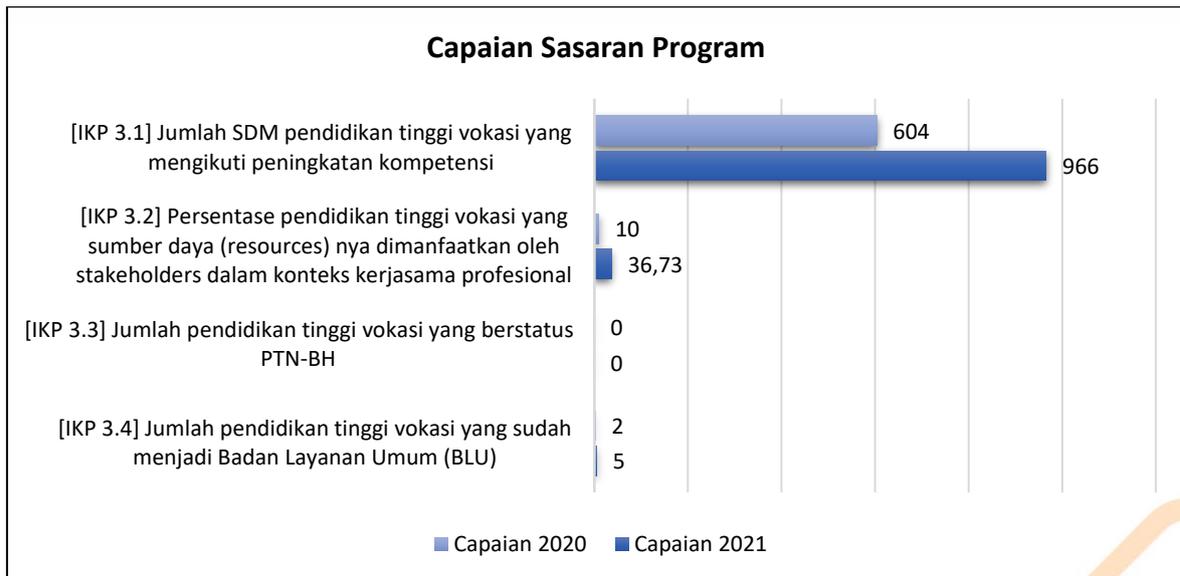
telah berjalan di sekolah harus dilaksanakan kembali dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Direktorat SMK akan mendorong sekolah agar penerapan pembelajaran berbasis *teaching factory* dijadikan sebagai model utama dalam pembelajaran di sekolah.
2. Ditjen Pendidikan Vokasi mengajak dunia industri agar terlibat aktif dalam upaya pengembangan SMK sebagai bentuk pemulihan ekonomi secara nasional.
3. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
4. Pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
5. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program keahlian).
6. Praktik kerja lapangan/industri minimal 1 semester.
7. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur).
8. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
9. Riset terapan mendukung *teaching factory* yang berawal dari kebutuhan industri yang hasilnya dihilirkan ke industri dan pasar.
10. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
11. Beasiswa ataupun donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

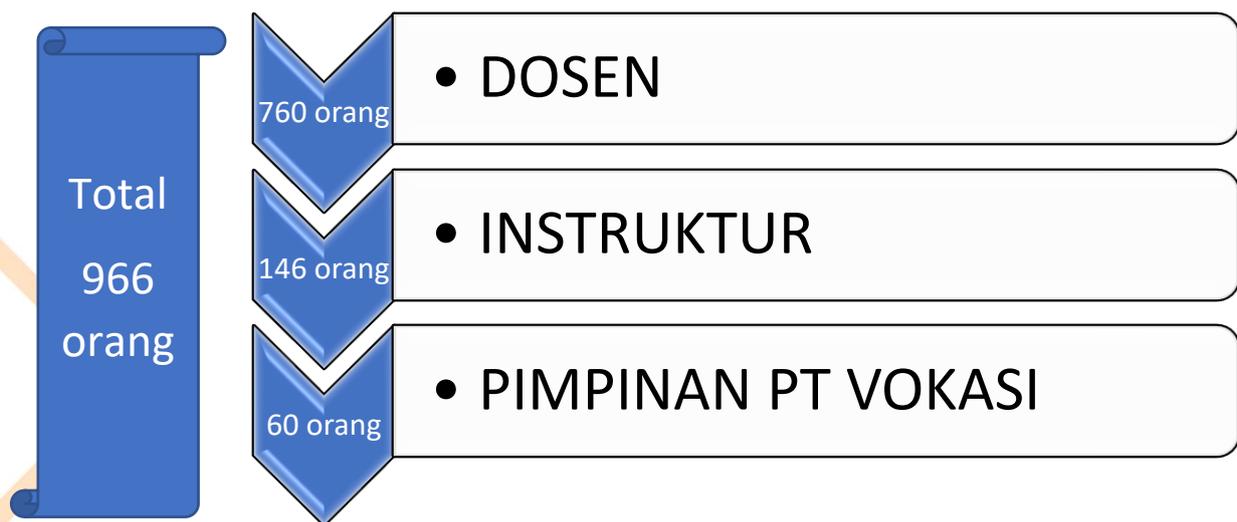
Sasaran Program 3. Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

Sampai dengan tahun 2021, pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Meskipun belum semua menunjukkan peningkatan, tetapi terlihat ada perbaikan pada SDM pendidikan tinggi vokasi, pemanfaatan sumber daya (*resources*) oleh *stakeholders*, dan pendidikan tinggi vokasi yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Namun demikian, perlu upaya dan strategi yang signifikan untuk pembinaan pendidikan tinggi vokasi agar menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Upaya tersebut antara lain perbaikan tata kelola, pemetaan potensi, sosialiasi, pendampingan, dan optimalisasi kerjasama antara PTN Vokasi dengan dunia kerja.

IKP 3.1 Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi



Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah:

1. Dosen:
 - a. memiliki kecakapan berbahasa inggris, bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL >475;
 - b. usia per 31 Desember 2021 adalah 60 tahun;
 - c. pendidikan: untuk lulusan S2, min usia 50 tahun sedangkan untuk lulusan S3, min usia 30 tahun;
 - d. adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan;
 - e. adanya penilaian essay/proposal;
 - f. adanya kesesuaian dengan tujuan institusi.
2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP):
 - a. memiliki kecakapan berbahasa inggris, bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL >475;
 - b. usia per 31 Desember 2021 adalah 53 tahun;
 - c. pendidikan: untuk lulusan S2, min usia 20 tahun, untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun sedangkan untuk lulusan D3, min usia 50 tahun;
 - d. adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
 - e. adanya penilaian essay/proposal;
 - f. adanya kesesuaian dengan tujuan institusi.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri.

Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Kompetensi disesuaikan dengan standar industri pada bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (*hospitality*), pelayanan sosial (*care services*), dan bidang lainnya. Dari sumber data PD Dikti, dosen politeknik negeri berjumlah 8.483 orang. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah SDM baik dosen, instruktur maupun pimpinan PT Vokasi akan bertambah 300 orang pertahun sehingga di akhir 2024 diharapkan sudah mencapai

1.500 orang secara kumulatif yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi dari kegiatan pelatihan sertifikasi.

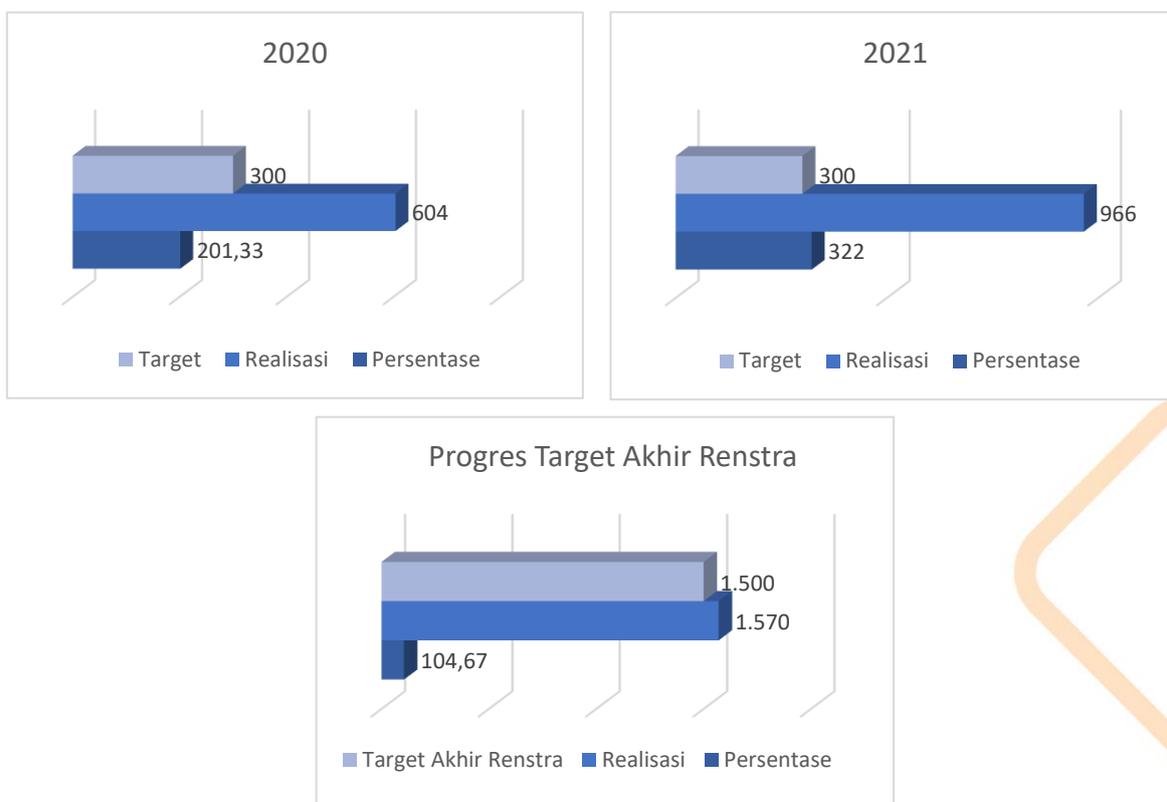
Formula perhitungan untuk IKP 3.1 adalah dengan menghitung jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi. Satuan yang digunakan adalah orang dengan metode perhitungan kumulatif, yaitu jumlah capaian dari tahun awal renstra 2020 sampai dengan tahun berjalan hingga berakhirnya periode renstra 2024.

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Realisasi s.d Tahun 2021 (Akumulasi) | Target Akhir Renstra 2024 (Akumulasi) | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | | |
| Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | 604 | 300 | 966 | 322 | 1.570 | 1.500 | 104,67 |

Capaian IKP 3.1 pada tahun 2021 yaitu sebanyak 966 orang, sedangkan capaian tahun 2020 sebanyak 604 orang, maka capaian mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 362 orang. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 300 orang, dengan persentase sebesar 322%. Ketercapaian target ini disebabkan pelaksanaan pelatihan yang semula direncanakan dengan tatap muka, menjadi dilakukan dengan *blended* sehingga terjadi efisiensi anggaran yang kemudian dilakukan penambahan sasaran dengan menggunakan modul pelatihan untuk menjaga kualitas pelaksanaan pelatihan

Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menyesuaikan dengan metode perhitungan yang terdapat pada renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 yaitu secara akumulatif dengan menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra sampai dengan tahun berjalan. Maka, capaian pada IKP 3.1 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1.570 orang, dengan rincian, capaian di tahun 2020 sebanyak 604 orang dan capaian di tahun 2021 sebanyak 966 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 1.500 orang, capaian ini sudah melebihi target yaitu dengan persentase sebesar 104,67%. Hal ini tentunya memerlukan penyesuaian target renstra pada tahun berikutnya.

Keberhasilan ini karena didukung oleh kebijakan kementerian dan disambut oleh dunia usaha dan dunia industri di dalam dan di luar negeri.



Dokumentasi Kegiatan



Pelatihan bagi dosen



Pelatihan bagi dosen



Pelatihan bagi Pimpinan PT



Pelatihan bagi instruktur

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi bagi dosen.
2. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi bagi instruktur.
3. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi bagi pimpinan PT Vokasi.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Proses pendaftaran diperpanjang karena penyusunan pedoman kegiatan memakan waktu lebih lama, karena tidak bisa menghadirkan tim ahli/narasumber.
2. Keterlambatan pencairan bantuan disebabkan masih banyaknya persyaratan dokumen peserta yang belum lengkap.
3. Proses sosialisasi program melalui daring dirasa kurang optimal karena informasi yang didapat tidak tersampaikan secara maksimal.
4. Pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM menyebabkan terjadinya penundaan/perubahan jadwal pelaksanaan.
5. Proses pencairan bantuan tahap 2 mengalami kendala yang disebabkan laporan pelaksanaan tahap 1 belum selesai.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Untuk mempercepat proses penyusunan pedoman kegiatan melibatkan konsultan dan dosen dari pihak swasta.
2. Koordinasi dengan penerima bantuan terkait kelengkapan persyaratan dokumen.
3. Menyediakan narahubung untuk informasi lebih lanjut terkait sosialisasi program bantuan.
4. Pelaksanaan program dilakukan secara *blended* untuk memaksimalkan keterbatasan waktu.
5. Melakukan proses pemantauan dan evaluasi bagi penerima bantuan peningkatan kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Proses sosialisasi kegiatan untuk tahun berikutnya akan diadakan dengan lebih masif dengan metode *blended*, serta dilakukan proses pendampingan agar pelaksanaan sosialisasi kegiatan dapat dimaksimalkan.
2. *Timeline* kegiatan segera dilaksanakan sejak awal tahun dan dipadatkan sehingga apabila terjadi penundaan atau perubahan jadwal masih terdapat sisa waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Untuk mempermudah proses pencairan sistem pembayaran kegiatan tahun berikutnya akan dilakukan dengan sistem kontrak, sehingga proses pencairan dapat dilaksanakan lebih cepat dan pengawasannya lebih terarah.
4. Pendampingan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya akan dilakukan lebih intensif dan dilakukan secara luring, sehingga kelengkapan data peserta sebagai syarat administrasi dan syarat pencairan dana dapat berjalan sesuai rencana.

IKP 3.2 Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional

| No | Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional |
|----|--|
| 1 | AKN Putra Sang Fajar Blitar |
| 2 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
| 3 | Politeknik Manufaktur Bandung |
| 4 | Politeknik Negeri Bandung |
| 5 | Politeknik Negeri Batam |
| 6 | Politeknik Negeri Jakarta |
| 7 | Politeknik Negeri Jember |
| 8 | Politeknik Negeri Lampung |
| 9 | Politeknik Negeri Malang |
| 10 | Politeknik Negeri Manado |
| 11 | Politeknik Negeri Medan |
| 12 | Politeknik Negeri Padang |
| 13 | Politeknik Negeri Pontianak |
| 14 | Politeknik Negeri Semarang |
| 15 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
| 16 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep |
| 17 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 18 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda |

Pendidikan Tinggi Vokasi yang dimaksud adalah PT Vokasi yang melakukan kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha (magang mahasiswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pelibatan tenaga ahli industri sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.)

Adapun pemanfaatan sumber daya PT Vokasi dalam konteks kerja sama profesional adalah:

1. Serapan lulusan PT Vokasi di IDUKA
2. Dukungan mahasiswa kepada *stakeholders* selama proses magang
3. Dibuktikan dengan MoU antara PT Vokasi dengan IDUKA

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentase PT vokasi yang melakukan kerjasama dan melibatkan profesional industri terus meningkat dan pada tahun 2024 diharapkan secara akumulatif 80% PT vokasi sudah bekerjasama dengan industri dan melibatkan profesional industri dalam proses pembelajaran.

Formula perhitungan untuk IKP 3.2 adalah dengan menghitung jumlah PTV yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional dibagi dengan jumlah PTV kemudian dikalikan 100%.

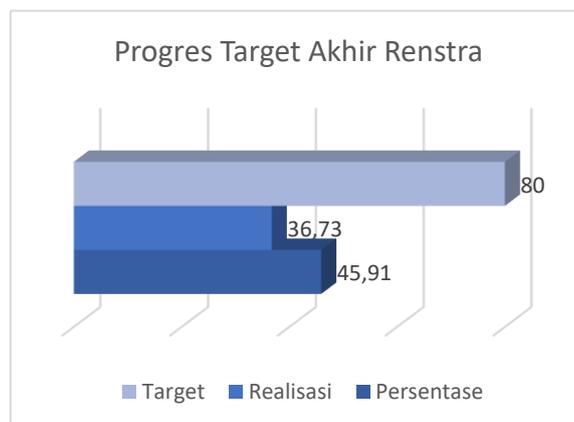
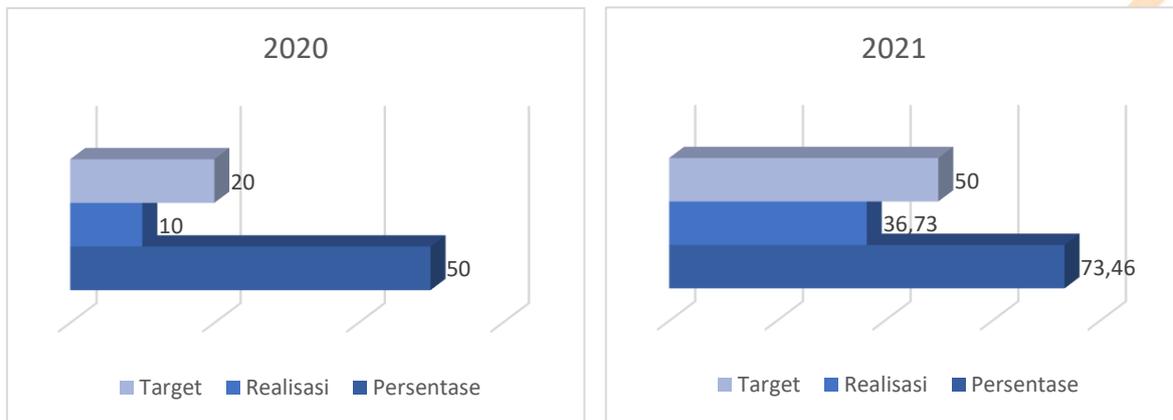
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah PTV yang sumber dayanya dimanfaatkan}}{\text{Jumlah PTV}} \times 100\%$$

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional | 10 | 50 | 36,73 | 73,46 | 80 | 45,91 |

Capaian IKP 3.2 pada tahun 2021 diperoleh dengan menghitung jumlah PTV yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional yaitu sebanyak 18 lembaga dibagi dengan jumlah PTV sebanyak 49 lembaga, sehingga mendapatkan capaian sebesar 36,73%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 10%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 26,73%. Namun capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 50%, atau mencapai persentase sebesar 73,46%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 80%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 45,91%, masih ada kekurangan sebesar 54,09% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2021, ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024 terutama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *link and match* 8+.

Banyaknya dosen di Politeknik dan AKN yang ikut berkiprah di luar kampus, bahkan banyak dari mereka menjadi konsultan, perancang, atau tim teknis di pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya di Politeknik atau AKN kompeten dan relevan dengan kebutuhan berbagai pihak.



Dokumentasi kegiatan



Teaching factory Politeknik Negeri Jember



Teaching factory Politeknik Negeri Malang

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Revitalisasi Prodi Vokasi dan Profesi.
2. Perguruan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Berbasis Industri.
3. Program pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan penelitian terapan.
5. Pembelajaran *teaching factory*.

6. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
7. Pelibatan dosen tamu dari industri minimal 50 jam per semester.
8. Program *Matching Fund* dan *Competitive Fund*.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* tidak optimal karena ada kebijakan PPKM, sehingga *resources* yang dimanfaatkan profesional tidak optimal.
2. Kerjasama antara PT Vokasi dengan industri tidak berjalan maksimal.
3. Partisipasi guru tamu dalam pembelajaran terbatas akibat kebijakan PPKM.
4. Implementasi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) tidak optimal.
5. Pengelolaan program *Matching Fund* dan *Competitive Fund* belum optimal.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Pembelajaran *teaching factory* dilakukan secara *blended* agar unit produksi tetap berjalan.
2. Optimalisasi kerjasama antara PT Vokasi dengan industri.
3. Partisipasi guru tamu dalam pembelajaran dilaksanakan secara *blended*.
4. Optimalisasi implementasi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat).
5. Mendorong PT Vokasi untuk melakukan pengelolaan program *Matching Fund* dan *Competitive Fund* dengan maksimal.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyelarasan kurikulum dengan dunia industri termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Optimalisasi implementasi *Project Based Learning* (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.
3. Jumlah dan peran dosen tamu dari industri dan dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/ program studi).
4. Magang bagi mahasiswa dan dosen di dunia kerja.

5. Dosen dan tenaga kependidikan secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja.
6. Implementasi riset terapan dan program pengabdian masyarakat yang mendukung *teaching factory* yang berawal dari kasus atau kebutuhan.
7. Melakukan kerjasama sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
8. Meningkatkan partisipasi dunia industri untuk memberikan donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

IKP 3.3 Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH

Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang dimaksud Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status menjadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum juncto Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, menyebutkan bahwa salah satu kemudahannya yaitu memberikan kesempatan bagi PTN berakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) untuk menjadi badan hukum, bagi PTN yang 60% program studinya sudah terakreditasi A, dapat mengajukan menjadi PTN BH.

Persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
2. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
3. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
4. Menjalankan tanggung jawab sosial;
5. Berperan dalam pembangunan perekonomian.

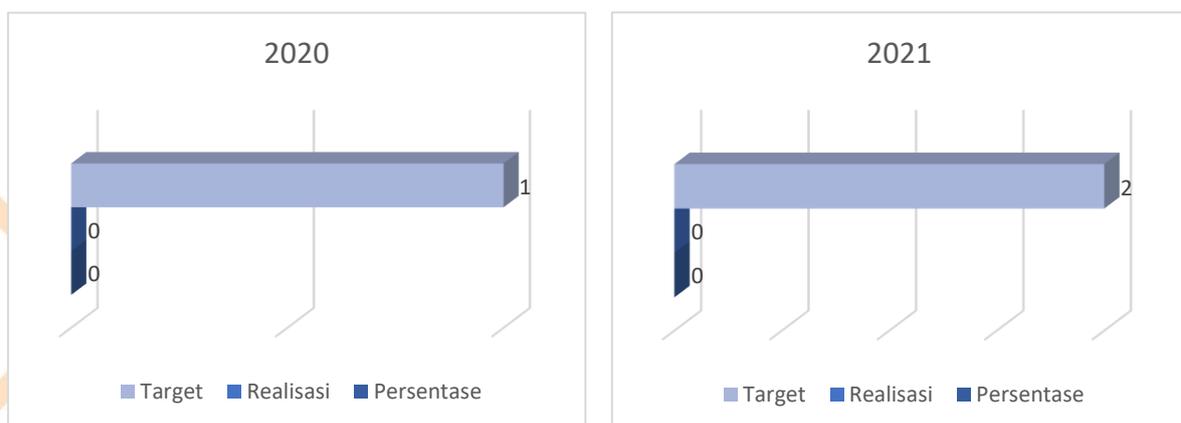
Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang berstatus PTNBH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang berstatus PTNBH berjumlah 5 PT secara kumulatif.

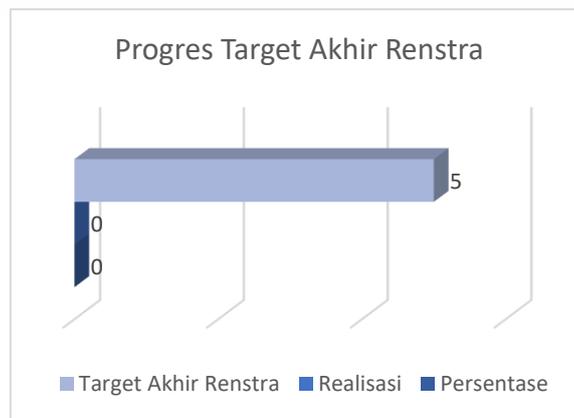
Formula perhitungan untuk IKP 3.3 adalah dengan menghitung jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTN-BH. Satuan yang digunakan adalah lembaga dengan metode perhitungan kumulatif, yaitu jumlah capaian dari tahun awal renstra 2020 sampai dengan tahun berjalan hingga berakhirnya periode renstra 2024.

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|---|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |

Sama seperti dengan tahun 2020, pada tahun 2021 belum ada Perguruan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH, atau belum ada capaian pada IKP 3.3. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebanyak 2 lembaga dan target akhir renstra sebanyak 5 lembaga, tentunya persentase capaian ini masih 0%. Hal ini memerlukan inovasi dan strategi khusus untuk mengejar ketidaktercapaian target tahun 2020 dan 2021 ataupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Status Politeknik atau AKN sampai saat ini masih belum mampu menjadi PTNBH hal ini disebabkan oleh masih rendahnya anggaran yang bersumber dari anggaran murni APBN. Rendahnya anggaran ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah mahasiswa sehingga sumber dana dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), unit usaha, dan sumber sumber lain sangat terbatas. Saat ini Ditjen Pendidikan Vokasi fokus pada upaya PTV menjadi BLU.





Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Kerjasama PT Vokasi dengan dunia industri dalam pengembangan tata kelola organisasi menuju tata Kelola yang mandiri.
2. Kerjasama PT Vokasi dengan dunia industri dalam pengelolaan *teaching factory* yang mampu menghasilkan produk untuk dihilirisasi.
3. Pelaksanaan *project based learning* menjadi budaya perkuliahan pada PT Vokasi.
4. Pelibatan pelaku wirausaha untuk menjadi guru tamu agar meningkatkan kemampuan wirausaha PT Vokasi.
5. Penerapan kampus merdeka yaitu dengan mahasiswa menghabiskan masa studi diluar kampus minimal 20 SKS.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Organisasi dan tata kelola pada sebagian besar PTN Vokasi belum memenuhi syarat untuk menjadi PTNBH.
2. Sebagian besar PT Vokasi besar belum memiliki kerjasama yang mendalam (*in depth collaboration*) dengan dunia industri dalam pengelolaan *teaching factory* yang mampu menghasilkan produk untuk dihilirisasi.
3. Masih kurangnya sosialisasi terkait perubahan status PTNBH kepada PT Vokasi.
4. Belum optimalnya kemampuan wirasusaha PT Vokasi akibat kurangnya pelibatan pelaku wirausaha untuk menjadi guru tamu.
5. Persyaratan menjadi PTN-BH yang dirasa terlalu tinggi bagi PTN Vokasi membuat PTN Vokasi lebih fokus untuk memperbaiki dan mempersiapkan persyaratan secara bertahap.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan pendampingan terhadap PTN Vokasi agar mengelola organisasi dengan tata kelola yang baik.
2. Melakukan kerjasama dengan dunia industri dalam pengelolaan *teaching factory* yang mampu menghasilkan produk untuk dihilirisasi.
3. Melakukan sosialisasi kepada PT Vokasi terkait perubahan status menjadi PTN-BH.
4. Mengoptimalkan pelibatan pelaku wirausaha untuk menjadi guru tamu.
5. Memberikan pendampingan kepada PT Vokasi yang akan melakukan perubahan status menjadi PTN-BH.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan pemetaan terhadap PTN Vokasi yang berpotensi untuk menjadi PTNBH.
2. Melakukan pendampingan terhadap PTN Vokasi dalam mempersiapkan menjadi PTNBH.
3. Melakukan sosialisasi kepada PTN Vokasi terkait insentif dan keuntungan menjadi PTNBH dalam rangka mendorong minat PTN Vokasi menjadi PTNBH.
4. Melakukan optimalisasi Kerjasama PT Vokasi dengan dunia industri.

IKP 3.4 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

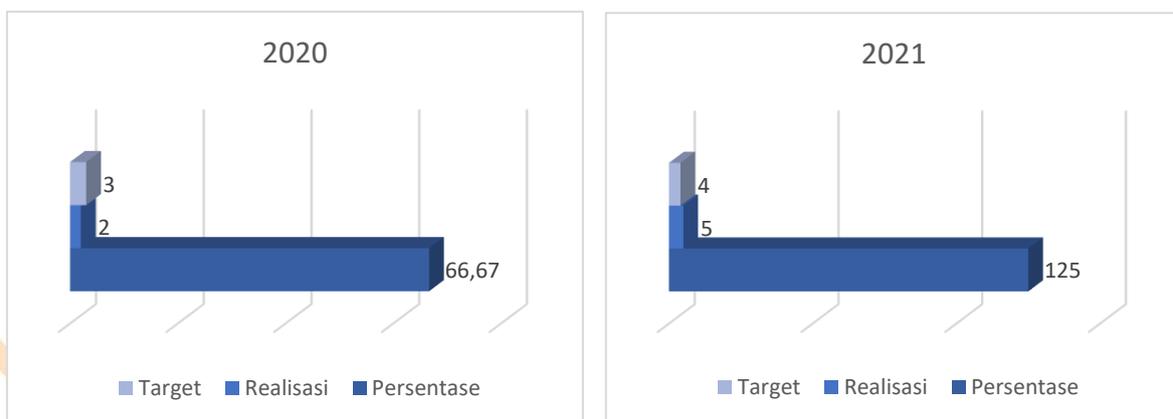
Formula perhitungan untuk IKP 3.4 adalah dengan menghitung jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi BLU. Satuan yang digunakan adalah lembaga dengan metode perhitungan kumulatif, yaitu jumlah capaian dari tahun awal renstra 2020 sampai dengan tahun berjalan hingga berakhirnya periode renstra 2024.

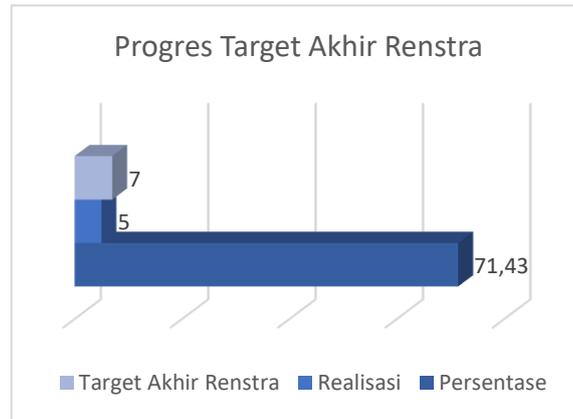
| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2024 | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|---|----------------|------------|-----------|-----|---------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | 2 | 4 | 5 | 125 | 7 | 71,43 |

Capaian IKP 3.4 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 5 lembaga yaitu Politeknik Negeri Malang, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang dan Politeknik Negeri Bali. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebanyak 2 lembaga, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 3 lembaga. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 4 lembaga, atau mencapai persentase sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 7 lembaga, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 71,43%, masih ada kekurangan sebesar 28,57% untuk bisa memenuhi target akhir renstra 2024. Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.

Membaiknya pendapatan di Politeknik dan AKN yang bersumber dari PNPB mendorong PTV menjadi BLU.





Dokumentasi kegiatan



Pendampingan untuk Politeknik Negeri Bali



Pendampingan untuk Politeknik Negeri Bandung



Pendampingan untuk Politeknik Negeri Samarinda

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pengelolaan badan layanan umum PTN Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Melakukan pendampingan kepada Perguruan Tinggi Vokasi untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
3. Melakukan telaah dokumen dan persyaratan substantif, teknis dan administratif Perguruan Tinggi Negeri Vokasi kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi satuan kerja BLU.
4. Mengusulkan PTN Vokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif (rencana strategi bisnis, tata kelola, laporan keuangan pokok dan standar pelayanan minimal) untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi satuan kerja BLU.
5. Melakukan pendampingan proses alih status asset tanah pada PTN Vokasi untuk dilakukan alih status dan serah terima pengelolaan asset tanah yang belum tercatat pada SIMAK BMN PTN Vokasi.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pengajuan usulan dokumen administratif BLU (rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, tata kelola dan laporan keuangan pokok) oleh PTN Vokasi

diajukan pada akhir tahun anggaran 2021, sehingga satuan kerja belum dapat ditetapkan menjadi BLU oleh Dit. PPK BLU, Kemenkeu.

2. Perbaikan/revisi dokumen administratif oleh PTN Vokasi hasil pembahasan yang dilakukan dengan Dit. PPK BLU dan Biro Keu dan BMN Setjen belum disampaikan tepat waktu.
3. Status pengelolaan dan penguasaan barang milik negara berupa tanah pada PTN Vokasi masih tercatat menjadi barang milik negara pada Universitas induknya yang belum dapat menghasilkan penerimaan PNPB dari pemanfaatan aset tanah.
4. Perubahan base line dokumen administratif (rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, tata kelola dan laporan keuangan pokok) yang pernah diajukan dikarenakan sudah melewati tahun anggaran 2021.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan memantau progress perkembangan perbaikan dokumen dengan PTN Vokasi yang mengajukan usulan menjadi satker BLU.
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Direktorat PPK BLU, Kementerian Keuangan terkait dengan perbaikan dokumen dan data dukung sesuai dengan jadwal dan waktu pengajuan yang ditentukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait dengan status barang milik negara berupa aset tanah pada PTN Vokasi yang masih tercatat sebagai tercatat dalam SIMAK BMN Ditjen Diksi sebagai aset barang milik negara dan belum dilakukan serah terima kepada Ditjen Diksi.
4. Pengajuan usulan dokumen administratif dari PTN Vokasi untuk diajukan dan ditetapkan menjadi satuan kerja BLU diproses dan diajukan pada awal tahun anggaran.

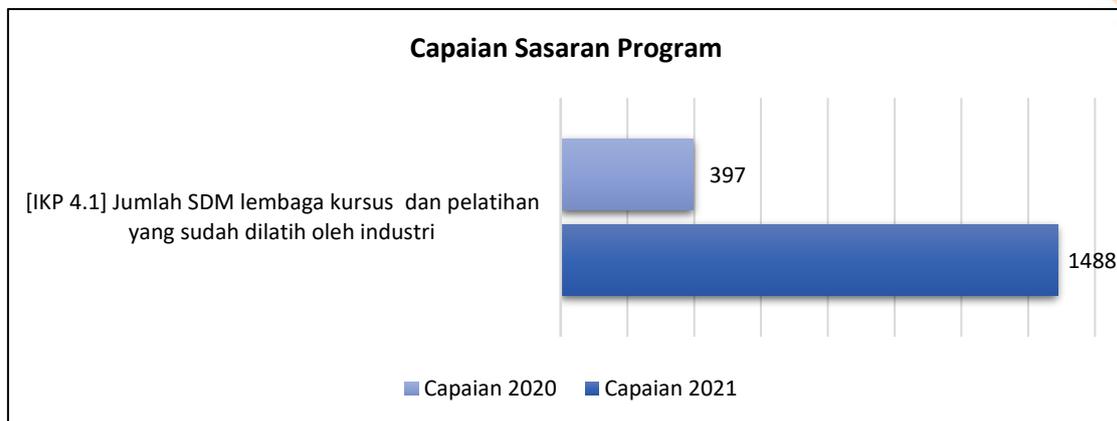
Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan akselerasi dan percepatan terhadap dokumen administratif dan persyaratan teknis agar proses pengajuan PTN Vokasi dapat diajukan pada awal tahun anggaran dan tidak terjadi keterlambatan untuk ditetapkan menjadi satuan kerja BLU.

2. Melakukan identifikasi dan pemetaan PTN Vokasi yang berpotensi untuk dapat diajukan dan diusulkan menjadi satuan kerja BLU.
3. Koordinasi yang lebih intens antara satker yang mengajukan untuk menjadi BLU dengan tim pusat, kemudian untuk mempercepat prosesnya penyampaian dokumen dilakukan tepat waktu dan segera melakukan perbaikan jika ada dokumen yang diminta untuk direvisi.
4. Memberikan sosialisasi kepada satuan kerja PTN Vokasi yang berpotensi menjadi satker BLU tentang fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU dan remunerasi yang diterima satuan kerja apabila ditetapkan menjadi satuan kerja BLU.

Sasaran Program 4. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

Sampai dengan tahun 2021, pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya perubahan pelaksanaan pelatihan secara *blended* yang berakibat adanya penghematan anggaran sehingga dapat menambah sasaran SDM yang dilatih oleh industri dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan pelatihan.

IKP 4.1 Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri



SDM di LKP adalah pendidik/instruktur dan pengelola/ pimpinan dari satu LKP yang sama. LKP sasaran dipilih berdasarkan Keputusan Direktur Kursus dan Pelatihan Nomor: 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri dan Keputusan Direktur Kursus dan Pelatihan Nomor: 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri.

Kriteria LKP yang ditingkatkan menjadi standar industri antara lain:

1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) di Dapodik.
2. Memiliki gedung sendiri (terpisah dengan rumah/kegiatan lain).
3. Terakreditasi A atau B.
4. Memiliki struktur organisasi dan deskripsi jabatan masing-masing yang jelas dan fungsional.
5. Memiliki peserta didik reguler.
6. Memiliki Mitra Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja (IDUKA)

Kriteria peserta program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri yang memenuhi syarat berikut:

1. Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan).
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya.
3. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi.
4. Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP.

5. Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
6. Pendidikan minimal S1 atau D4.

Kriteria sasaran pengelola yang ditingkatkan kompetensinya peserta peningkatan kompetensi pengelola LKP berstandar yang memenuhi syarat berikut:

1. Berasal dari LKP yang terpilih.
2. Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP.
3. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional.
4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP.
5. Pendidikan minimal S1 atau D4.

Cakupan substansi meliputi kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yg berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.

SDM yang sudah dilatih oleh industri dapat dibuktikan dengan:

1. Mendapatkan sertifikat dari industri.
2. Mendapatkan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.
3. Mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan kursus daring.

Kriteria industri yang dapat melakukan pelatihan:

1. Direkomendasikan oleh Forum Pengarah Vokasi yang memiliki paket pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis kursus yang ada di LKP terpilih.
2. Memiliki paket pelatihan yang sesuai dengan program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
3. Memiliki fasilitas, SDM, dan sarana praktik yang dibutuhkan selama pelatihan.
4. Bersedia melakukan evaluasi akhir dan memberi surat keterangan kepada peserta program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
5. Bersedia memberikan pembinaan dan menjadi mitra LKP setelah pelatihan.

Formula perhitungan untuk IKP 4.1 adalah dengan menghitung jumlah pendidik/instruktur dan pengelola /pimpinan LKP yang dilatih oleh industri. Satuan yang digunakan adalah orang dengan metode perhitungan kumulatif, yaitu jumlah capaian

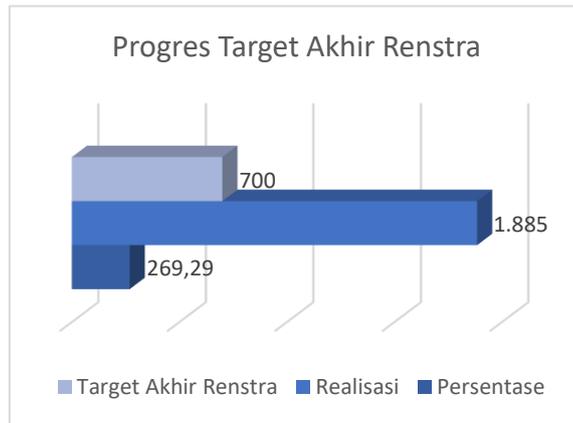
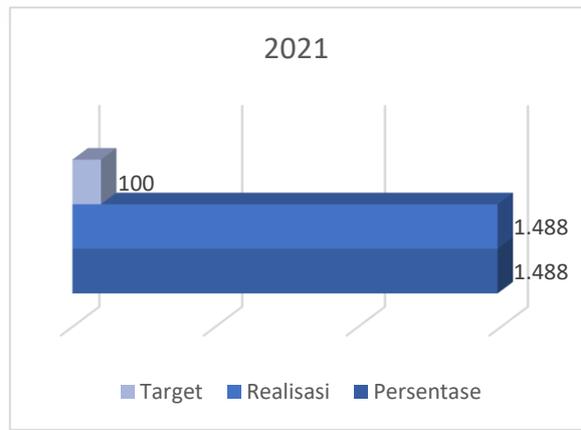
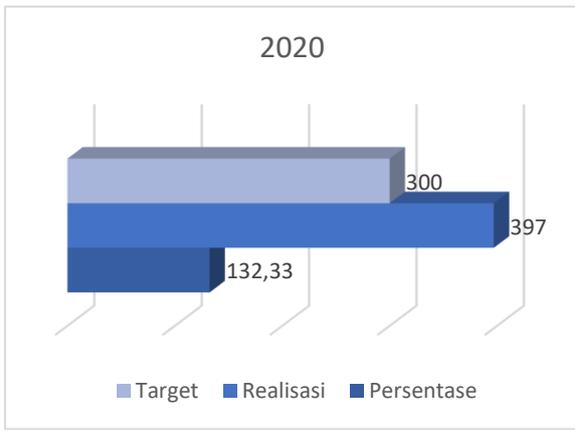
dari tahun awal renstra 2020 sampai dengan tahun berjalan hingga berakhirnya periode renstra 2024.

| Indikator Kinerja Program | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Realisasi s.d Tahun 2021 (Akumulasi) | Target Akhir Renstra 2024 (Akumulasi) | % Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024 |
|--|----------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Target | Realisasi | % | | | |
| Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | 397 | 100 | 1.488 | 1.488 | 1.885 | 700 | 269,29 |

Capaian IKP 4.1 pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.488 orang, sedangkan capaian tahun 2020 sebanyak 397 orang, maka capaian mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 1.091 orang. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 100 orang, bahkan mencapai persentase sebesar 1.488%. Ketercapaian target ini disebabkan pelaksanaan pelatihan yang semula direncanakan dengan tatap muka, menjadi dilakukan dengan *blended* sehingga terjadi efisiensi anggaran yang kemudian dilakukan penambahan sasaran dengan menjaga kualitas pelaksanaan pelatihan.

Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menyesuaikan dengan metode perhitungan yang terdapat pada renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 yaitu secara akumulatif dengan menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra sampai dengan tahun berjalan. Maka, capaian pada IKP 4.1 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1.885 orang, dengan rincian, capaian di tahun 2020 sebanyak 397 orang dan capaian di tahun 2021 sebanyak 1.488 orang. Jadi jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 700 orang, sudah mencapai persentase sebesar 269,29%. Hal ini memerlukan penyesuaian target renstra di tahun berikutnya.

Tuntutan memperoleh tenaga kerja yang cepat dan tepat oleh industri sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, oleh sebab itu banyak industri yang memberikan tawaran untuk melatih SDM (instruktur dan/atau pengelola LKP) dengan harapan kebutuhan tenaga kerja yang diluluskan LKP sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri mitra.



Dokumentasi kegiatan



Pelatihan SDM LKP



Pelatihan SDM LKP

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penyusunan pedoman dan kriteria pemilihan.
2. Verifikasi dan penetapan penerima bantuan/peserta.
3. Sosialisasi kepada calon peserta, dan peserta dalam proses pengisian data dalam aplikasi SIMANTAP (<https://kursus.kemdikbud.go.id/simantap/>).
4. Menetapkan IDUKA untuk 5 jenis keterampilan (barista, batik, digital marketing, refleksi, tata busana), dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan.
5. Melakukan persiapan untuk orientasi teknis dan validasi data melalui aplikasi SIMANTAP (<https://kursus.kemdikbud.go.id/simantap/>).
6. Pelatihan oleh industri yang diikuti oleh SDM LKP yaitu penguji uji kompetensi yang memperoleh peningkatan kompetensi sebanyak 20 orang, bidang tata boga, penerbangan, TIK, digital marketing, tari modern, *broadcasting*, bordir dan sulam, MC, ekspor impor, akuntansi, dan hipnoterapi.
7. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk keterampilan tata busana, pijat refleksi, barista, membatik, dan digital marketing di IDUKA.
8. Pelatihan peningkatan kompetensi instruktur lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri sebanyak 100 orang untuk 5 jenis keterampilan yakni tata busana, barista, spa, batik, pijat refleksi.
9. Pelatihan peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi dengan teknologi terbaru sebanyak 64 orang untuk bidang fotografi, digital marketing, batik, pijat

tradisional dan otomotif sepeda motor, *broadcasting*, seni merangkai bunga dan desain floral, pengasuh anak, batra ramuan, sekretaris, barista, tari modern, awak kabin pesawat terbang, tata operasi darat, dan yoga.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Kurasi LKP yang akan dilatih instruktur/pengelolanya sesuai kriteria yang ditetapkan tidak bisa dilakukan verifikasi secara langsung karena pandemi covid 19.
2. Kesulitan mencari industri yang mau bekerjasama untuk melatih instruktur karena pandemi covid 19.
3. Terkendala dalam melakukan visitasi IDUKA yang akan ditetapkan, karena masih pandemi covid 19.
4. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar sempat mengalami kendala, karena koordinator penyusunan kurikulum dan bahan ajar sedang terpapar covid 19.
5. Peningkatan kompetensi untuk penguji karena ada kebijakan PPKM jadwal mundur dari yang semula direncanakan, karena untuk penguji baru harus dilaksanakan secara luring.
6. Durasi pelaksanaan kegiatan hanya efektif 3 hari, dan dirasa kurang untuk pelatihan penguji baru.
7. Terdapat peserta yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan.
8. Terdapat jenis keterampilan yang harus diganti karena keterbatasan LKP dan IDUKA yang bersedia dijadikan tempat pelatihan, yang semula las busur manual diganti menjadi tata busana.
9. Belum samanya pemahaman IDUKA dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan peningkatan kompetensi.
10. Proses kurasi yang terlambat karena jenis keterampilan yang ditetapkan mengalami perubahan.
11. Proses pencarian IDUKA yang akan dijadikan tempat pelatihan mengalami kendala dikarenakan adanya PPKM.
12. Aturan pembatasan sosial, tidak memperbolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta sesuai ketentuan.
13. Tidak semua LSK membawa data dukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan pelatihan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. LKP diminta untuk mengirimkan *company profil* untuk melihat kesesuaian kriteria.
2. Pelaksanaan pelatihan teori dilakukan secara daring, dan untuk praktik akan dilakukan secara luring di industri sehingga durasi pelatihan menjadi lebih singkat.
3. Untuk visitasi IDUKA telah disusun dan dijadwalkan, dan akan dilaksanakan ketika PPKM berakhir.
4. Saat ini koordinasi tetap dilakukan dengan subkoordinator penyusun kurikulum dan bahan ajar, untuk progres penyusunan.
5. Kegiatan tetap dilaksanakan secara luring meskipun waktu diundur sampai kebijakan PPKM berakhir, terutama untuk materi-materi pokok, sedangkan untuk pendalaman materi dilakukan penugasan mandiri oleh master penguji.
6. Memilih jenis keterampilan yang jumlah LKP dan IDUKA nya terbanyak, sehingga terpilih keterampilan tata busana.
7. Jenis keterampilan las busur manual digantikan dengan jenis keterampilan tata busana.
8. Mencari IDUKA pengganti yang bersedia menerima peserta di masa PPKM.
9. Pimpinan LKP yang bersangkutan menunjuk instruktur lain di lembaganya untuk menggantikan instruktur yang positif Covid-19.
10. Pelatihan penguji dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, karena peserta yang akan diundang lebih dari 100 orang.
11. Melakukan pelatihan secara *blended* dimana sebagian jam pelatihan tatap muka di ruang meeting dan sebagian jam pelatihan dilakukan online melalui zoom meeting, serta memberikan penugasan mandiri bagi peserta pelatihan.
12. Direktorat Kursus dan Pelatihan berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi/ Organisasi Profesi pembentuk LSK untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran penguji secara mandiri.
13. Disusun rencana tindak lanjut bagi LSK untuk melengkapi data dukungnya.
14. LSK menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi aplikasi uji kompetensi secara mandiri untuk pengelola TUK dan penguji uji kompetensi.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Perealisasian indikator kinerja dilaksanakan dalam beberapa program kegiatan dengan metode *blended* yakni luring dan daring.

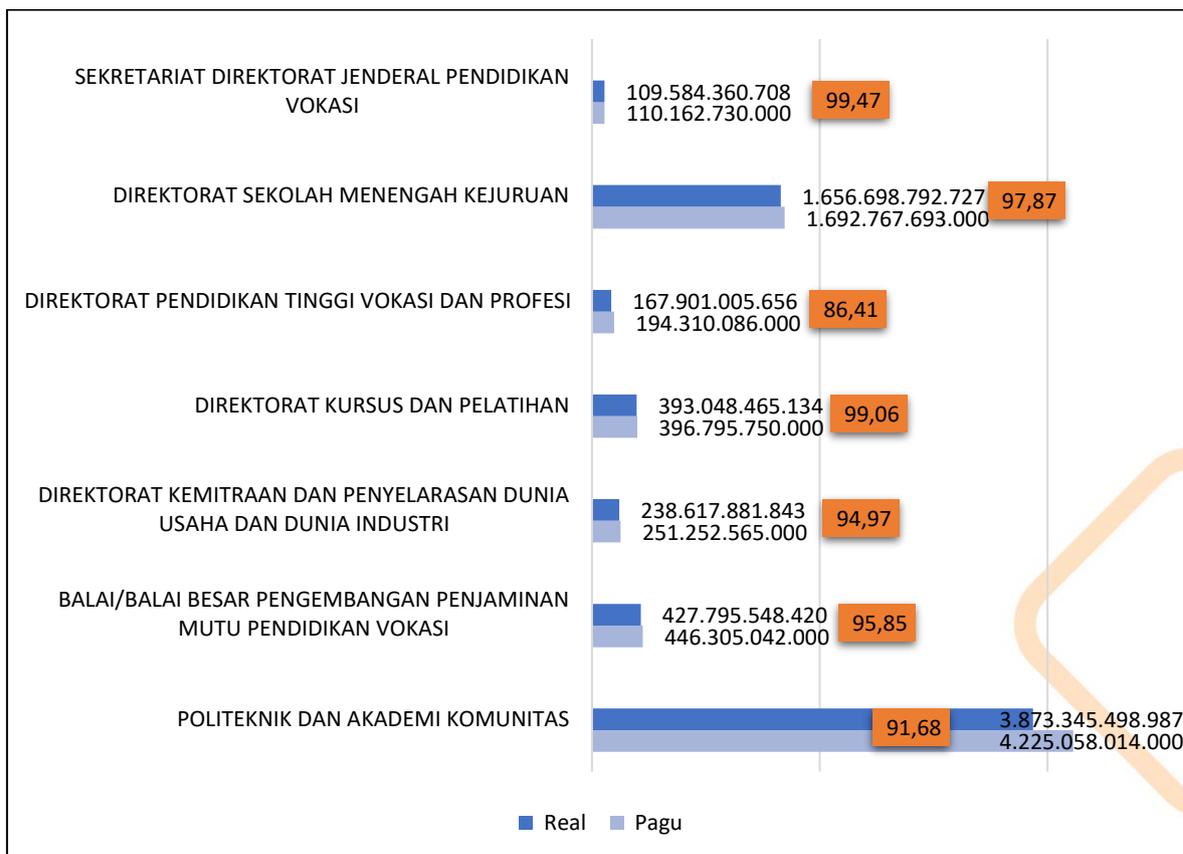
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi SDM instruktur dan pengelola dilakukan dengan metode pengimbasan, dimana Lembaga yang instruktur dan pengelolanya telah mengikuti pelatihan di IDUKA memiliki tugas untuk membuat rencana tindak lanjut berupa pengimbasan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang telah didapatkan dari proses pelatihan di IDUKA kepada Lembaga kursus dan pelatihan yang ada di wilayah di sekitarnya.
3. Mengoptimalkan peran organisasi mitra baik lembaga kursus dan pelatihan maupun organisasi mitra lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pengelola LKP dan bagi para penguji uji kompetensi.

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja revisi adalah sebesar Rp7.298.471.292.000, namun setelah penyusunan perjanjian kinerja revisi, masih terjadi penambahan pagu pada beberapa satuan kerja yang berasal dari hibah dalam negeri, sehingga pagu anggaran berubah menjadi sebesar Rp7.320.509.480.000 dan terealisasi sebesar Rp6.870.735.304.931 dengan persentase 93,86%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) SP dengan 16 (enam belas) IKP yang terdistribusi ke 59 (lima puluh sembilan) satker, yaitu 5 (lima) satker Pusat, 47 (empat puluh tujuh) Politeknik dan AKN, dan 7 (tujuh) Balai/Balai Besar.



Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021



Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2021, Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp513.848.395.000 melalui mekanisme refocusing untuk mendukung penanganan covid-19.

| No | Tahapan Refocussing | Total Anggaran Refocusing | Sumber Refocusing | Dasar Refocusing |
|----|---------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | Tahap 1 | 100.000.000.000 | Belanja Barang (honor, meeting, perjadi) dan Belanja Modal | Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 |
| 2 | Tahap 2 | 35.245.201.000 | Belanja Pegawai (tunjangan kinerja THR, tunjangan kinerja gaji ke-13) | Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 |
| 3 | Tahap 3 | 244.011.179.000 | Belanja Barang dan Belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) | Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 |

| No | Tahapan Refocussing | Total Anggaran Refokusing | Sumber Refokusing | Dasar Refokusing |
|----|---------------------|---------------------------|---|---|
| 4 | Tahap 4 | 134.592.015.000 | Belanja Barang, Belanja modal dan Belanja Pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) baik belanja ops maupun non ops | Surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 |
| | Jumlah | 513.848.395.000 | | |

Cross Cutting/Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi

Dalam rangka pelaksanaan program *link and match 8+i*, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan kolaborasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendikbudristek, hal ini tentunya dilakukan untuk mendorong ketercapaian program-program Ditjen Pendidikan Vokasi. Adapun kolaborasi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi diantaranya Kampus Merdeka, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kedaireka dan *Matching Fund*, Magang Studi Independen Bersertifikat, Kampus Mengajar, Praktisi Mengajar, IISMA-IIVOSMA, Wirausaha Merdeka, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PAK Kenaikan Pengkat Dosen, dll.
2. Kolaborasi dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan diantaranya Kurikulum Prototype, Rapor Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dll.
3. Kolaborasi dengan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan diantaranya Strategi Manajemen Guru SMK (kualitas dan pemenuhan jumlah guru), Pelatihan Dan Pengembangan Kapasitas Guru dan Kepala SMK, dll.
4. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah diantaranya Sinergi dengan Pemda untuk berbagai program (Sekolah Penggerak, Rapor Pendidikan), dll.
5. Kolaborasi dengan Ditjen Kebudayaan diantaranya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dll.
6. Kolaborasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diantaranya Penerapan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di berbagai Satuan Pendidikan Vokasi, dll.

7. Kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal diantaranya terkait pengawalan dan berbagai support untuk seluruh program.
8. Kolaborasi dengan Sekretariat Jenderal untuk hampir semua program yang dilakukan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Inovasi yang Dilakukan

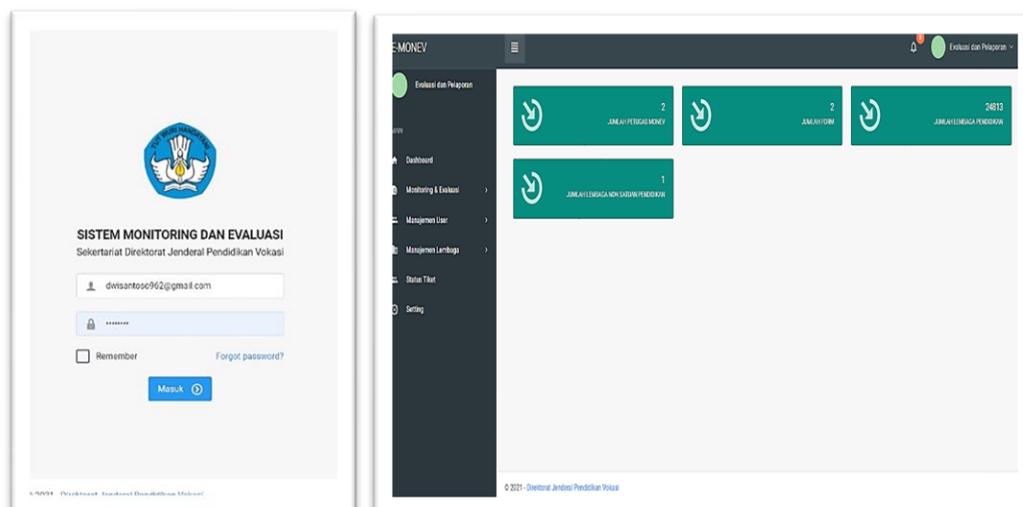
| No | Nama Satker | Inovasi |
|----|---|---|
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SikermaDiksi 2. Aplikasi E-Monev Diksi 3. Aplikasi Dapodik Vokasi |
| 2 | Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan | Aplikasi Takola SMK |
| 3 | Direktorat Kursus dan Pelatihan | Aplikasi Kursus Daring |
| 4 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Dan Unggulan Survey dan Pemetaan 2. SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa) 3. SIA |
| 5 | Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian | VEDCA Mobile Training |
| 6 | Politeknik Negeri Jember | Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran atau SIRAKA (https://siraka.polije.ac.id/auth) |
| 7 | Politeknik Negeri Ketapang | Penerapan Sistem Informasi pada Absensi Pegawai |
| 8 | Politeknik Negeri Batam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Exo 2. IC TQFP (Thin Quad Flat Package) 3. Sistem Informasi P3M (SIMP3M) 4. Alat Disinfektan untuk Barang 5. Bilik Sterilisasi 6. Ultraviolet Disinfection Robot |
| 9 | Politeknik Negeri Tanah Laut | Aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Terpadu) yang melayani seluruh aktivitas akademik dan pembelajaran yg melayani seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kpendidikan. |
| 10 | Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Galeri Kejuruan 2. Ship Simulator 3. Green Manajemen System |
| 11 | Politeknik Negeri Samarinda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi layanan mahasiswa; sistem informasi tracer study 2. Sistem informasi pengelolaan UKT 3. Sistem informasi pembayaran sumbangan pendidikan, Sistem informasi SIAK 4. Sistem informasi e-learning 5. Sistem informasi monitoring pengajaran 6. Sistem informasi penjaminan mutu internal 7. Sistem informasi pendaftaran wisuda online |

| No | Nama Satker | Inovasi |
|----|--|---|
| | | 8. Sistem informasi logbook kepegawaian 9. Sistem informasi BMN 10. Sistem informasi palgiarism. |
| 12 | Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | 1. Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri bagi Dosen PT Vokasi 2021 2. Pembentukan Akselerator Daerah melalui Menara Vokasi 2021 3. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan PTPPV 2021 |

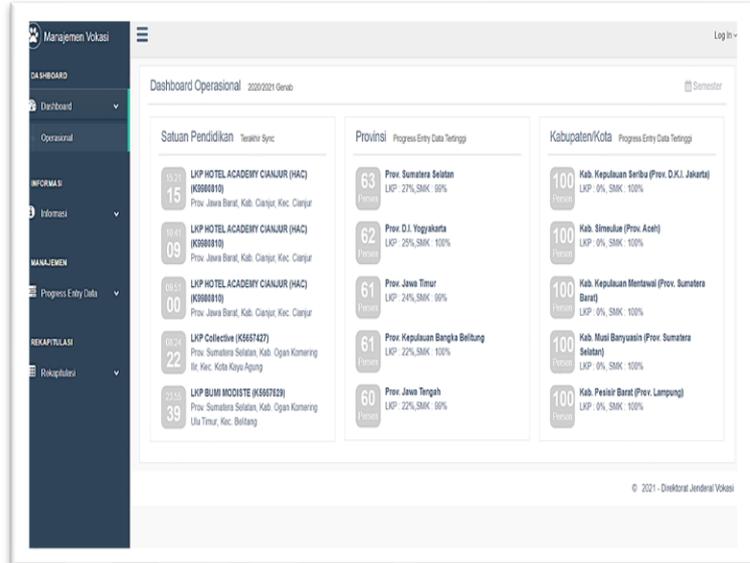
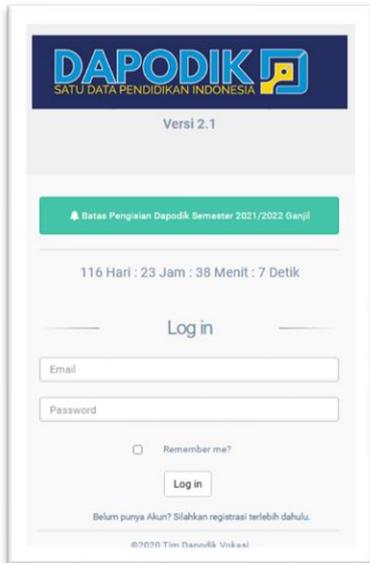
Aplikasi Sikerma Diksi



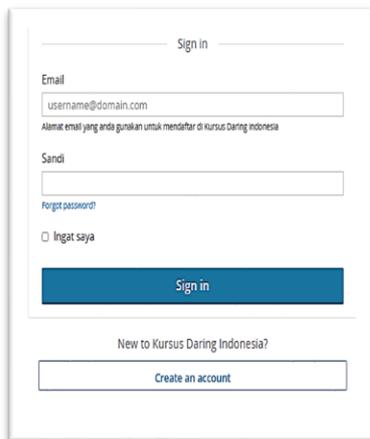
Aplikasi E-Monev Diksi



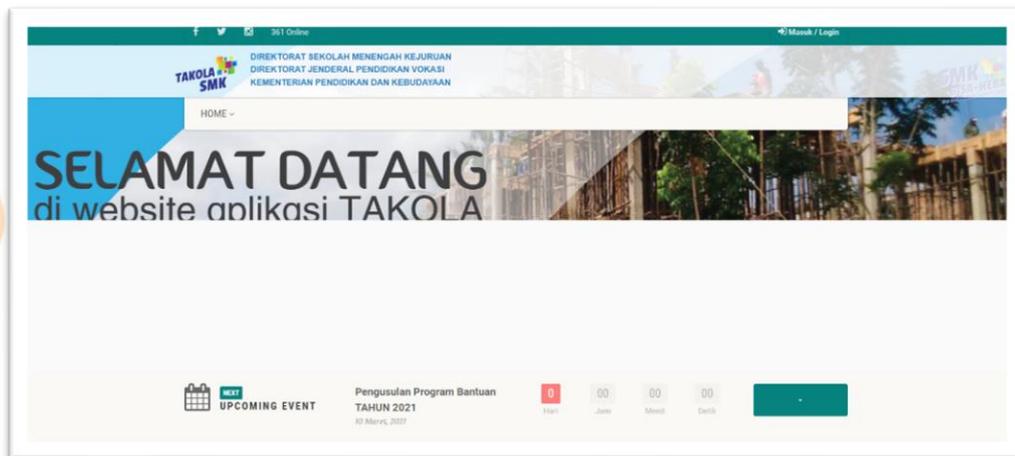
Aplikasi Dapodik Vokasi



Aplikasi Kursus Daring



Aplikasi Takola SMK



Channel Youtube Ditjen Pendidikan Vokasi



Penghargaan yang Dicapai









BAB IV PENUTUP

04



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Diksi



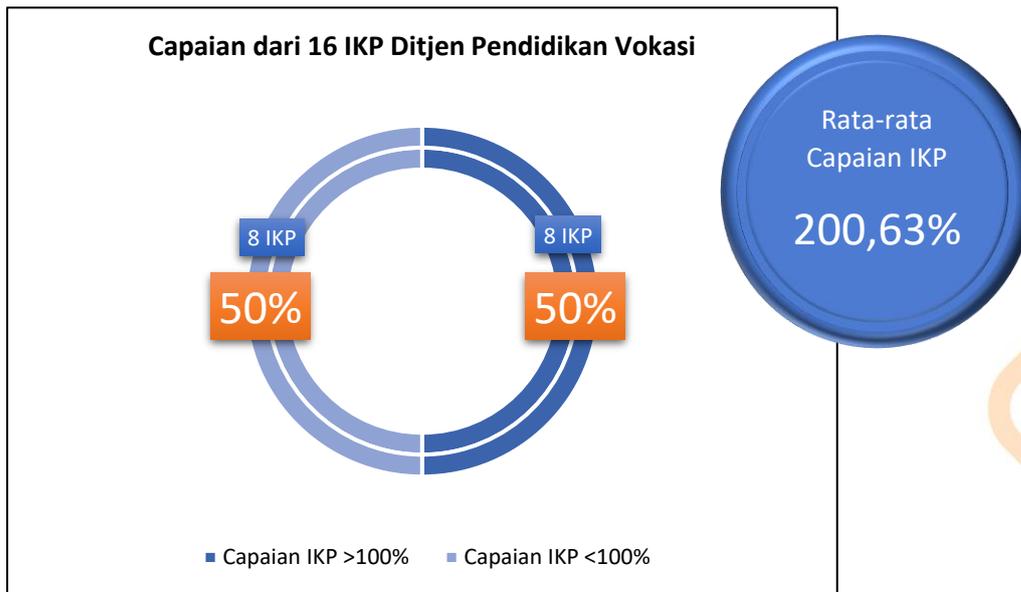
@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, terdapat 4 Sasaran Program yang didukung dengan 16 Indikator Kinerja Program. Dari 16 Indikator Kinerja Program, sebanyak 8 Indikator Kinerja Program telah tercapai melebihi target yang ditentukan, sedangkan 8 Indikator Kinerja Program masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Ringkasan Masalah

1. Pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Ditjen Pendidikan Vokasi. Keterserapan lulusan vokasi di DUDI pun menjadi berkurang karena perusahaan yang terkena dampak belum melakukan perekrutan.

- Selain itu, lulusan vokasi yang sudah bekerja pun ikut terkena dampak pada gaji yang diterima belum memenuhi UMR atau lebih.
2. Kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran maupun pelatihan menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran dan pelatihan yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. Kemudian, beberapa industri mitra bagi SMK yang telah menyelenggarakan pembelajaran *teaching factory* di sekolah juga mengalami penurunan produksi yang juga berdampak pada ketercapaian pelaksanaan pembelajaran *teaching factory* di sekolah.
 3. Status BLUD bagi SMK merupakan wewenang penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga Ditjen Pendidikan Vokasi hanya mampu memberikan upaya dengan memfasilitasi berupa pendampingan bagi SMK agar menjadi BLUD. Disamping itu, Pemerintah Daerah menyampaikan belum adanya regulasi yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah belum berani untuk menetapkan SMK yang telah difasilitasi Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat SMK untuk mendapatkan status BLUD.
 4. Belum ada PTN Vokasi yang siap dan memenuhi syarat untuk menjadi PTNBH.
 5. Peralatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan pembelajaran *teaching factory* belum memadai untuk di beberapa SMK.
 6. Penghitungan melalui data sakernas untuk lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dirilis di bulan Februari tahun 2021 sehingga lulusan yang mendapatkan pekerjaan di bulan setelahnya menjadi tidak terhitung.
 7. Masih ada kompetensi lulusan SMK yang belum memenuhi standar industri, sehingga pihak industri belum bisa memberikan gaji sebesar 1x UMR.

Langkah-langkah Tindak Lanjut

1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri, serta meningkatkan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Proses pembelajaran dan pelatihan dilakukan secara *blended*, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan

secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. Terkait visitasi ke IDUKA dijadwalkan ulang Ketika PPKM telah dilonggarkan.

3. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA, dan pemerintah desa dengan memfasilitasi pemerintah desa untuk melibatkan SMK dalam pelaksanaan program melalui pemanfaatan dana desa. Kemudian, sekolah dapat membantu desa dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki desa, selain itu juga diarahkan untuk membantu desa dalam rangka penanganan covid 19 yang ada di lingkungan sekolah.
4. Melakukan sosialisasi dan pemetaan kepada PTN Vokasi tentang persyaratan dan keuntungan yang didapatkan jika menjadi PTNBH, untuk mendorong PTN Vokasi mempersiapkan persyaratan dan kemudian dibina menjadi PTNBH.
5. Memberikan pendampingan pelaksanaan program dengan melibatkan pendidikan tinggi vokasi untuk membantu mengawal kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dimana PT Vokasi pendamping diarahkan untuk membantu melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan SMK, pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan tata kelola sekolah serta evaluasi pelaksanaan programnya agar sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan. Disamping itu, mendorong pelibatan dunia industri untuk membantu dalam transfer *knowledge* sebagai bentuk capaian *link and match* 8+i di sekolah.
6. Keberlanjutan model pembelajaran berbasis *teaching factory* akan kembali dilaksanakan disaat pandemi sudah usai. Tentunya perlu usaha yang lebih berat dengan kondisi usai pandemi yang menyebabkan usaha produksi yang sebelumnya telah berjalan di sekolah harus dilaksanakan kembali dengan keterbatasan sumber daya yang ada.
7. Lebih masif dalam peningkatan kompetensi lulusan SMK dengan memastikan pelaksanaan *link and match* 8+i disetiap SMK.

LAMPIRAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 14 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto, Ph.D.

Target Kinerja

| # | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target Perjanjian Kinerja 2021 |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.1] Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 48 |
| | | [IKP 1.2] Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | 66.57 |
| | | [IKP 1.3] Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | 49 |
| | | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | 55.49 |
| | | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | 54.15 |
| | | [IKP 1.6] Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 56.3 |
| 2 | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.1] Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | 2600 |
| | | [IKP 2.2] Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | 4 |
| | | [IKP 2.3] Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | 15 |
| | | [IKP 2.4] Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | 1.3 |
| | | [IKP 2.5] Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | 8 |
| 3 | [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.1] Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi | 300 |
| | | [IKP 3.2] Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | 50 |
| | | [IKP 3.3] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH | 2 |
| | | [IKP 3.4] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | 4 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 4 | [SP 4] Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | [IKP 4.1] Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | 100 |
|---|---|--|-----|

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|--|------------------------------|
| 1 | 4262 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 1.732.685.831.000 |
| 2 | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi | Rp. 449.386.157.000 |
| 3 | 4264 | Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | Rp. 260.719.815.000 |
| 4 | 4278 | Pembinaan Kursus dan Pelatihan | Rp. 357.345.669.000 |
| 5 | 4466 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | Rp. 328.136.183.000 |
| 6 | 4467 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | Rp. 1.335.251.491.000 |
| 7 | 4468 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi | Rp. 206.267.245.000 |
| 8 | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | Rp. 2.748.085.342.000 |
| | | TOTAL | Rp. 7.417.877.733.000 |

Jakarta, 14 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto, Ph.D.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Sakarinto

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto

Target Kinerja

| # | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target Perjanjian Kinerja 2021 |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.1] Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 48 |
| | | [IKP 1.2] Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | 66.57 |
| | | [IKP 1.3] Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | 49 |
| | | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | 55.49 |
| | | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | 54.15 |
| | | [IKP 1.6] Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | 56.3 |
| 2 | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.1] Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | 2600 |
| | | [IKP 2.2] Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | 4 |
| | | [IKP 2.3] Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | 15 |
| | | [IKP 2.4] Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | 1.3 |
| | | [IKP 2.5] Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | 8 |
| 3 | [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.1] Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi | 300 |
| | | [IKP 3.2] Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | 50 |
| | | [IKP 3.3] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH | 2 |
| | | [IKP 3.4] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | 4 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 4 | [SP 4] Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | [IKP 4.1] Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | 100 |
|---|---|--|-----|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|--|------------------------------|
| 1 | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | Rp. 2.545.838.569.000 |
| 2 | 4262 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 1.642.085.949.000 |
| 3 | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi | Rp. 244.333.570.000 |
| 4 | 4264 | Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | Rp. 223.307.288.000 |
| 5 | 4278 | Pembinaan Kursus dan Pelatihan | Rp. 371.207.848.000 |
| 6 | 4466 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | Rp. 289.116.801.000 |
| 7 | 4467 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | Rp. 1.807.792.967.000 |
| 8 | 4468 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi | Rp. 174.788.300.000 |
| | | TOTAL | Rp. 7.298.471.292.000 |

Jakarta, 15 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto



**Pengukuran Indikator Kinerja Program
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Program

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target PK | Target Renaksi Triwulanan | Capaian Triwulanan | Analisis Progress Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|---|--|--|
| 1 | [SP 1] Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.1] Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 48 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 48 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 45.52 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 1 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. program yang mendukung atas tercapainya IKP 1.1 diantaranya adalah SMK Pusat keunggulan, Siswa SMK yang tersertifikasi, SMK yang mengembangkan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan, SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas, dan Kurikulum SMK yang dikembangkan sesuai kebutuhan IDUKA.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan di DUDI, karena banyak perusahaan yang terkena dampak sehingga belum melakukan perekrutan, dan wirausaha di beberapa kompetensi yang belum memungkinkan dibuka di kondisi pandemi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Pengadaan program magang. 4. Guru tamu dari industri.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 2 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. program yang mendukung atas tercapainya IKP 1.1 diantaranya adalah SMK Pusat keunggulan, Siswa SMK yang tersertifikasi, SMK yang mengembangkan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan, SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas, dan Kurikulum SMK yang dikembangkan sesuai kebutuhan IDUKA.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan di DUDI, karena banyak perusahaan yang terkena dampak sehingga belum melakukan perekrutan, dan wirausaha di beberapa kompetensi yang belum memungkinkan dibuka di kondisi pandemi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Pengadaan program magang. 4. Guru tamu dari industri.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 3 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. program yang mendukung atas tercapainya IKP 1.1 diantaranya adalah SMK Pusat keunggulan, Siswa SMK yang tersertifikasi, SMK yang mengembangkan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan, SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas, dan Kurikulum SMK yang dikembangkan sesuai kebutuhan IDUKA.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan di DUDI, karena banyak perusahaan yang terkena dampak sehingga belum melakukan perekrutan, dan wirausaha di beberapa kompetensi yang belum memungkinkan dibuka di kondisi pandemi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Pengadaan program magang. 4. Guru tamu dari industri.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : penghitungan pada IKP 1.1 menggunakan data sakernas BPS, dengan metode penghitungan adalah Persentase penduduk usia kerja (PUK) yang lulus SMK/MAK setahun terakhir & bekerja terhadap seluruh PUK yang lulus SMK/MAK setahun terakhir. program yang mendukung atas tercapainya IKP 1.1 diantaranya adalah SMK Pusat keunggulan, Siswa SMK yang tersertifikasi, SMK yang mengembangkan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan, SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas, dan Kurikulum SMK yang dikembangkan sesuai kebutuhan IDUKA.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan di DUDI, karena banyak perusahaan yang terkena dampak sehingga belum melakukan perekrutan, dan wirausaha di beberapa kompetensi yang belum memungkinkan dibuka di kondisi pandemi. 2. Penghitungan melalui data sakernas untuk lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dirilis di bulan Februari tahun 2021 sehingga lulusan yang mendapatkan pekerjaan di bulan setelahnya menjadi tidak terhitung.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pada SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 3. Pengadaan program magang 4. Guru tamu dari industri. 5. Direktorat jenderal pendidikan vokasi melakukan tracer study secara mandiri yang dilakukan oleh direktorat kemitraan dan penyalangan DUDI.</p> |

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|--|--|--|
| 2 | [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.2] Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 66.57 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 66.57 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 54.89 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR pada triwulan 1 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Peningkatan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 2. Penerapan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, yang meliputi penyesuaian kurikulum SMK dengan dunia kerja, penerapan praktek lapangan minimal 1 semester, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, menerapkan program cepat D2, peningkatan peralatan pendidikan sesuai kebutuhan kerja, sertifikasi kompetensi siswa. Kendala / Permasalahan : Biaya sertifikasi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk siswa</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR pada triwulan 2 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Peningkatan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 2. Penerapan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, yang meliputi penyesuaian kurikulum SMK dengan dunia kerja, penerapan praktek lapangan minimal 1 semester, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, menerapkan program cepat D2, peningkatan peralatan pendidikan sesuai kebutuhan kerja, sertifikasi kompetensi siswa. Kendala / Permasalahan : Biaya sertifikasi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk siswa</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR pada triwulan 3 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Peningkatan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 2. Penerapan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, yang meliputi penyesuaian kurikulum SMK dengan dunia kerja, penerapan praktek lapangan minimal 1 semester, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, menerapkan program cepat D2, peningkatan peralatan pendidikan sesuai kebutuhan kerja, sertifikasi kompetensi siswa. Kendala / Permasalahan : Biaya sertifikasi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk siswa</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Penghitungan IKP 1.2 merupakan penghitungan dari data sakernas BPS, dengan metode penghitungan Persentase tenaga kerja lulusan SMK/MAK yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas dengan upah >=UMP terhadap tenaga kerja lulusan SMK/MAK yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas. Program : 1. Peningkatan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 2. Penerapan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, yang meliputi penyesuaian kurikulum SMK dengan dunia kerja, penerapan praktek lapangan minimal 1 semester, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, menerapkan program cepat D2, peningkatan peralatan pendidikan sesuai kebutuhan kerja, sertifikasi kompetensi siswa. Kendala / Permasalahan : 1. Biaya sertifikasi relatif tinggi dan ditanggung masing-masing siswa 2. Karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk siswa 2. Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan magang di perusahaan agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji UMR kepada lulusan</p> |
|---|--|---|---|-------|--|--|--|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|----|---|--|---|
| 3 | [SP 1] Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.3] Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 49 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 49 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 50.16 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 1 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. karena kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. 2. pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. proses pembelajaran dilakukan secara blended, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. 2. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 2 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. karena kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. 2. pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. proses pembelajaran dilakukan secara blended, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. 2. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada triwulan 3 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. karena kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. 2. pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. proses pembelajaran dilakukan secara blended, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. 2. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : pada IKP 1.3 menggunakan data sakernas BPS dengan metode perhitungan Persentase PUK yang lulus PTV setahun terakhir & bekerja terhadap seluruh PUK yang lulus PTV setahun terakhir. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. karena kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran yang membutuhkan praktek sedikit terhambat. 2. pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. proses pembelajaran dilakukan secara blended, materi teori atau praktek yang memungkinkan untuk untuk dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan secara daring, dan praktek yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring akan dilakukan dengan tatap muka terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk zona PPKM level rendah. 2. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> |
|---|--|--|---|----|---|--|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|--|--|---|
| 4 | [SP 1] Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 55.49 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 55.49 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 50.45 | TW1 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, D3 dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 1 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri. TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, D3 dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 2 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri. TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, D3 dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 3 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri. TW4 : Progress / Kegiatan : Penghitungan IKP 1.4 merupakan penghitungan dari data sakernas BPS, dengan metode penghitungan Persentase tenaga kerja lulusan D1-3 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas dengan upah >=UMP terhadap tenaga kerja lulusan D1-3 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : 1. pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. 2. karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK Strategi / Tindak Lanjut : 1. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri. 2. melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan magang di perusahaan agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji UMR kepada lulusan |
|---|--|---|---|-------|--|--|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|--|--|---|
| 5 | [SP 1] Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 54.15 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 54.15 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 42.41 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D4/sarjana terapan dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 1 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4 Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D4/sarjana terapan dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 2 masih belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk persentase pekerja lulusan Politeknik D4/sarjana terapan dengan gaji minimum 1.2x UMR pada triwulan 3 belum bisa dilakukan pengukuran karena perhitungannya menggunakan data sakernas, dan kemungkinan perhitungan hasil sakernas baru didapatkan pada triwulan 4 Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi ketersediaan lulusan, karena kebutuhan tenaga kerja berkurang. Strategi / Tindak Lanjut : Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Penghitungan IKP 1.5 merupakan penghitungan dari data sakernas BPS, dengan metode penghitungan Persentase tenaga kerja lulusan D4 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas dengan upah >=UMP terhadap tenaga kerja lulusan D4 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas. Program : 1. Penerapan kurikulum link and match pada program studi vokasi 2. Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri 3. Program kampus merdeka yang dilakukan di masing-masing pendidikan tinggi vokasi 4. Pendidikan tinggi vokasi yang mendukung kebutuhan industri 5. Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi Kendala / Permasalahan : karena pandemi, sehingga banyak pegawai yang terdampak pengurangan gaji dari perusahaannya bahkan banyak juga pegawai yang terkena PHK Strategi / Tindak Lanjut : 1. kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri. 2. melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan magang di perusahaan agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan gaji UMR kepada lulusan</p> |
|---|--|---|---|-------|--|--|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|--|--|---|
| 6 | [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.6] Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 56.3 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 15 TW4 : 56.3 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 68.96 | TW1 : Progress / Kegiatan : Program : PKK, PKW Progres : 1. Sedang dalam tahap penetapan untuk 1800 peserta program PKW (tahap 1) 2. Sedang dalam tahap penetapan 5306 peserta PKK (tahap 1) Kendala / Permasalahan : 1. Pengembangan aplikasi menyebabkan terjadinya perubahan teknis dalam proses verifikasi. 2. Adanya perubahan skema program, dimana sebelumnya pencairan dilakukan sebelum laporan awal, sekarang pencairan dilakukan setelah laporan awal, sehingga proses pencairan lebih lama. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Percepatan proses verifikasi melalui koordinasi yang intensif dengan tim verifikator melalui WA grup. 2. Memberikan arahan kepada lembaga agar selalu memanfaatkan aplikasi banper kursus untuk memantau perkembangan proses pengajuan, sehingga disaat pengajuan diterima lembaga bisa segera mengirimkan laporan awalnya. TW2 : Progress / Kegiatan : 1. sebanyak 16.865 peserta didik telah memperoleh program kecakapan kerja (PKK) dari target 50.000 orang, dan sedang dalam proses SK sebanyak 5.700 peserta didik. 2. sebanyak 10.827 peserta didik telah memperoleh program kecakapan wirausaha (PKW) dari target 16.676 orang, dan sedang proses SK sebanyak 2.205 peserta didik. Kendala / Permasalahan : 1. pandemi covid 19 menyebabkan banyak lembaga yang menunda pembelajaran karena status wilayah zona merah dan zona hitam 2. dunia kerja masih belum berani menerima lulusan karena dampak pandemi covid. 3. untuk program PKW terkendala akses modal di bank. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Beberapa jenis keterampilan yang bisa diajarkan secara daring, melaksanakan pembelajaran secara daring 2. Pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk materi2 yang bersifat teori TW3 : Progress / Kegiatan : 1) sebanyak 33.579 peserta didik telah memperoleh program kecakapan kerja (PKK) dari target 50.000 orang, penyaluran bantuan hingga 8 tahap, dilaksanakan april-desember, sebanyak 3.787 peserta didik sedang dalam tahap magang di IDUKA dan sebanyak 4.843 peserta didik telah bekerja. 2) sebanyak 17.817 peserta didik telah memperoleh program kecakapan wirausaha (PKW) dari target 16.676 orang, penyaluran bantuan hingga tw 3 sampai 9 tahap dan akan ada tahapan selanjutnya karena penambahan anggaran, dan 1.742 peserta didik telah berwirausaha. Kendala / Permasalahan : 1) pandemi covid 19 menyebabkan banyak lembaga yang menunda pembelajaran karena status wilayah zona merah dan zona hitam. 2) dunia kerja masih belum berani menerima lulusan karena dampak pandemi covid. 3) untuk program PKW terkendala akses modal di bank. Strategi / Tindak Lanjut : 1) beberapa jenis keterampilan yang bisa diajarkan secara daring, melaksanakan pembelajaran secara daring 2) pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk materi2 yang bersifat teori 3) melakukan magang di industri 4) dari LKP melakukan koordinasi dengan bank atau dengan lembaga permodalan seperti koperasi. TW4 : Progress / Kegiatan : Data yang digunakan merupakan hasil tracer study yang dilakukan oleh direktorat kemitraan dan penyaluran DUDI. dengan capaian 68,96% , angka ini diperoleh dari perhitungan jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja sebanyak 144.600 orang dan berwirausaha sebanyak 130.639 orang dibagi jumlah lulusan kursus dan pelatihan sebanyak 399.103 orang. Kegiatan : 1) sebanyak 63.689 atau 127,38% peserta didik telah memperoleh program kecakapan kerja (PKK) dari target 50.000 orang, penyaluran bantuan dilakukan sebanyak 13 tahap, dilaksanakan april-desember, sebanyak 3.787 peserta didik sedang dalam tahap magang di IDUKA dan sebanyak 4.843 peserta didik telah bekerja. 2) sebanyak 22.437 atau 105,35% peserta didik telah memperoleh program kecakapan wirausaha (PKW) dari target 16.676 orang, penyaluran bantuan dilakukan sebanyak 13 tahap, dan 1.742 peserta didik telah berwirausaha. Kendala / Permasalahan : 1) pandemi covid 19 menyebabkan banyak lembaga yang menunda pembelajaran karena status wilayah zona merah dan zona hitam. 2) dunia kerja masih belum berani menerima lulusan karena dampak pandemi covid. 3) untuk program PKW sebelum nya sempat terkendala akses modal di bank. Strategi / Tindak Lanjut : 1) beberapa jenis keterampilan yang bisa diajarkan secara daring, melaksanakan pembelajaran secara daring 2) pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk materi2 yang bersifat teori 3) melakukan magang di industri 4) dari LKP melakukan koordinasi dengan bank atau dengan lembaga permodalan seperti koperasi. |
|---|--|--|---|------|--|--|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------|---|---|--|
| 7 | [SP 2] Meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.1] Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri | orang | 2600 | TW1 : 140 TW2 : 1990 TW3 : 2440 TW4 : 2600 | TW1 : 658 TW2 : 1794 TW3 : 4149 TW4 : 6724 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pelatihan telah dilaksanakan yang bersifat berkelanjutan dari tahun 2020, 564 orang peserta guru tercatat mengikuti pelatihan secara daring e-commerce hospitality. untuk Pelatihan kepala SMK dilakukan sebanyak 94 orang se Papua dan Papua Barat, bersama Dinas Provinsi terkait, dan industri sebagai penguatan program link and match. Jadi untuk pelaksanaan program tercapai sebanyak 658 orang dari target 140 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Merujuk dari tahun sebelumnya, ada beberapa poin khususnya materi pelatihan guru SMK yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada (covid 19).</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mematangkan program dan sasaran bersama BBPMPV dan Industri Terkait. 2. Sedang dilakukan pembahasan mengenai PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Universitas selaku mitra strategis dalam melaksanakan program ini. 3. melakukan kerjasama dengan GSM (gerakan Sekolah menyenangkan) untuk menyelenggarakan pelatihan (yang salah satunya) di provinsi Papua Barat dan Papua</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Di triwulan 2 ini, sebanyak 1136 orang peserta, yang terdiri dari guru SMK dan wakil kepala sekolah. Guru dan wakil kepala sekolah ini berasal dari SMK PK. Pelatihan yang diikuti adalah : 1. digital marketing strategi bagi kepala sekolah sebanyak 375 orang 2. sosial media marketing untuk wakil kepala sekolah dan guru sebanyak 378 orang. 3. e-commerce industri perhotelan sebanyak 564 orang (tw 1) 4. diklat komite pembelajaran sebanyak 383 orang. pelaksanaan pada tanggal 11 Juni - 07 Juli 2021.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. karena ada kebijakan PPKM dan pelarangan keluar kota dari pemda, mengakibatkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara tatap muka. 2. masih menunggu penetapan kurikulum paradigma baru SMK, 3. ada beberapa SMK PK belum melakukan pengajuan SDM yang akan dilatih, karena ada kendala teknis, seperti adanya pergantian wakil kepala sekolah bidang kurikulum sehingga data dapodik belum diupdate.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. pelatihan akan dilakukan secara daring, dan menunggu kebijakan PPKM selanjutnya. 2. koordinasi dengan direktorat SMK terkait penetapan kurikulum paradigma baru SMK. 3. akan ada batch selanjutnya untuk diklat komite pembelajaran bagi sekolah yang terkendala dalam melakukan pengajuan SDM yang akan dilatih.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : capaian telah melebihi target karena pelatihan dilaksanakan dengan sistem gabungan secara daring maupun luring. Hingga tw 3 sebanyak 4149 orang peserta, yang diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru yang berasal dari SMK PK. Pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut : 1) peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di BBPMPV/BPPMPV sebanyak 2031 orang (dilakukan secara blended) 2) pelatihan teknik alat berat tingkat advance bagi guru SMK dan widyaiswara balai besar, yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan awal ditahun 2020, yang dilakukan di IDUKA (UT) sebanyak 25 orang (dilakukan semi luring) 3) workshop digital marketing strategy untuk kepala dan wakil kepala sekolah serta workshop sosial media marketing untuk guru SMK yang dilakukan oleh diandra academy, sebanyak 1043 orang (dilakukan luring). 4) pelatihan instalasi perangkat wireless dan microwave huawei batch 1 bagi guru SMK Multimedia, sebanyak 20 orang (secara luring). pelatihan ini masih akan berlanjut hingga desember 2021. 5) pelatihan tata kecantikan rambut untuk guru SMK yang dilaksanakan oleh Loreal Indonesia, sebanyak 17 orang (secara daring). 6) pelatihan kapasitas manajerial bagi kepala SMK yang dilaksanakan di 5 perguruan tinggi (UI, ITB, BINUS, Prasetya Mulya, UNBRAU) dilakukan secara blended, sebanyak 345 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) kebijakan PPKM menyebabkan peserta yang tidak bisa hadir karena keterbatasan transportasi, serta menyebabkan mundurnya jadwal pelatihan. 2) banyak peserta yang tidak mendapatkan izin dari pimpinan karena banyaknya kegiatan yang dilakukan bersamaan 3) adanya refocusing anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian harga.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1) memastikan peserta yang mengikuti dekat dengan lokasi pelatihan baik yang di BBPMPV/BPPMPV maupun IDUKA nya. 2) mencari pengganti peserta yang tidak bisa hadir karena terkendala izin melalui aplikasi SIMPKB. 3) melakukan penjadwalan ulang pelatihan yang belum dilaksanakan. 4) melakukan penyesuaian harga sesuai dengan sisa anggaran yang tersedia.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sasaran pelatihan yang dilakukan adalah guru dan kepala sekolah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama TW4 antara lain: a. Pelatihan bagi guru dan widyaiswara Teknik alat berat bekerjasama dengan United Tractor School (7 orang) b. Pelatihan Digital Marketing dan Social Media Marketing untuk guru SMK (1617 orang) c. Pelatihan Instalasi Perangkat Wireless dan Microwave untuk guru SMK (100 orang) d. Workshop Gerakan Sekolah Menyenang Bagi kepala SMK (420 orang) e. ToT Pelatih di tempat Kerja kerjasama dengan KADIN INDONESIA (39 orang)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program ini adalah: a. Jadwal yang sangat padat sehingga menyita sumber daya yang ada b. Terdapat peserta yang tidak bisa hadir c. Karena tidak mendapatkan izin dari atasan langsung</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut: a. Merubah pola pelatihan jika terdapat pergeseran anggaran maupun kebijakan PPKM/lockdown b. Melakukan penjadwalan secara paralel (padat dan efektif) sehingga seluruh rangkaian pelatihan bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati. c. mengubah skema pelatihan yang tadinya luring menjadi daring sehingga bisa menjangkau lebih banyak peserta</p> |
|---|---|---|-------|------|---|---|--|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 8 | [SP 2] Meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.2] Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian | % | 4 | TW1 : 3.41 TW2 : 3.41 TW3 : 3.41 TW4 : 4 | TW1 : 0 TW2 : 2.72 TW3 : 2.72 TW4 : 6.28 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada proses seleksi tahap 1 sudah ditetapkan sebanyak 611 SMK yang menjadi SMK PK, dari total SMK 14.339 SMK. Capaian ini akan ditindaklanjuti dengan seleksi tahap berikutnya, dimana untuk tahun 2021 ini akan ada 895 sekolah yang di kembangkan menjadi Center of Excellence</p> <p>Kendala / Permasalahan : tidak ada kendala</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong dan memberikan rekomendasi sekolah di wilayahnya untuk mengikuti seleksi SMK PK</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sampai saat ini telah dilaksanakan bimtek kepada SMK yang telah ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Untuk SK penetapan SMK PK sendiri telah terbit sampai tahap 2, dengan rincian: 1. SK Dirjen nomor 22/D/O/2021 tanggal 20 April 2021, ditetapkan sebanyak 611 SMK (Tahap 1) 2. SK Dirjen nomor 29/D/DM/2021 tanggal 28 Mei 2021, ditetapkan sebanyak 270 SMK (Tahap 2) Dengan demikian sampai dengan tahap 2, 881 SMK yang telah ditetapkan sebagai SMK PK dari total SMK di Indonesia sebanyak 14.339 (dapodik) dengan persentase 6,14%, namun 491 SMK merupakan SMK CoE yang telah ditetapkan di tahun 2020. Sehingga, pada triwulan 2 tahun 2021 sebanyak 390 SMK (2,72%) baru yang ditetapkan menjadi SMK PK.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Adanya pandemi covid-19 menyebabkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga strategi dan penerapan program tidak dapat terdiseminasi dengan baik ke sekolah. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi dalam program ini juga terkendala dikarenakan banyaknya tim SDM pendamping terpapar covid-19 yang menyebabkan rencana target kegiatan menjadi mundur.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi diharapkan mampu membantu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dilakukan tetap dilaksanakan secara daring sekolah masih dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai saat ini telah dilaksanakan bimtek kepada SMK yang telah ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Untuk SK penetapan SMK PK sendiri telah terbit sampai tahap 2, dengan rincian: 1. SK Dirjen nomor 22/D/O/2021 tanggal 20 April 2021, ditetapkan sebanyak 611 SMK (Tahap 1) 2. SK Dirjen nomor 29/D/DM/2021 tanggal 28 Mei 2021, ditetapkan sebanyak 270 SMK (Tahap 2) Dengan demikian sampai dengan tahap 2, sebanyak 881 SMK yang telah ditetapkan sebagai SMK PK dari total SMK di Indonesia sebanyak 14.339 (dapodik) dengan persentase 6,14%, namun 491 SMK merupakan SMK CoE yang telah ditetapkan di tahun 2020. dan, pada triwulan 2 tahun 2021 sebanyak 390 SMK baru yang ditetapkan menjadi SMK PK.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) Adanya pandemi covid-19 menyebabkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga strategi dan penerapan program tidak dapat terdiseminasi dengan baik ke sekolah. 2) Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi dalam program ini juga terkendala dikarenakan banyaknya tim SDM pendamping terpapar covid-19 yang menyebabkan rencana target kegiatan menjadi mundur.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi diharapkan mampu membantu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. 2) Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi tetap dilaksanakan secara daring agar sekolah masih dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dalam mendukung program link and super match 8+i beberapa program dilaksanakan sebagai bentuk intervensi untuk ketercapaian sasarannya. Salah satu diantaranya adalah program pengembangan SMK untuk menjadi Center of Excellence atau Pusat Keunggulan. Pada tahun 2021 Direktorat SMK melaksanakan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan, sebanyak capaian sebanyak 901 sekolah dari 14.339 SMK seluruh Indonesia yang diberikan fasilitasi bantuan melalui APBN. Sebanyak 471 SMK merupakan sekolah yang diberikan program bantuan lanjutan berupa pengembangan manajemen dengan program bantuan berupa peningkatan kualitas sarana prasarana telah diberikan pada tahun 2020. Disamping itu, sebanyak 430 SMK merupakan sekolah baru yang mendapatkan program bantuan untuk peningkatan sarana prasarana pada tahun 2021. Sementara itu pelaksanaan pendampingan melalui pelibatan PT Vokasi dilakukan kepada semua sekolah yang telah ditetapkan untuk program pengembangan SMK Pusat Keunggulan.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga strategi dan penerapan program tidak dapat terdiseminasi dengan baik ke sekolah. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi dalam program ini juga terkendala dikarenakan banyaknya tim SDM pendamping terpapar covid-19 yang menyebabkan rencana target kegiatan menjadi mundur. 2. Beberapa sekolah yang terpilih tidak mempunyai kondisi capaian standar yang sama sehingga perlu treatment berbeda untuk masing-masing SMK. Hal ini menyebabkan perlakuan yang harus diberikan kepada SMK menjadi berbeda-beda sementara waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan programnya cukup mepet. Keterbatasan SDM di Direktorat SMK dalam memberikan fasilitasi dan evaluasi kepada SMK pelaksana program menjadikan kemungkinan kegiatan agak terlambat, sehingga diperlukan treatment lainnya agar program berjalan sesuai rencana.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelibatan pendamping dari Perguruan Tinggi diharapkan mampu membantu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dilakukan tetap dilaksanakan secara daring sekolah masih dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana. 2. Memberikan pendampingan pelaksanaan program dengan pelibatan Perguruan Tinggi Vokasi untuk membantu mengawal kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dimana PT Vokasi pendamping diarahkan untuk membantu melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan SMK, pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan tata kelola sekolah serta evaluasi pelaksanaan programnya agar sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan. Disamping itu, Direktorat SMK untuk mendorong pelibatan dunia industri untuk membantu dalam transfer knowledge sebagai bentuk capaian link and match 8+i di sekolah.</p> |
|---|---|---|---|---|---|---|--|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|--|
| 9 | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.3] Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 15 | TW1 : 11.48 TW2 : 11.48 TW3 : 11.48 TW4 : 15 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 15.09 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : IKP ini didukung oleh program penguatan kelembagaan SMK dengan pemerintah desa dalam rangka pemanfaatan sumber daya SMK, SMK yang mengembangkan produk kreatif, dan SMK yang mengembangkan teaching factory. Saat ini, masih dalam tahap penyusunan juknis, dan telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Untuk capaian ini merupakan capaian tahun 2020, dimana untuk IKP ini targetnya kumulatif, sementara untuk tw 1 tahun 2021 masih belum ada capaian.</p> <p>Kendala / Permasalahan : tidak ada kendala karena untuk triwulan 1 masih terjadwal untuk penyusunan juknis.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA, dan pemerintah desa. 2. Mefasilitasi pemerintah desa untuk melibatkan SMK dalam pelaksanaan program melalui pemanfaatan dana desa.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Melalui program SMK membangun Desa diharapkan SDM/resource yang dimiliki SMK dapat bermanfaat bagi stakeholder di sekitar lingkungannya. Panduan program sudah selesai disusun dengan beberapa sekolah sudah diberikan bimbingan teknis dengan beberapa sekolah sudah melakukan MoU dengan desa yang berada di sekitar lingkungan sekolah</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa guru pembimbingan program terkena atau terpapar covid-19 sehingga program yang dijadwalkan sudah dapat melakukan koordinasi dengan perangkat desa menjadi mundur.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Sekolah membantu desa dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada dimiliki desa, selain itu juga diarahkan untuk membantu desa dalam rangka penanganan covid-19 yang ada di lingkungan sekolah.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : 1. Melalui program SMK membangun Desa diharapkan SDM/resource yang dimiliki SMK dapat bermanfaat bagi stakeholder di sekitar lingkungannya. 2. Panduan program sudah selesai disusun dengan beberapa sekolah sudah diberikan bimbingan teknis dengan beberapa sekolah sudah melakukan MoU dengan desa yang berada di sekitar lingkungan sekolah</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa guru pembimbingan program terkena atau terpapar covid-19 sehingga program yang dijadwalkan sudah dapat melakukan koordinasi dengan perangkat desa menjadi mundur.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Sekolah membantu desa dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada dimiliki desa, selain itu juga diarahkan untuk membantu desa dalam rangka penanganan covid-19 yang ada di lingkungan sekolah.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pelibatan praktisi profesional industri dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan SMK merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di dunia kerja. Hal ini menjadi bagian dari proses transfer knowledge dunia industri terhadap penyiapan lulusan/tenaga kerja yang akan siap untuk terjun dan terserap oleh pasar kerja. Beberapa program yang digulirkan oleh pemerintah melalui Direktorat SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek diantaranya ada program BOS. Dimana salah satu komponen peruntukkannya adalah untuk pembiayaan guru tamu dari mitra industri sekolah untuk memberikan pembelajaran di sekolah. Sampai dengan akhir tahun pemenuhan praktisi profesional industri yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah hampir dilaksanakan oleh 2.164 sekolah dari populasi SMK secara nasional. Dengan jumlah SMK yang sebanyak 14.339 sekolah sehingga dapat didapatkan sekitar 15% SMK secara nasional telah melibatkan praktisi industri untuk terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah mulai dari penyusunan dokumen kurikulum, penyusunan bahan pembelajaran sampai dengan terjun secara langsung dalam pembelajaran. Program lainnya adalah SMK Pusat Keunggulan dan SMK pelaksana LSP-P1, dimana sekolah yang mendapatkan program ini diwajibkan untuk melibatkan praktisi dunia kerja/industri dalam pelaksanaan pembelajarannya di sekolah.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa praktisi yang dilibatkan dalam pembelajaran di sekolah, sebagian besar baru diikutsertakan dalam penyusunan dokumen kurikulum dan penyusunan bahan pembelajaran. Dimana harapannya praktisi/guru tamu dari dunia industri tersebut dapat terlibat langsung dan terjun ke kelas pembelajaran sehingga peserta didik benar-benar mendapatkan materi pembelajaran baik teori maupun praktik dengan penggambaran yang sesuai dengan kondisi di industri. Hal ini disebabkan jam kerja praktisi/guru tamu industri yang memang padat sehingga belum dapat dioptimalkan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Direktorat SMK memberikan kebijakan agar guru-guru di sekolah dapat dimagangkan di industri selama beberapa saat sehingga peserta didik diharapkan mendapatkan gambaran tentang kondisi dan situasi kerja di industri. Menandatangani guru tamu ke sekolah, meskipun hanya untuk menyampaikan materi umum terkait situasi dan budaya kerja di industri. Mendorong kepada sekolah untuk bekerjasama dengan mitra industri dalam rangka pembukaan kelas industri sebagai bentuk link and match lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.</p> |
|---|---|---|---|----|---|--|--|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



| | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----|---|---|---|
| 10 | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.4] Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | % | 1.3 | TW1 : 0.35 TW2 : 0.35 TW3 : 0.35 TW4 : 1.3 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0.45 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Koordinasi dengan pemerintah provinsi agar melakukan pembinaan secara intensif kepada SMK yang akan diusulkan menjadi sekolah berstatus BLUD. Kendala / Permasalahan : 1. Terkendala dalam manajerial sekolah yang belum siap untuk menjadi sekolah berstatus BLUD. 2. Koordinasi dengan pemerintah provinsi kurang maksimal karena dilakukan secara daring. Strategi / Tindak Lanjut : Kepala sekolah mengikuti pelatihan CEO untuk meningkatkan kapabilitas manajerial sekolah.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pembentukan SMK menjadi BLUD menjadikan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan manajemen finansial BLUD harus mengikuti regulasi keuangan daerah sehingga melibatkan kemendagri dalam penyusunan pedoman pelaksanaannya. Dimana sampai dengan saat ini progress yang sedang dilaksanakan adalah penyusunan pedoman pelaksanaan BLUD di SMK dengan pihak Kemendagri Kendala / Permasalahan : SMK dengan status BLUD membutuhkan regulasi serta payung hukum yang lebih memadai sehingga dalam penyusunan pedomannya diperlukan ketelitian dan reviu yang lebih seksama. Dengan adanya kondisi pandemik covid-19 yang semakin meningkat, proses koordinasi dan penyusunan pedoman serta dokumen lainnya mengalami kendala dikarenakan keterbatasan dalam pembahasannya. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi melalui daring untuk mengantisipasi keterbatasan waktu dan tempat sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan jadwal serta target.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pembentukan SMK menjadi BLUD menjadikan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan manajemen finansial BLUD harus mengikuti regulasi keuangan daerah sehingga melibatkan kemendagri dalam penyusunan pedoman pelaksanaannya. Dimana sampai dengan saat ini progress yang sedang dilaksanakan adalah penyusunan pedoman pelaksanaan BLUD di SMK dengan pihak Kemendagri Kendala / Permasalahan : SMK dengan status BLUD membutuhkan regulasi serta payung hukum yang lebih memadai sehingga dalam penyusunan pedomannya diperlukan ketelitian dan reviu yang lebih seksama. Dengan adanya kondisi pandemik covid-19 yang semakin meningkat, proses koordinasi dan penyusunan pedoman serta dokumen lainnya mengalami kendala dikarenakan keterbatasan dalam pembahasannya. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi melalui daring untuk mengantisipasi keterbatasan waktu dan tempat sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan jadwal serta target.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dalam mendorong SMK agar menjadi satuan pendidikan yang mandiri dalam sisi pembiayaan, upaya yang dilakukan adalah pembentukan BLUD bagi SMK Negeri. Hal ini terkait status satuan pendidikan negeri yang menghasilkan produk bernilai profit harus berstatus BLUD. Ditjen Diksi melalui Direktorat SMK telah memberikan fasilitasi kepada SMK yang sudah mempunyai produk untuk didorong mendapatkan status BLUD. Pada tahun 2020 sebanyak 274 sekolah telah diberikan pendampingan agar siap menjadi BLUD, sementara tahun 2021 sebanyak 35 sekolah yang diberikan fasilitasi pendampingan. Dimana capaian sampai dengan tahun 2021 sebanyak 64 SMK yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk berstatus BLUD. Provinsi yang telah menetapkan SMK dari total 14.339 SMK binaannya menjadi BLUD yaitu DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jawa Timur sebanyak 20 sekolah, DI Yogyakarta sebanyak 3 sekolah, Jawa Tengah sebanyak 7 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, dan Sumatera Barat sebanyak 5 sekolah. Direktorat SMK senantiasa koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar memberikan fasilitasi dari sisi yang lain kepada SMK yang telah mempunyai produk yang bisa dikembangkan dan mendapatkan status BLUD. Kendala / Permasalahan : Status BLUD bagi SMK merupakan wewenang penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga Kemendikbudristek hanya memberikan mampu upaya dengan memberikan fasilitasi berupa pendampingan bagi SMK agar menjadi BLUD. Hal inilah yang menjadikan capaian pada IKP ini dirasa belum memenuhi target. Disamping itu, Pemerintah Daerah menyampaikan belum adanya regulasi yang jelas dari Kemendagri sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah belum berani untuk menetapkan SMK yang telah difasilitasi Ditjen Diksi melalui Direktorat SMK untuk berstatus BLUD. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dan sinergi pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan untuk SMK yang akan ditetapkan menjadi satuan pendidikan berstatus BLUD. Disamping itu, Direktorat SMK juga telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan penyusunan pedoman pendirian BLUD pada SMK bagi Pemerintah Daerah. Langkah kedepannya Kemendikbud juga akan menerbitkan regulasi terkait SMK dengan status BLUD sebagai bentuk dukungan terhadap ketercapaian indikator tersebut.</p> |
|----|---|--|---|-----|---|---|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.5] Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | % | 8 | TW1 : 4.87 TW2 : 4.87 TW3 : 4.87 TW4 : 8 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 6.35 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : 1. Memberikan bantuan kepada SMK sesuai kriteria. 2. Memberikan sosialisasi penerapan pembelajaran teaching factory. sementara untuk tw 1 tahun 2021 masih belum ada capaian. Kendala / Permasalahan : Peralatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan pembelajaran teaching factory belum memadai. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan DAK dalam rangka mendorong penerapan pembelajaran teaching factory di SMK. 2. Mendorong SMK untuk bekerjasama dengan industri khususnya dalam pengadaan peralatan pembelaran.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Proses seleksi satuan pendidikan yang akan mendapatkan program pembinaan sebagai SMK yang melaksanakan pembelajaran teaching factory, dimana alokasi anggaran yang minim mengakibatkan target sasaran sedikit sehingga perlu dilakukan proses seleksi yang lebih ketat dan membutuhkan waktu lebih dengan banyaknya satuan pendidikan yang mendaftar. Kendala / Permasalahan : Banyaknya SMK yang mendaftar untuk mendapatkan program, sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam proses seleksi terkait kelengkapan persyaratan yang harus dilakukan verifikasi dan validasi. Strategi / Tindak Lanjut : Menambah personil untuk melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan bagi satuan pendidikan yang mengajukan untuk menjadi calon penerima program pengembangan SMK untuk melaksanakan pembelajaran Tefa (teaching factory).</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Proses seleksi satuan pendidikan yang akan mendapatkan program pembinaan sebagai SMK yang melaksanakan pembelajaran teaching factory, dimana alokasi anggaran yang minim mengakibatkan target sasaran sedikit sehingga perlu dilakukan proses seleksi yang lebih ketat dan membutuhkan waktu lebih dengan banyaknya satuan pendidikan yang mendaftar. Kendala / Permasalahan : Banyaknya SMK yang mendaftar untuk mendapatkan program, sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam proses seleksi terkait kelengkapan persyaratan yang harus dilakukan verifikasi dan validasi. Strategi / Tindak Lanjut : Menambah personil untuk melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan bagi satuan pendidikan yang mengajukan untuk menjadi calon penerima program pengembangan SMK untuk melaksanakan pembelajaran Tefa (teaching factory).</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan adalah Penyelenggaraan model pembelajaran berbasis teaching factory. Penyelenggaraan model pembelajaran berbasis teaching factory menjadi best practice dalam implementasi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Direktorat SMK mendorong sekolah menyelenggarakan model pembelajaran teaching factory sebagai bentuk penyaluran pembelajaran antara sekolah dengan industri. Upaya pencapaian target sasaran ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui baik program bantuan secara langsung maupun sosialisasi kepada sekolah agar menyelenggarakan pembelajaran teaching factory secara mandiri. Pada tahun sebelumnya tidak ada intervensi secara langsung melalui penganggaran APBN, namun secara baseline sudah ada sebanyak 837 sekolah atau sekitar 5,83% SMK secara nasional yang menyelenggarakan pembelajaran teaching factory di sekolah. Sementara pada tahun 2021 Direktorat melaksanakan program bantuan teaching factory dengan capaian sasaran sebanyak 60 SMK. Kendala / Permasalahan : Adanya pandemi covid-19 menyebabkan proses pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory di SMK menjadi terkendala. Pelaksanaan pembelajaran praktik disertai produk barang jadi yang siap dipasarkan tidak dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan pembelajaran secara luring. Disamping itu, beberapa industri mitra bagi SMK yang telah menyelenggarakan pembelajaran teaching factory di sekolah juga mengalami penurunan produksi yang juga berdampak pada ketercapaian pelaksanaan pembelajaran teaching factory di sekolah. Strategi / Tindak Lanjut : Keberlanjutan model pembelajaran berbasis teaching factory akan kembali dilaksanakan disaat pandemi sudah usai. Direktorat SMK akan mendorong sekolah agar penerapan pembelajaran berbasis teaching factory dijadikan sebagai model utama dalam pembelajaran di sekolah. Tentunya perlu usaha yang lebih berat dengan kondisi usai pandemi yang menyebabkan usaha produksi yang sebelumnya telah berjalan di sekolah harus dilaksanakan kembali dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Namun Ditjen Diksi juga mengajak dunia industri agar terlibat aktif dalam upaya pengembangan SMK sebagai bentuk pemulihan ekonomi secara nasional.</p> |
|----|---|---|---|---|---|---|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSIe

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-----|---|--|--|
| 12 | [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [[IKP 3.1] Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi | orang | 300 | TW1 : 0 TW2 : 50 TW3 : 150 TW4 : 300 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 506 TW4 : 966 | TW1 : Progress / Kegiatan : Program: Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Dosen, instruktur dan Pimpinan PT Vokasi dan Profesi Progres: 1. Finalisasi pedoman kegiatan 2. Reviu laman pendaftaran peserta 3. Pembahasan mekanisme pelatihan & uji kompetensi Kendala / Permasalahan : Honor Jasa Profesi yang ditiadakan membuat aktivitas program menjadi terhambat Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan percepatan pembahasan penyusunan pedoman pelaksanaan 2. Persiapan sosialisasi kegiatan setelah finalisasi penyusunan dokumen pelaksanaan 3. Terkait pembayaran honor jasa profesi PTVP telah menyurati ke sesditjen pendidikan vokasi, dan sedang menunggu tindak lanjut. TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian di triwulan 2 masih 0 dikarenakan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi untuk SDM di pendidikan tinggi vokasi, untuk proses pendaftaran diperpanjang hingga 14 Juli 2021, sehingga sampai dengan triwulan 2 ini proses pendaftaran masih berlangsung dan capaian belum bisa ditentukan. Kemudian tahap selanjutnya akan dilakukan proses seleksi administrasi sampai dengan akhir Juli. Di awal Agustus akan diumumkan peserta yang lolos untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi untuk SDM pendidikan tinggi vokasi. Kendala / Permasalahan : Proses pendaftaran diperpanjang karena penyusunan pedoman kegiatan memakan waktu lebih lama, disebabkan oleh peniadaan honor jasa profesi. Peniadaan honor jasa profesi menyebabkan tidak bisa menghadirkan tim ahli/narasumber. Strategi / Tindak Lanjut : Dalam proses penyusunan pedoman kegiatan melibatkan konsultan dan dosen dari pihak swasta untuk mempercepat proses penyusunan. Dengan melibatkan konsultan dan dosen dari pihak swasta, pedoman telah diselesaikan di awal Juni 2021. TW3 : Progress / Kegiatan : Pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan bagi Dosen, Instruktur, dan Pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi. Pelaksanaan peningkatan Gelombang 1 dan Gelombang 2 sudah dilaksanakan untuk 506 orang. Saat ini gelombang 3 sedang dalam tahap verifikasi akhir penerima bantuan untuk Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi. Kendala / Permasalahan : Proses pencairan bantuan untuk penerima gelombang 2 baru akan dilakukan pada akhir Oktober 2021 disebabkan persyaratan dokumen peserta yang belum lengkap. Strategi / Tindak Lanjut : Akan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi bagi penerima bantuan peningkatan kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi. TW4 : Progress/Kegiatan : Progress/Kegiatan : pelaksanaan program peningkatan kompetensi bagi SDM pendidikan tinggi vokasi tahun 2021 dilakukan bagi dosen, instruktur, dan pimpinan PT Vokasi. Total yang mengikuti untuk tahun 2021 sebanyak 966 orang mendapatkan bantuan dalam program ini yang terdiri dari: dosen 760 orang, instruktur 146 orang, dan pimpinan 60 orang. kompetensi yang diikuti oleh 760 orang dosen adalah dengan rincian : 1. care service (33 orang) 2. economy creative (242 orang) 3. manufacture (236 orang) 4. tourism and hospitality (23 orang) 5. lainnya (226 orang) kompetensi yang diikuti oleh 146 orang instruktur adalah dengan rincian : 1. care service (9 orang) 2. economy creative (21 orang) 3. manufacture (87 orang) 4. tourism and hospitality (2 orang) 5. lainnya (27 orang). capaian yang melebihi target dikarenakan untuk perencanaan awal pelaksanaan akan dilaksanakan secara luring namun karena pandemi pelaksanaan dialihkan menjadi daring sehingga terjadi penambahan peserta. Kendala / Permasalahan : 1) Proses sosialisasi program melalui daring dirasa kurang optimal karena informasi yang didapat tidak tersampaikan secara maksimal. 2) Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan level PPKM menyebabkan terjadinya penundaan/perubahan jadwal pelaksanaan. 3) Proses pencairan penerima bantuan gelombang 1 tahap 2 mengalami kendala yang disebabkan karena laporan pelaksanaan tahap 1 belum selesai. 4) Pembayaran pajak pihak penyelenggara untuk gelombang satu belum semua mengumpulkan efaktur. 5) Untuk peserta gelombang 1 tahap 2 masih banyak data yang belum sesuai. 6) jadwal pelaksanaan yang terlalu mepet. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Proses sosialisasi kegiatan untuk tahun berikutnya akan di adakan dengan lebih masif dengan metode blended baik secara daring maupun luring, serta dilakukan proses pendampingan agar pelaksanaan sosialisasi kegiatan dapat di maksimalkan. 2) Timeline kegiatan akan lebih dilaksanakan sejak awal tahun dan dipadatkan sehingga apabila terjadi penundaan atau perubahan jadwal masih terdapat sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang panjang. 3) Untuk mempermudah proses pencairan sistem pembayaran kegiatan tahun berikutnya akan dilakukan dengan sistem kontrak, sehingga proses pencairan dapat dilaksanakan lebih cepat dan pengawasan nya lebih terarah. 4) Pendampingan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya akan dilakukan lebih intensif dan dilakukan secara luring, sehingga kelengkapan data peserta sebagai syarat administrasi dan syarat pencairan dana dapat berjalan sesuai rencana. |
|----|--|--|-------|-----|---|--|--|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|----|--|--|---|
| 13 | [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.2] Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 50 | TW1 : 10 TW2 : 15 TW3 : 35 TW4 : 50 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 36.73 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : program : 1. Revitalisasi Prodi Vokasi dan Profesi 2. Perguruan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Berbasis Industri progres : Proses Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Kendala / Permasalahan : Honor Jasa Profesi yang ditiadakan membuat aktifitas program menjadi terhambat Strategi / Tindak Lanjut : 1. Akan dilakukan launching program perguruan tinggi vokasi yang menerapkan kurikulum berbasis industri. 2. Sedang dilakukan penyusunan laporan pada program revitalisasi prodi vokasi dan profesi. 3. Terkait pembayaran honor jasa profesi PTVP telah menyurati ke seditjen pendidikan vokasi, dan sedang menunggu tindak lanjut. 4. Rencana sosialisasi kegiatan setelah finalisasi penyusunan dokumen pelaksanaan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Program pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholder dalam konteks kerjasama profesional belum dapat terlaksana. Kendala / Permasalahan : Keterbatasan jumlah reviewer yang memiliki kualifikasi tertentu serta berpengalaman sebagai reviewer, baik dari akademisi maupun praktisi (Dudika). Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan beberapa calon reviewer untuk mempercepat proses review agar kegiatan dapat segera terlaksana</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Proses finalisasi penyusunan instrumen terkait pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat program di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang bersinggungan secara langsung terhadap persentase pendidikan tinggi yang sumber daya nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mendapatkan data tersebut saat ini Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pendidikan Tinggi Vokasi.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : sampai akhir tahun 2021 ini PT Vokasi yang sumber daya nya sudah dimanfaatkan adalah sebanyak 18 politeknik/AKN, yaitu AKN Putra Sang Fajar Blitar, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. adapun pemanfaatan sumber daya PT Vokasi dalam konteks kerjasama profesional adalah 1) Serapan lulusan PT Vokasi di IDUKA 2) Dukungan mahasiswa kepada stakeholders selama proses magang 3) Dukungan mahasiswa kepada stakeholders selama proses magang Kendala / Permasalahan : 1. Pelaksanaan pembelajaran teaching factory tidak optimal karena ada kebijakan PPKM, sehingga resources yang dimanfaatkan profesional tidak optimal 2. Kerjasama antara PT Vokasi dengan industri tidak berjalan maksimal 3. Partisipasi guru tamu dalam pembelajaran terbatas akibat kebijakan PPKM 4. Implementasi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) tidak optimal. 5. Pengelolaan program Matching Fund dan Competitive Fund belum optimal Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pembelajaran teaching factory dilakukan secara blended agar unit produksi tetap berjalan 2. Optimalisasi kerjasama antara PT Vokasi dengan industri. 3. Partisipasi guru tamu dalam pembelajaran dilaksanakan secara blended. 4. Optimalisasi implementasi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) 5. Mendorong PT Vokasi untuk melakukan pengelolaan program Matching Fund dan Competitive Fund dengan maksimal</p> |
| 14 | [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.3] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH | lembaga | 2 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 2 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : program : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang menerapkan SPMI Progres : 1. Proses Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan 2. Penyusunan Pedoman Fasilitator SPMI vokasi Kendala / Permasalahan : Honor Jasa Profesi yang ditiadakan membuat aktifitas program menjadi terhambat Strategi / Tindak Lanjut : 1. Terkait pembayaran honor jasa profesi PTVP telah menyurati ke seditjen pendidikan vokasi, dan sedang menunggu tindak lanjut. 2. Rencana sosialisasi kegiatan setelah finalisasi penyusunan dokumen pelaksanaan.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : program : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang menerapkan SPMI Progres : 1. Proses Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan 2. Penyusunan Pedoman Fasilitator SPMI vokasi Kendala / Permasalahan : Terkendala regulasi peraturan honor jasa profesi, mengingat pembina nya berasal dari PTN. Strategi / Tindak Lanjut : bersurat dan menunggu kebijakan kementerian lebih lanjut</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan 3 tahun 2021, belum ada Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTN-BH. Politeknik Negeri Malang sebagai Politeknik berstatus BLU paling lama/sejak 2012, belum bisa beralih status menjadi PTNBH karena masih ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Sampai saat ini dilakukan pembinaan terhadap Politeknik Negeri Malang untuk bisa beralih status menjadi PTNBH Kendala / Permasalahan : Masih ada kendala terkait kelengkapan administrasi PTN Vokasi beralih status menjadi PTNBH Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendampingan terhadap PTN yang berpotensi untuk menjadi PTNBH dengan memberikan arahan dan penataan terhadap kelengkapan-kelengkapan yang harus dilakukan agar memenuhi persyaratan menjadi PTNBH</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dari jumlah 47 politeknik negeri dan akademi komunitas negeri di tahun 2021 belum ada institusi yang menjadi PTN-BH. namun ditjen vokasi telah melakukan pendampingan kepada politeknik negeri malang yang saat ini telah menjadi BLU untuk dapat menjadi PTN-BH tetapi ditahun ini masih belum bisa tercapai. Kendala / Permasalahan : 1) Masih kurangnya sosialisasi terkait perubahan status PTN-BH kepada PT Vokasi. 2) Persyaratan menjadi PTN-BH yang dirasa terlalu tinggi bagi PT Vokasi membuat PT Vokasi lebih fokus untuk memperbaiki dan mempersiapkan persyaratan secara bertahap. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Melakukan sosialisasi kepada PT Vokasi terkait perubahan status menjadi PTN-BH. 2) Memberikan pendampingan kepada PT Vokasi yang akan melakukan perubahan status menjadi PTN-BH.</p> |

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|---|---|---|
| 15 | [SP 3] Tenwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.4] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) | lembaga | 4 | <p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 4</p> | <p>TW1 : 2</p> <p>TW2 : 5</p> <p>TW3 : 5</p> <p>TW4 : 5</p> | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : capaian di triwulan 1 ini merupakan capaian di tahun 2020, dimana terdapat 2 satker yang telah ditetapkan menjadi BLU yaitu Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. karena metode perhitungan untuk IKP 3.4 adalah akumulatif, maka capaian di tahun 2020 dimasukkan ke triwulan 1 tahun 2021. Kendala / Permasalahan : tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan selain pandemi covid. Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi dengan politeknik yang mengajukan untuk ditetapkan menjadi BLU melalui daring</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : sampai dengan triwulan 2 ini, sudah ada 3 satker yang ditetapkan sebagai BLU, yaitu : 1. Politeknik Negeri Bali mendapatkan SK BLU bulan Mei 2021 2. Politeknik Negeri Jakarta mendapatkan SK BLU bulan Mei 2021 3. Politeknik Negeri Semarang mendapatkan SK BLU bulan Juni 2021 Kendala / Permasalahan : tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan selain pandemi covid. Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi dengan politeknik terkait melalui daring.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progress / Kegiatan : Sampai triwulan 3 sudah terdapat 3 satker yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta di Bulan Mei 2021, dan Politeknik Negeri Semarang ditetapkan di Bulan Juni 2021. Selain itu, di triwulan III terdapat 7 Satker yang mengajukan menjadi BLU, diantaranya Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Samarinda. namun hanya 5 Satker (Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Negeri Jember) sudah mengajukan dokumen administratif (Rencana Strategi Bisnis, standar pelayanan minimal, Pola Tata Kelola, dan laporan keuangan pokok) dan telah direvisi oleh Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Biro Hukum serta sudah dilakukan pembahasan dengan direktorat PPK BLU Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. 2 satker (Politeknik Negeri Medan dan Politeknik Negeri Ujung Pandang) sudah diajukan ke Direktorat PPK BLU, Untuk Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Samarinda harus dilakukan perbaikan dokumen administratif (perubahan base line capain target dan realisasi) namun masih dalam proses revisi/perbaikan dokumen karena usulan dokumen melewati tahun anggaran 2021. Kendala / Permasalahan : masih belum ditetapkannya dewan pengawas dan masih dalam progress pengusulan dan penetapan, sehingga menjadi kendala dalam pengajuan usulan RBA. Satker memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan revisi RBA setelah penelaahan; perlu adanya waktu untuk melakukan proses lembar pengesahan RBA yang ditandatangani oleh Menteri yang dalam hal ini didelegasikan oleh Sekjen. Strategi / Tindak Lanjut : berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian Setditjen Diksi dan Biro SDM dalam hal pengusulan dewan pengawas. Selain itu perlu adanya koordinasi yang intens untuk mempercepat waktu revisi RBA setelah penelaahan dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Progress / Kegiatan : Sampai triwulan 3 sudah terdapat 3 satker yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta di Bulan Mei 2021, dan Politeknik Negeri Semarang ditetapkan di Bulan Juni 2021. Selain itu, di triwulan III terdapat 7 Satker yang mengajukan menjadi BLU, diantaranya Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Samarinda. namun hanya 5 Satker (Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Negeri Jember) sudah mengajukan dokumen administratif (Rencana Strategi Bisnis, standar pelayanan minimal, Pola Tata Kelola, dan laporan keuangan pokok) dan telah direvisi oleh Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Biro Hukum serta sudah dilakukan pembahasan dengan direktorat PPK BLU Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. 2 satker (Politeknik Negeri Medan dan Politeknik Negeri Ujung Pandang) sudah diajukan ke Direktorat PPK BLU, Untuk Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Samarinda harus dilakukan perbaikan dokumen administratif (perubahan base line capain target dan realisasi) namun masih dalam proses revisi/perbaikan dokumen karena usulan dokumen melewati tahun anggaran 2021. Kendala / Permasalahan : 1. Pengajuan usulan dokumen administratif BLU (rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, tata kelola dan laporan keuangan pokok) diajukan di akhir tahun anggaran 2021, sehingga satuan kerja belum dapat ditetapkan menjadi BLU oleh Dit. PPK BLU, Kemenkeu 2. masih belum ditetapkannya dewan pengawas dan masih dalam progress pengusulan dan penetapan, sehingga menjadi kendala dalam pengajuan usulan RBA. Satker memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan revisi RBA setelah penelaahan; perlu adanya waktu untuk melakukan proses lembar pengesahan RBA yang ditandatangani oleh Menteri yang dalam hal ini didelegasikan oleh Sekjen. Strategi / Tindak Lanjut : berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian Setditjen Diksi dan Biro SDM dalam hal pengusulan dewan pengawas. Selain itu perlu adanya koordinasi yang intens untuk mempercepat waktu revisi RBA setelah penelaahan dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.</p> |
|----|--|---|---------|---|---|---|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



| | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-----|---|--|---|
| 16 | [SP 4] Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri | [IKP 4.1] Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri | orang | 100 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 70 TW4 : 100 | TW1 : 61 TW2 : 1204 TW3 : 1224 TW4 : 1488 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : program : Pelatihan instruktur dan pengelola, Peserta didik/Penguji/Pengelola Uji Kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi progres : 1. Tahap penyusunan pedoman dan kriteria pemilihan 2. Tahap verifikasi dan penetapan</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Kurasi LKP yang akan dilatih instruktur/pengelola sesuai kriteria yang ditetapkan tidak bisa dilakukan verifikasi secara langsung karena pandemi covid 19 2. Kesulitan mencari industri yang mau bekerjasama untuk melatih instruktur karena pandemi covid 19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. LKP diminta untuk mengirimkan company profil untuk melihat kesesuaian kriteria. 2. Pelaksanaan pelatihan teori dilakukan secara daring, dan untuk praktik akan dilakukan secara luring di industri sehingga durasi pelatihan menjadi lebih singkat.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Telah terbit SK penetapan . Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk tahap berikutnya, yaitu: 1. telah dilakukan sosialisasi kepada calon peserta, dan peserta dalam proses pengisian data dalam aplikasi SIMANTAP. 2. memasuki tahap penetapan IDUKA untuk 5 jenis keterampilan (barista, batik, digital marketing, refleksi, tata busana), dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan. 3. persiapan untuk ortek dan validasi data melalui aplikasi SIMANTAP. Dengan rincian: 1. dari pengimbasan PKSDM bagi instruktur dengan jumlah 525 orang; 2. pengujian uji kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi dengan jumlah 59 orang; 3. pengimbasan program PKSDM bagi pengelola LKP dengan jumlah 525; 4. pengelola uji kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi dengan jumlah 34 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. terkendala dalam melakukan visitasi IDUKA yang akan ditetapkan, karena masih pandemi covid 19. 2. penyusunan kurikulum dan bahan ajar masih dalam tahap koordinasi, karena koordinator penyusunan kurikulum dan bahan ajar sedang terpapar covid 19.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. untuk visitasi IDUKA telah disusun dan dijadwalkan, dan akan dilaksanakan ketika PPKM berakhir. 2. saat ini koordinasi tetap dilakukan dengan subkoordinator penyusunan kurikulum dan bahan ajar, untuk progres penyusunan.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pelatihan oleh industri ini diikuti oleh SDM LKP yaitu pengujian uji kompetensi yang memperoleh peningkatan kompetensi sebanyak 20 orang, bidang tata boga, penerbangan, TIK, digital marketing, tari modern, broadcasting, bordir dan sulam, MC, ekspor impor, akuntansi, dan hipnoterapi. pelatihan dilakukan di Juli-Agust. Hingga tw III masih dilakukan penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk keterampilan tata busana, pijat refleksi, barista, membuat, dan digital marketing di IDUKA. Pelatihan yang akan dilakukan di oktober adalah untuk oleh SDM LKP yang terdiri dari instruktur 100 orang, dan pengelola LKP sebanyak 100 orang. bidang tata busana, pijat refleksi, barista, membuat, dan digital marketing. capaian sasaran di tw III telah melebihi 100% karena efek pandemi yang menyebabkan perubahan pemilihan jenis keterampilan, dan hal ini mengakibatkan perubahan harga satuan.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) peningkatan kompetensi untuk pengujian karena ada kebijakan PPKM jadwal mundur dari yang semula direncanakan, karena untuk pengujian baru harus dilaksanakan secara luring. 2) durasi pelaksanaan kegiatan hanya efektif 3 hari, dan dirasa kurang untuk pelatihan pengujian baru. 3) terdapat peserta yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan. 4) terdapat jenis keterampilan yang harus diganti karena LKP dan IDUKA nya sedikit yang bersedia dijadikan tempat pelatihan sehingga harus diganti. yang semula las busur manual diganti menjadi tata busana. 5) belum samanya pemahaman IDUKA dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan peningkatan kompetensi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1) kegiatan tetap dilaksanakan secara luring meskipun waktu diundur sampai kebijakan PPKM berakhir. 2) yang dilakukan secara luring adalah materi-materi pokok, dan untuk pendalaman materi dilakukan penguasaan mandiri oleh master pengujian. 3) penggantian peserta 4) memilih jenis keterampilan yang jumlah LKP dan IDUKA nya terbanyak, sehingga terpilih keterampilan tata busana. 5) dilaksanakan kegiatan sebanyak 2 kali untuk penyusunan kurikulum dan bahan ajar.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Perealisasi IKP ini didukung oleh kegiatan: 1. Pelatihan peningkatan kompetensi instruktur lembaga kursus dan pelatihan berstandar industry telah terealisasi sebanyak 100 orang untuk 5 jenis keterampilan yakni tata busana, barista, spa, batik, pijat refleksi. 2. Pelatihan peningkatan kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan berstandar industry telah terealisasi sebanyak 100 orang untuk 5 jenis keterampilan yakni tata busana, barista, spa, batik, pijat refleksi. 3. Pelatihan peningkatan kompetensi pengujian uji kompetensi dengan teknologi terbaru dengan anggaran Direktorat kursus dan pelatihan telah terealisasi sebanyak 64 orang untuk bidang Fotografi, Digital Marketing, Batik, Pijat Tradisional dan Otomotif Sepeda Motor, Broadcasting, Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral, Pengasuh Anak, Baltra Ramuan, Sekretaris, Barista, Tari Modern, Awak Kabin Pesawat Terbang, Tata Operasi Darat, dan Yoga.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Proses kurasi yang terlambat karena jenis keterampilan yang ditetapkan mengalami perubahan dari sebelumnya terdapat jenis keterampilan Las busur manual digantikan dengan jenis keterampilan Tata Busana, disebabkan sulitnya mencari Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menyelenggarakan kursus Las Busur Manual yang sudah berstandar industry. 2. Proses pencarian IDUKA yang akan dijadikan tempat pelatihan mengalami kendala dikarenakan, adanya PPKM menyebabkan adanya kemunduran waktu pelaksanaan dari jadwal semula. 3. Pada tahap pelaksanaan, ada calon peserta yang tidak dapat berangkat karena hasil tes Covid-19 positif. 4. Aturan pembatasan sosial, tidak memperbolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta sesuai ketentuan. 5. Karena kegiatan pelatihan diadakan pada saat situasi pandemi dan protocol hotel hanya boleh sampai jam 9 malam untuk penggunaan ruang meeting sangat mempengaruhi jumlah jam pelatihan untuk tidak terpenuhi. 6. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi pengujian uji kompetensi. Sehingga tidak semua pengujian dapat difasilitasi oleh Direktorat untuk mendapatkan peningkatan kompetensi. 7. Tidak semua LSK membawa data dukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan pelatihan. 8. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi pengelola LSK, pengelola TUK, dan pengujian. Sehingga tidak semua pengelola dapat difasilitasi oleh Direktorat untuk mendapatkan peningkatan kompetensi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Jenis keterampilan Las Busur Manual digantikan dengan Jenis Keterampilan Tata Busana 2. Mencari IDUKA pengganti yang bersedia menerima peserta di masa PPKM 3. Pimpinan LKP yang bersangkutan menunjuk instruktur lain di lembaganya untuk menggantikan instruktur yang positif Covid-19. 4. Pelatihan pengujian dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, karena peserta yang akan diundang lebih dari 100 orang 5. Melakukan pelatihan secara hybrid dimana sebagian jam pelatihan tatap muka di ruang meeting dan sebagian jam pelatihan dilakukan online melalui zoom meeting, serta memberikan penguasaan mandiri bagi peserta pelatihan 6. Direktorat Kursus dan Pelatihan berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi/ Organisasi Profesi pembentuk LSK untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran pengujian secara mandiri 7. Disusun rencana tindak lanjut bagi LSK untuk melengkapi data dukungnya 8. LSK menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi aplikasi uji kompetensi secara mandiri untuk pengelola TUK dan pengujian uji kompetensi</p> |
|----|---|--|-------|-----|---|--|---|

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE



Jakarta, 26 Januari 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022

Ketua SPI Ditjen Pendidikan Vokasi,

Sukarpin, SE

NIP 196408141988121001

CATATAN HASIL REVIU (CHR) LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENDIKBUDRISTEK
TAHUN 2021

|  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Disusun oleh: Tanggal 13 Februari 2022 | Tim Reviewer: 1. Woro Pertiwi 2. Nirma 3. Budi Agung Prasetya 4. Aditya Hendri Saputra 5. Angga Cahya Seftian 6. Tesalonika Ruth D. |
|---|---|---|
| | Direviu oleh: Tanggal 13 Februari 2022 | Reviewer: Urip Widodo |
| | Disetujui oleh: Tanggal 14 Februari 2022 | Reviewer: Fuad Wiyono |
| Unit Organisasi | : | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
| Uraian Catatan Hasil Reviu | | No Indeks KKR |
| I. Tujuan dan Ruang Lingkup. A. Tujuan Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. B. Ruang Lingkup Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. | | |
| II. Hasil Reviu Hasil reviu Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek tahun 2021 dalam bentuk <i>softcopy</i> dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terdapat 8 (delapan) target kinerja yang tidak tercapai pada 3 (tiga) sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: | | |

| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Perjanjian Kinerja 2021 | Capaian Kinerja 2021 | Persentase (%) |
|---|---|---------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.1] Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha | % | 48 | 45,52 | 94,83 |
| | [IKP 1.2] Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR | % | 66,57 | 54,89 | 82,45 |
| | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR | % | 55,49 | 50,45 | 90,92 |
| | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | 54,15 | 42,41 | 78,32 |
| [SP 2] Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri | [IKP 2.4] Persentase SMK yang memperoleh status BLUD | % | 1,3 | 0,45 | 34,62 |
| | [IKP 2.5] Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory | % | 8 | 6,35 | 79,38 |
| [SP 3] Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri | [IKP 3.2] Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional | % | 50 | 36,73 | 73,46 |
| | [IKP 3.3] Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH | Lembaga | 2 | 0 | 0 |

2. Terdapat penurunan capaian kinerja Tahun 2021 terhadap capaian kinerja 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian Kinerja 2020 | Capaian Kinerja 2021 |
|---|---|--------|----------------------|----------------------|
| [SP 1] Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | [IKP 1.3] Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha | % | 52,61 | 50,16 |
| | [IKP 1.4] Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR | % | 52,22 | 50,45 |
| | [IKP 1.5] Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR | % | 44,02 | 42,41 |

3. Terdapat target pada program prioritas yang tidak tercapai, yaitu PT Vokasi yang mendukung Kebutuhan Industri (target 49; realisasi 43; persentase 87,76%).
4. Terdapat kelemahan/kekurangan dalam penyajian LAPKIN, antara lain:
 - a. data tabel perbandingan keseluruhan atas capaian sasaran program pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021 tidak ada;
 - b. terlihat foto-foto siswa dan masyarakat tidak menerapkan Protokol Kesehatan (memakai masker dan menjaga jarak), jika dokumentasi diambil pada masa Covid-19 hendaknya dengan menerapkan protokol kesehatan.

Rekomendasi.

Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek agar:

1. menyempurnakan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tahun 2021 sesuai Petunjuk Teknis PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. lebih memperhatikan 8 (delapan) IKP dari 3 (tiga) sasaran program yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
3. memberi apresiasi kepada unit kerja yang realisasi capaian kinerjanya $\geq 100\%$ melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
4. memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tahun 2021 agar memperbaiki/mengoreksi Draft Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tahun 2021 sesuai dengan Catatan Hasil Reviu APIP.

Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasi,



Wikan Sakarinto

Jakarta, 14 Februari 2021

Pengendali Mutu,



Fuad Wiyono

NIP 195903241983031002